



PEMERINTAH
PROVINSI JAMBI

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

BIRO ORGANISASI
SETDA PROVINSI JAMBI
2022



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021 dapat diselesaikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2021. LKj Provinsi Jambi Tahun 2021 ini sekaligus merupakan laporan kinerja masa akhir periode RPJMD Pemerintah Provinsi Jambi 2016-2021 yang merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj ini disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat tentang kinerja Pemerintah Provinsi Jambi selama satu tahun anggaran dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja tahun 2021. Penyusunan LKj ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana penerapan Rencana Strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini merupakan langkah percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada masa yang akan datang.

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jambi beserta analisis dan evaluasinya sangat penting bagi upaya peningkatan kualitas kinerja organisasi secara terus menerus dan berkesinambungan. Hal tersebut memerlukan dukungan seluruh Perangkat Daerah Provinsi Jambi agar senantiasa meningkatkan kinerja, sehingga akan mendukung terwujudnya penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang akuntabel menuju Jambi TUNTAS 2021.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 telah banyak membuahkan hasil pembangunan, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang perlu ditingkatkan capaiannya pada masa yang akan datang. Semoga dengan tersusunnya laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi dalam pelaksanaannya.

Jambi, Maret 2022

a.n. **GUBERNUR JAMBI**
SEKRETARIS DAERAH



H. SUDIRMAN, S.H., M.H.
Pembina Utama
NIP. 19680109 199203 1 002



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| IKHTISAR EKSEKUTIF..... | iv |
| DAFTAR GAMBAR | viii |
| DAFTAR GRAFIK | ix |
| DAFTAR DIAGRAM | x |
| DAFTAR TABEL | xi |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Kedudukan dan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan | 2 |
| 1.3. Kondisi Geografis Daerah | 3 |
| 1.3.1. Letak Wilayah dan Topografi | 3 |
| 1.3.2. Klimatologi | 3 |
| 1.3.3. Potensi Wilayah | 5 |
| 1.3.4. Kondisi Demografi | 6 |
| 1.3.4.1. Penduduk | 6 |
| 1.4. Potensi Unggulan Daerah | 8 |
| 1.5. Kondisi Ekonomi Daerah | 8 |
| 1.5.1. Pertumbuhan PDRB | 8 |
| 1.5.2. Inflasi | 12 |
| 1.5.3. Profil Penduduk dibawah garis kemiskinan | 15 |
| 1.6. Isu Strategis | 16 |
| 1.7. Inovasi dalam Pengelolaan Kinerja | 17 |
| 1.8. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja | 18 |
| BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | 19 |
| 2.1. Rencana Strategis | 19 |
| 2.1.1. Visi dan Misi | 19 |
| 2.1.2. Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja | 20 |
| 2.2. Perjanjian Kinerja | 32 |
| BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA | 33 |
| 3.1. Capaian Kinerja | 33 |
| 3.1.1. Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi | 33 |
| 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama s.d. tahun 2021 | 34 |
| 3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Perjanjian Kinerja | 39 |
| 1. Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Partisipatif dengan Pelayanan Publik Berkualitas .. | 37 |

| | |
|--|------------|
| 2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan | 48 |
| 3. Sasaran Meningkatnya Kapabilitas dan Partisipasi Perempuan di berbagai Bidang Kehidupan | 70 |
| 4. Sasaran Terwujudnya Ketertiban Umum Daerah | 75 |
| 5. Sasaran Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP) | 87 |
| 6. Sasaran Perubahan Struktur Ekonomi yang Mampu Memberikan Nilai Tambah | 89 |
| 7. Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan | 92 |
| 8. Sasaran Terciptanya Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi yang Menyentuh Terhadap Akses dan Sentra Perekonomian | 104 |
| 9. Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Listrik | 107 |
| 10. Sasaran Meningkatnya Akses Terhadap Air Bersih dan Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Irigasi | 110 |
| 11. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan | 115 |
| 12. Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan | 122 |
| 13. Sasaran Menurunnya Angka Pengangguran | 129 |
| 14. Sasaran Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk | 138 |
| 3.4. Realisasi Anggaran | 140 |
| BAB IV : PENUTUP | 143 |
| LAMPIRAN | |



IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2021 ini merupakan amanat Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Provinsi Jambi.

LKj ini disusun dengan melakukan analisa untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) serta capaian tujuan Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur Jambi yang telah dicanangkan pada awal periode RPJMD 2016-2021 telah berhasil dicapai.

Secara umum, capaian indikator kinerja utama tahun 2021 yang telah diperjanjikan dan juga sekaligus merupakan indikator capaian tujuan RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 dapat dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, tujuan/sasaran yang telah berhasil dicapai. Kedua, tujuan/sasaran yang menunjukkan kemajuan bermakna dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2022. Ketiga, tujuan yang masih memerlukan upaya lebih besar untuk mencapainya.

Indikator Kinerja Utama RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 yang telah tercapai adalah :

1. Total Factor Productivity (TFP) pada sasaran Total Factor Productivity
2. Laju Pertumbuhan Penduduk pada sasaran Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk
3. Rasio Elektrifikasi pada sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Listrik
4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan
5. Indeks Reformasi Birokrasi pada sasaran Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Partisipatif dengan Pelayanan Publik yang Berkualitas.
6. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada sasaran Meningkatnya Kapabilitas dan Partisipasi Perempuan di Berbagai Bidang Kehidupan
7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada sasaran Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
8. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan pada sasaran Meningkatnya Akses terhadap Air Bersih dan Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Irigasi
9. Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap pada sasaran Terciptanya Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi yang Menyentuh terhadap Akses dan Sentra Perekonomian
10. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada sasaran terwujudnya Ketertiban Umum Daerah
11. Ketersediaan Energi (kkal/kal/kap) pada sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan
12. Angka Kemiskinan pada sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan
13. Persentase Share Sektor Sekunder terhadap PDRB pada sasaran Perubahan Struktur Ekonomi yang Mampu Memberikan Nilai Tambah

Indikator Kinerja Utama RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 yang telah menunjukkan kemajuan signifikan dan diharapkan dapat tercapai pada masa yang akan datang (on-track) adalah :

1. Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik pada sasaran Meningkatnya Akses terhadap Air Bersih dan Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Irigasi

Indikator Kinerja Utama RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 yang telah menunjukkan kemajuan namun masih diperlukan upaya maksimal untuk mencapainya adalah :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka pada sasaran Menurunnya angka Pengangguran

Capaian dari masing-masing indikator dapat dilihat pada diagram berikut ini :

Diagram i. Persentase capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021



Secara keseluruhan, capaian Sasaran Provinsi Jambi melalui indikator utama tersebut di atas sampai dengan periode akhir RPJMD telah tercapai dengan baik. Sasaran yang mendapatkan angka capaian paling tinggi yakni pada sasaran Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP) dengan persentase sebesar 273,33%. Sedangkan capaian paling rendah berada pada Sasaran ke-lima belas yakni Menurunnya angka pengangguran hanya mencapai angka 55,01%. Belum maksimalnya capaian sasaran ini merupakan permasalahan yang dihadapi oleh setiap daerah di negara berkembang. Permasalahan ini timbul akibat jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja, ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan dengan kebutuhan kualifikasi tenaga kerja yang tersedia serta penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. Capaian indikator TPT diatas memperlihatkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Jambi pada tahun 2021 turut pula terganggu seiring dengan ekonomi global yang mengalami tekanan dikarenakan pandemi covid-19.

Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan upaya yang mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD dan RKPD 2021, yang mencakup juga penentuan program/ kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/ kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk. Pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk sistem akuntabilitas kinerja yang dikenal sebagai e-sakip adalah bagian dari upaya penyelesaian masalah-masalah pembangunan melalui intervensi program/ kegiatan yang berbasis data dan terfokus. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jambi juga telah menerapkan SKP Online yang menjabarkan kinerja individu dalam sebuah sistem yang setiap bulannya dapat diketahui capaian kinerja pada setiap level jabatan. Begitu juga pengembangan sistem pengendalian berbasis teknologi informasi melalui link laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan (lppk).

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Jambi ke depan. *Pertama*, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan masih tingginya angka rumah tangga sangat miskin, laju inflasi yang cenderung naik, hingga nilai ekspor non migas Provinsi Jambi yang masih rendah. Peran Pemerintah Provinsi Jambi diperlukan untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap warga negara, dengan menjadi fasilitator dan katalisator atas berbagai inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam pembangunan. Ini juga mencakup pentingnya perlindungan dan peningkatan inklusi sosial bagi kelompok-kelompok marjinal yang masih menghadapi ketimpangan akses dan manfaat pembangunan.

Kedua, hal ini juga bisa diartikan, pentingnya koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan berbagai unsur baik Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jambi, daerah yang berbatasan dengan Provinsi Jambi maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah. Beberapa sasaran seperti masih tingginya angka rumah tangga sangat miskin sebagai akibat dari bertambahnya jumlah penduduk tanpa diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, laju inflasi yang cenderung naik, hingga nilai ekspor non migas Provinsi Jambi yang masih rendah menunjukkan pentingnya kontribusi dan koordinasi dengan dunia usaha dan juga masyarakat. Tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Bagi instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas, kreatifitas, inovasi, dan komitmen yang kuat dalam upaya mencapai kinerja yang akuntabel sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk landasan dalam peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.



DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------|--|-----|
| 1.1. | Suasana Kantor Gubernur Provinsi Jambi Tempo Dulu | 2 |
| 1.2. | Peta Provinsi Jambi | 3 |
| 1.3. | Persentase Luas Daerah menurut Kabupaten/Kota | 4 |
| 1.4. | Taman Nasional Kerinci Seblat, TN. Berbak, TN Bukit Tiga Puluh | 5 |
| 1.5. | Proporsi Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/Kota | 8 |
| 1.6. | Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Provinsi di Wilayah Sumatera | 11 |
| 1.7. | Sumbangan Kelompok Pengeluaran | 14 |
| 3.1. | Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 | 36 |
| 3.2. | Piagam Penghargaan SAKIP | 41 |
| 3.3. | Penghargaan WTP | 44 |
| 3.4. | Penghargaan Indonesia Government Award | 44 |
| 3.5. | Penyebab Kematian Ibu Tahun 2021 | 55 |
| 3.6. | Perkembangan Indeks Variabel IDI 2019-2020 | 78 |
| 3.7. | Pelatihan Kewirausahaan | 91 |
| 3.8. | Aktivitas Panen Padi Petani | 97 |
| 3.9. | Ruas Jalan Provinsi Jambi | 105 |
| 3.10. | Aktivitas Perbaikan Jalan Provinsi Jambi | 106 |
| 3.11. | Sumber Energi Panas Bumi Provinsi Jambi | 108 |
| 3.12. | Ilustrasi Ketersediaan Air Minum Layak | 111 |
| 3.13. | Potret Kebutuhan Air Bersih | 113 |
| 3.14. | Daerah Irigasi di Daerah Kabupaten Kerinci | 113 |
| 3.15. | Ilustrasi Luas Kawasan Tertutup Pohon | 117 |
| 3.16. | Sebaran Hot Spot | 118 |
| 3.17. | Ilustrasi Kondisi Kemiskinan | 122 |
| 3.18. | Transaksi Jual Beli di Pasar Angso Duo Kota Jambi | 123 |
| 3.19. | Pelatihan Menjahit Bagi Wira usaha Baru..... | 106 |



DAFTAR GRAFIK

| | | |
|-------|---|-----|
| 1.1. | Pertumbuhan PDRB pada Beberapa Lapangan Usaha | 9 |
| 1.2. | Pertumbuhan PDRB pada Beberapa Komponen Pengeluaran | 10 |
| 3.1. | Trend Perkembangan Indeks Kearsipan Provinsi Jambi | 39 |
| 3.2. | Trend Perkembangan Nilai SAKIP Provinsi Jambi | 41 |
| 3.3. | Trend Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi | 49 |
| 3.4. | Umur Harapan Hidup Provinsi Jambi | 52 |
| 3.5. | Pertumbuhan Umur Harapan Hidup | 53 |
| 3.6. | Trend Rata-Rata Lama Sekolah | 61 |
| 3.7. | Trend Pengeluaran Perkapita Provinsi Jambi dan Nasional | 67 |
| 3.8. | Trend Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender | 72 |
| 3.9. | Trend Indeks Pemberdayaan Gender 2014-2021 | 73 |
| 3.10. | Trend Rata-Rata Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin | 74 |
| 3.11. | Perkembangan Indeks Aspek IDI | 78 |
| 3.12. | Trend Kejadian Demonstrasi | 85 |
| 3.13. | Trend TFP | 88 |
| 3.14. | Trend Sektor Sekunder Terhadap PDRB | 90 |
| 3.15. | Trend Skor PPH Konsumsi | 95 |
| 3.16. | NPT dan NTN | 99 |
| 3.17. | Perkembangan NTP per Subsektor | 99 |
| 3.18. | Trend Capaian Jalan Kondisi Mantap | 105 |
| 3.19. | Trend Rasio Elektrifikasi Provinsi Jambi dibanding Nasional | 110 |
| 3.20. | Trend Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak | 112 |
| 3.21. | Capaian Indikator Jaringan Irigasi Kondisi Baik | 114 |
| 3.22. | Rehabilitasi Hutan dan Lahan | 118 |
| 3.23. | Trend Perkembangan Hot Spot | 119 |
| 3.24. | Jumlah Pemberdayaan Desa Rawan Pangan | 105 |
| 3.25. | Trend Tingkat Pengangguran Terbuka | 130 |
| 3.26. | Trend Laju Pertumbuhan Penduduk | 139 |



DAFTAR DIAGRAM

| | | |
|-------|--|-----|
| i | Persentase Capaian IKU RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021 | v |
| 3.1. | Realisasi Nilai Indeks RB beserta Komponen | 38 |
| 3.2. | Perkembangan Nilai Komponen SAKIP | 42 |
| 3.3. | Nilai Rata-Rata IKP per OPD | 45 |
| 3.4. | Jumlah Kasus Gizi Buruk Bayi dan Balita | 58 |
| 3.5. | Persentase Akreditasi Puskesmas Tahun 2021 | 59 |
| 3.6. | Rata-Rata Lama Sekolah dan Pertumbuhan Rata-Rata Lama Sekolah | 61 |
| 3.7. | Harapan Lama Sekolah dan Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah | 63 |
| 3.8. | Trend Harapan Lama Sekolah Provinsi dibanding Nasional | 63 |
| 3.9. | Pertumbuhan Rata-Rata Lama Sekolah per Kabupaten/Kota | 65 |
| 3.10. | Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah Tahun 2021 | 66 |
| 3.11. | Pengeluaran Perkapita dan Pertumbuhannya | 67 |
| 3.12. | Pertumbuhan Pengeluaran Perkapita | 68 |
| 3.13. | Capaian Komponen IPG Provinsi Jambi Tahun 2021 | 72 |
| 3.14. | Capaian Komponen Pembentuk IDG 2021 | 74 |
| 3.15. | Perkembangan IDI 2009-2020 | 77 |
| 3.16. | Indikator IDI Jambi Tahun 2020 Kategori Baik | 80 |
| 3.17. | Indikator IDI Jambi Tahun 2020 Kategori Sedang | 81 |
| 3.18. | Indikator IDI Jambi Tahun 2020 Kategori Buruk | 81 |
| 3.19. | Perkembangan IDI Provinsi Jambi 2019-2020 | 83 |
| 3.20. | Ketersediaan Energi (kcal/kap/hr) Tahun 2015-2021 | 95 |
| 3.21. | Produksi Padi Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota | 98 |
| 3.22. | Luas Panen dan Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021 | 98 |
| 3.23. | Perkembangan Komponen IKLH | 117 |
| 3.24. | Garis Kemiskinan per Kabupaten/Kota | 125 |
| 3.25. | Angka Kemiskinan Provinsi Jambi dibanding Nasional | 125 |
| 3.26. | Pergerakan Gini Rasio 2020-2021 | 126 |
| 3.27. | Pergerakan NTP | 127 |
| 3.28. | Pergerakan NTN | 128 |
| 3.29. | Trend Tingkat Pengangguran Terbuka | 131 |
| 3.30. | Tingkat Pengangguran Terbuka | 132 |
| 3.31. | Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan | 132 |
| 3.32. | Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk | 139 |



DAFTAR TABEL

| | | |
|-------|--|-----|
| 1.1. | Jumlah Penduduk per Kabupaten/Kota | 7 |
| 1.2. | Kepadatan Penduduk | 7 |
| 1.3. | Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi Kota Jambi | 13 |
| 1.4. | Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi Kabupaten Bungo | 14 |
| 2.1. | Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja | 22 |
| 2.2. | Indikator Kinerja Utama | 25 |
| 2.3. | Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021 | 31 |
| 3.1. | Skala Nilai Capaian Kinerja | 33 |
| 3.2. | Realisasi IKU s.d. Tahun 2021 | 35 |
| 3.3. | Capaian Indeks Reformasi Birokrasi | 37 |
| 3.4. | Perbandingan Bobot Indeks RB | 38 |
| 3.5. | Kategori Penilaian SAKIP | 40 |
| 3.6. | Capaian Nilai SAKIP per Komponen | 41 |
| 3.7. | Realisasi Capaian Komponen Hasil Opini BPK | 43 |
| 3.8. | Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 | 46 |
| 3.9. | Capaian IPM | 49 |
| 3.10. | Perkembangan IPM per Kabupaten/Kota | 50 |
| 3.11. | Jumlah Kematian Ibu 2015-2021 | 55 |
| 3.12. | Jumlah Kematian Bayi | 57 |
| 3.13. | Rata-Rata Lama Sekolah | 60 |
| 3.14. | Harapan Lama Sekolah | 62 |
| 3.15. | Capaian Indeks Pemberdayaan Gender | 71 |
| 3.16. | Capaian IDI | 76 |
| 3.17. | Perkembangan Indeks Aspek IDI Jambi | 76 |
| 3.18. | Perkembangan Indeks Variabel IDI Jambi 2019-2020 | 79 |
| 3.19. | Pergerakan Kualitas Capaian IDI Provinsi Jambi 2019-2020 | 82 |
| 3.20. | Capaian Total Factor Productivity | 87 |
| 3.21. | Capaian Indikator Persentase Share Sektor Sekunder Terhadap PDRB | 89 |
| 3.22. | Proporsi PDRB per Sektor | 90 |
| 3.23. | Capaian Indikator Ketersediaan Energi | 93 |
| 3.24. | Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi | 94 |
| 3.25. | Kondisi Ketersediaan Energi Tahun 2021 | 94 |
| 3.26. | Capaian Indikator Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap | 104 |
| 3.27. | Capaian Rasio Elektrifikasi Pemenuhan Kebutuhan Listrik | 107 |
| 3.28. | Potensi Geothermal Provinsi Jambi | 108 |
| 3.29. | Lokasi Potensi Air terjun di Provinsi Jambi | 109 |
| 3.30. | Data Potensi Energi Potensial Air Terjun di Kabupaten Kerinci | 109 |
| 3.31. | Capaian Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak | 112 |
| 3.32. | Capaian Indikator Jaringan Irigasi Kondisi Baik | 114 |
| 3.33. | Capaian IKLH | 116 |
| 3.34. | Capaian Angka Kemiskinan | 122 |
| 3.35. | Perkembangan Tingkat Kemiskinan | 123 |
| 3.36. | Gini Ratio | 126 |
| 3.37. | Capaian Menurunnya Angka Pengangguran | 129 |
| 3.38. | Dampak Covid Terhadap Penduduk Usia Kerja | 133 |
| 3.39. | Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota | 134 |
| 3.40. | Penduduk Usia Kerja | 136 |
| 3.41. | Capaian Laju Pertumbuhan Penduduk | 138 |
| 3.42. | Realisasi Belanja Langsung Pendukung Sasaran | 141 |
| 3.43. | Realisasi Anggaran dibandingkan dengan Kinerja | 142 |

BAB I
PENDAHULUAN





BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja (LKj) Provinsi Jambi Tahun 2021 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, serta mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Indonesia sebagaimana telah diamanahkan oleh rakyat melalui Tap MPR Nomor IX Tahun 1998.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah Provinsi Jambi yang menjadi dokumen laporan kinerja tahunan berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Dengan disusunnya LKj Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021 ini, diharapkan bermanfaat untuk :

1. Mendorong Pemerintah Provinsi Jambi dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Menjadikan Pemerintah Provinsi Jambi lebih akuntabel, sehingga dapat berjalan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.
3. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Jambi.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat Provinsi Jambi terhadap penyelenggara Pemerintah Daerah.

1.2. Kedudukan & Asas Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemerintah Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646).



Gambar 1.1. Suasana Kantor Gubernur Jambi tempo dulu

Penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jambi dipimpin oleh seorang Gubernur yang dibantu seorang Wakil Gubernur. Asas penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan Negara yang terdiri dari atas : asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektivitas.

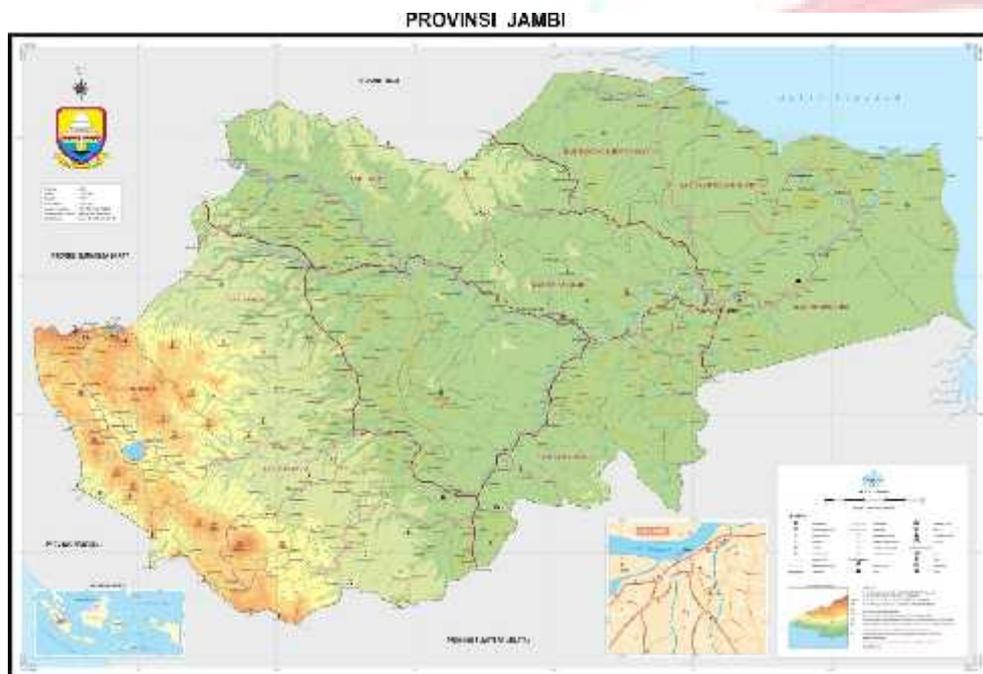
1.3. Kondisi Geografis Daerah

1.3.1. Letak Wilayah dan Topografi

Provinsi Jambi secara geografis terletak antara 0°45' sampai 2°45' lintang selatan dan antara 101°10' sampai 104°55' bujur timur. Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu.

Posisi ini menjadikan Provinsi Jambi masuk dalam rencana pembangunan tol laut di Indonesia serta menjadi provinsi yang cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle).

Gambar 1.2. Peta Provinsi Jambi

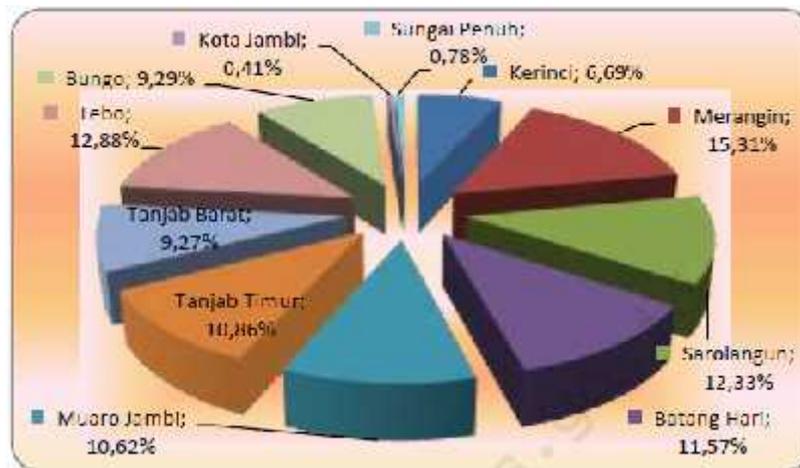


Luas Wilayah Provinsi Jambi sebesar 53.435 Km² dengan luas daratan 50.160,05 KM² dan luas perairan sebesar 3.274,95 KM² terdiri dari :

1. Kabupaten Kerinci 3.355,27 KM² (6,69%)
2. Kabupaten Merangin 7.679 KM² (15,31%)
3. Kabupaten Sarolangun 6.184 KM² (12,33%)
4. Kabupaten Batanghari 5.804 KM² (11,57%)
5. Kabupaten Muaro Jambi 5.326 KM² (10,62%)
6. Kabupaten Tanjung Jabung Timur 5.445 KM² (10,86%)
7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 4.649,85 KM² (9,27%)
8. Kabupaten Tebo 6.461 KM² (12,88%)
9. Kabupaten Bungo 4.659 KM² (9,29%)
10. Kota Jambi 205,43 KM² (0,41%)
11. Kota Sungai Penuh 391,5 KM² (0,78%)

Luas wilayah terbesar di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Merangin sebesar 7.679 KM² atau sebesar 15,31 persen dari total luas wilayah Provinsi Jambi, diikuti oleh Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun masing-masing sebesar 6.461 KM² dan 6.184 KM². Secara administratif, jumlah kecamatan dan desa/kelurahan di Provinsi Jambi tahun 2013 sebanyak 138 kecamatan dan 1.553 desa/kelurahan, dimana jumlah kecamatan terbanyak berada di Kabupaten Merangin yaitu 24 kecamatan, sedangkan jumlah desa/kelurahan terbanyak berada di Kabupaten Kerinci yaitu 287 desa/kelurahan.

Gambar 1.3. Persentase Luas Daerah menurut Kabupaten/Kota



(Sumber : BPS Provinsi, Jambi dalam angka 2021)

Secara topografis, Provinsi Jambi terdiri atas 3 (tiga) kelompok variasi ketinggian, yakni :

- 1) Daerah dataran rendah 0-100 m (69,1%), berada di wilayah timur sampai tengah. Daerah dataran rendah ini terdapat di Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagian Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin ;
- 2) Daerah dataran dengan ketinggian sedang 100-500 m (16,4%), pada wilayah tengah. Daerah dengan ketinggian sedang ini terdapat di Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin serta sebagian Kabupaten Batanghari; dan
- 3) Daerah dataran tinggi >500 m (14,5%), pada wilayah barat. Daerah pegunungan ini terdapat di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh serta sebagian Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin.

1.3.2. Klimatologi

Provinsi Jambi sebagai salah satu Provinsi di Sumatera yang terkenal dengan iklim tropis dan kaya akan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati, namun juga tetap menjadi kerentanan terjadi perubahan iklim.

Gejala perubahan iklim seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau, dan kenaikan muka air laut, akan mengancam daya dukung lingkungan dan kegiatan seluruh sektor pembangunan.

Sepanjang tahun 2020 (JDA 2021), Provinsi Jambi memiliki karakteristik curah hujan sedang dan lembab, sehingga Jambi termasuk daerah yang beriklim tropis. Rata-rata curah hujan pada tahun 2021 mencapai 1.905,56mm, sedangkan jumlah penyinaran matahari 58,51 jam perhari dengan kelembaban udara rata-rata sebesar 83,38%. Suhu udara rata-rata maksimum mencapai 34,03°C, sedangkan rata-rata minimum mencapai 19,50°C.

1.3.3. Potensi Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Adapun Kawasan strategis Nasional yang termasuk dalam kawasan wilayah Provinsi Jambi meliputi :

- Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat (Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan)
- Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi)
- Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau)
- Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (Provinsi Jambi)



Gambar 1.4. Obyek Wisata Gunung Kerinci dan Taman Nasional Berbak

Untuk Kawasan Strategis Provinsi yang merupakan wilayah penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Penetapan kawasan strategis Provinsi Jambi lebih didasari oleh aspek pertumbuhan ekonomi. Adapun kawasan-kawasan strategis yang berada di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Muara Bulian - Jambi dan Sekitarnya
2. Kawasan strategis Metropolitan Jambi dan sekitarnya.
3. Kawasan strategis Pantai Timur Provinsi Jambi - Kawasan Tungkal Ulu dan sekitarnya.
4. Kawasan strategis Bungo - Tebo
5. Kawasan strategis Merangin - Sarolangun
6. Kawasan strategis Sungai Penuh dan sekitarnya

Sedangkan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi adalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Kabupaten Kerinci. Luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya didominasi oleh Hutan Produksi Tetap dan Taman Nasional. Rincian luas kawasan hutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya yang terdiri dari, Cagar Alam 4.990 Ha, Taman Nasional 657.120 Ha, Taman Hutan Raya 33.943 Ha, Taman Wisata Alam 413 Ha, Hutan Lindung 112.722 Ha, Hutan Lindung 112.722 Ha, Hutan Produksi Terbatas 264.034 Ha, Hutan Produksi Tetap 1.006.266 Ha, dan Hutan Lindung Gambut 60.810 Ha.

Di Provinsi Jambi terdapat beberapa wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah yang berpotensi terhadap bencana Geologi yaitu di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai penuh dan Kabupaten Merangin yang berupa amblasan, longsor, gempa dan ancaman letusan gunung berapi. Bencana banjir yaitu di Kabupaten Batang Hari dan beberapa kabupaten lainnya yang merupakan kejadian rutin di setiap musim hujan. Selain itu, Provinsi Jambi juga termasuk daerah yang memiliki titik api akibat dari kebakaran lahan dengan wilayah terjadinya kebakaran yang berada pada Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Tanjung Jabung Barat. Kebakaran ini disebabkan oleh adanya pembukaan lahan baru yang sangat berkaitan dengan lahan-lahan perkebunan baik milik masyarakat maupun perkebunan swasta.

1.3.4. Kondisi Demografi

1.3.4.1. Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Jambi berdasarkan Jambi Berita Resmi Statistik Tahun 2020 yang dirilis oleh BPS adalah sebanyak 3.677.894 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata sebesar 72,26 jiwa/km² (18,720/sq mi) dengan kepadatan tertinggi berada di Kota Jambi sebesar 2.976,40 jiwa/km² disusul Kota Sungai Penuh sebesar 234,33 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi tahun 2010-2020 adalah sebesar 1,34 persen dengan pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Muaro Jambi sebesar 2,83 persen dan terendah di Kabupaten Kerinci sebesar 0,45 persen.

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

| No | Kabupaten / Kota | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | Kerinci | 235.800 | 236.782 | 237.791 | 238.700 | 239 606 |
| 2 | Merangin | 372.200 | 377.905 | 383.480 | 388.900 | 394 174 |
| 3 | Sarolangun | 284.200 | 290.231 | 295.985 | 301.900 | 307 585 |
| 4 | Batang Hari | 263.900 | 266.971 | 269.966 | 272.900 | 275 504 |
| 5 | Muaro Jambi | 410.340 | 421.179 | 432.305 | 443.400 | 454 524 |
| 6 | Tanjab Timur | 215.320 | 216.777 | 218.413 | 220.000 | 221 619 |
| 7 | Tanjab Barat | 316.810 | 322.527 | 328.343 | 333.900 | 339 286 |
| 8 | Tebo | 337.020 | 343.003 | 348.760 | 354.500 | 360 193 |
| 9 | Bungo | 351.880 | 359.590 | 367.182 | 374.800 | 382 311 |
| 10 | Kota Jambi | 583.490 | 591.134 | 598.103 | 604.700 | 611 353 |
| 11 | Sungai Penuh | 87,970 | 88.918 | 89.944 | 90.900 | 91 739 |
| Provinsi Jambi | | 3,402,052 | 3.515.017 | 3.570.272 | 3.624.600 | 3 677 894 |

Sumber : JDA 2021

Dilihat dari posisi kewilayahan barat dan timur, maka persentase distribusi penduduk di kedua wilayah tersebut terlihat relatif seimbang, yaitu 51,73 persen untuk wilayah timur (Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi), dan 48,27 persen untuk wilayah barat (Kerinci, Sungai Penuh, Merangin, Sarolangun, Bungo dan Tebo).

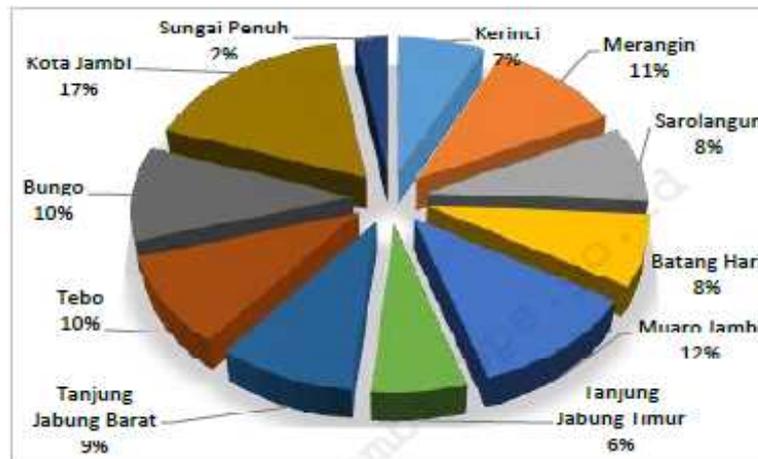
Kepadatan penduduk tahun 2020 menurut Kabupaten/Kota :

Tabel 1.2. Kepadatan Penduduk di Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota

| No | Kabupaten/Kota | Kepadatan Penduduk |
|----|----------------|--------------------|
| 1 | Kerinci | 75 |
| 2 | Merangin | 46 |
| 3 | Sarolangun | 47 |
| 4 | Batang Hari | 52 |
| 5 | Muaro Jambi | 75 |
| 6 | Tanjab Timur | 42 |
| 7 | Tanjab Barat | 68 |
| 8 | Tebo | 52 |
| 9 | Bungo | 78 |
| 10 | Kota Jambi | 2.951 |
| 11 | Sungai Penuh | 247 |

Sumber : Jambi Dalam Angka 2021

Gambar 1.5. Proporsi Kepadatan Penduduk per Kabupaten/Kota



1.4. Potensi Unggulan Daerah

Provinsi Jambi terletak di tengah Pulau Sumatera merupakan salah satu Provinsi yang mempunyai potensi sumberdaya alam yang melimpah. Sumberdaya alam yang mempunyai potensi cukup besar tersebut antara lain; perkebunan, pertanian tanaman pangan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Untuk sektor bahan pertambangan dan penggalian yang menjadi potensi unggulan daerah adalah batu bara, gas bumi, minyak, tambang mineral lainnya. Sedangkan potensi industri pengolahan di Provinsi Jambi yang potensial untuk dikembangkan terutama untuk pengolahan dengan bahan baku (*crude palm oil*), *crumb rubber*, *virgin coconut oil (vico)*, *cassia vera*, serta olahan dari produk tanaman pangan dan produk dari ikan.

Bila dilihat dari Komoditi unggulan Provinsi Jambi, maka terdapat 12 komoditi unggulan yang didominasi dari berbagai sub-sektor pertanian antara lain: Karet, Kelapa sawit, Kelapa dalam, Cassievera, Kopi, Buah-buahan, Pinang, Nenas, Perikanan Laut dan darat dan Peternakan serta hasil pertambangan umum lainnya.

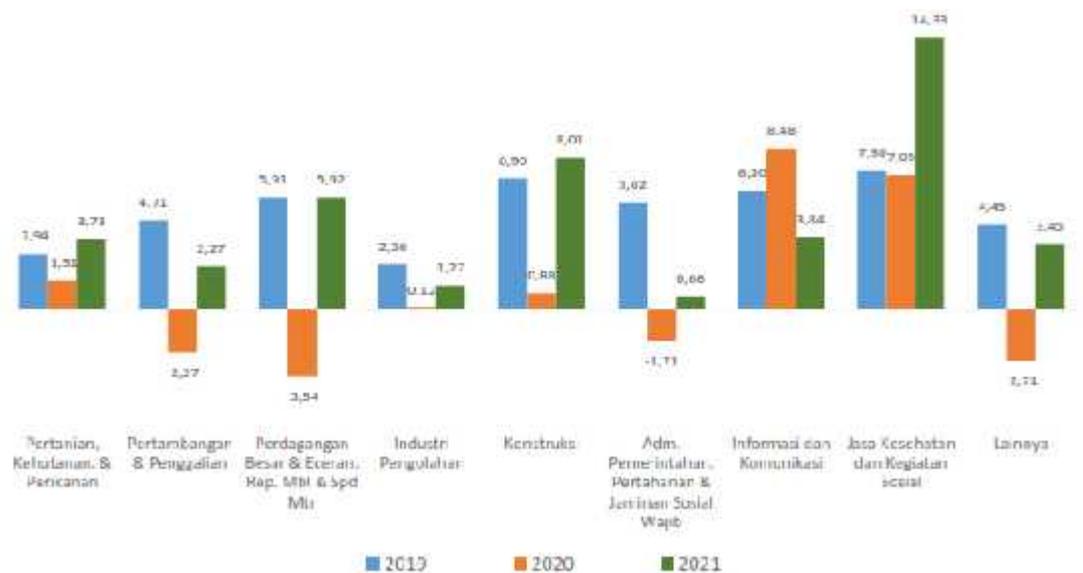
1.5. Kondisi Ekonomi Daerah

1.5.1. Pertumbuhan PDRB

Ekonomi Provinsi Jambi tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,66 persen (c-to-c). Seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 14,33 persen. Tingginya pertumbuhan lapangan usaha tersebut didorong oleh penanggulangan pandemic serta pelaksanaan vaksinasi covid-19. Lapangan usaha berikutnya yang tumbuh tinggi adalah Konstruksi sebesar 8,01 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,08 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,92 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 5,36 persen; serta Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 5,13 persen. Lapangan usaha lainnya tumbuh di bawah 5 persen.

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 31,56 persen; diikuti oleh Pertambangan dan Penggalian sebesar 14,09 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,58 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 10,25 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Provinsi Jambi hampir mencapai 70 persen.

Grafik 1.1. Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (c-to-c) (persen)



Ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2021 dibanding triwulan IV-2020 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 3,62 persen. Hampir semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif kecuali Industri Pengolahan dan Jasa Keuangan dan Asuransi yang terkontraksi masing-masing sebesar 2,23 persen dan 2,31 persen. Lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 20,76 persen; diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 13,55 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda sebesar 11,30 persen. Lapangan usaha lainnya tumbuh di bawah 10 persen.

Jika dibandingkan ekonomi Provinsi Jambi triwulan IV-2021 dengan triwulan III-2021 (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar 0,37 persen. Lapangan Usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan adalah Pertambangan dan Penggalian terkontraksi sebesar 5,07 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,70 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 4,00; Industri Pengolahan sebesar 2,93 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,41 persen.

Di sisi lain, beberapa lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan, diantaranya Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 27,97 persen; Penyediaan Akomodasi Makan Minum sebesar 13,50 persen; serta Konstruksi tumbuh 11,66 persen. Peningkatan realisasi belanja pegawai dan belanja modal pada triwulan IV tahun 2021 menjadikan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebagai lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi secara q-to-q.

Ekonomi Provinsi Jambi tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,66 persen (c-to-c). Pertumbuhan terjadi pada semua komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 9,27 persen; diikuti Ekspor Barang dan Jasa sebesar 3,62 persen; Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 3,40 persen; Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 1,94 persen; dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 0,27 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan sebesar 7,10 persen. Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa (65,84 persen) namun terkoreksi Komponen Impor Barang dan Jasa (41,35 persen). Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB adalah Komponen PK-RT yang mencapai hampir separuh PDRB Provinsi Jambi yaitu sebesar 44,02 persen dan diikuti oleh Komponen PMTB sebesar 21,89 persen. Komponen PK-P memiliki andil sebesar 7,86 persen. Sedangkan peranan Komponen PK-LNPRT dan Perubahan Inventori relatif kecil, yaitu masing-masing sebesar 1,17 persen dan 0,57 persen.

Grafik 1. ... Pertumbuhan PDRB Beberapa Komponen Pengeluaran (c-to-c) (persen)



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2021

Ekonomi Provinsi Jambi pada triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 (y-on-y) tumbuh sebesar 3,62 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen pengeluaran, kecuali Komponen PK-P yang berkontraksi sebesar 3,55 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen PK-RT sebesar 5,15 persen; diikuti oleh Komponen PK-LNPRT serta Ekspor Barang dan Jasa keduanya tumbuh sebesar 4,72 persen. Komponen PMTB mengalami pertumbuhan sebesar 4,19 persen, sementara itu Komponen Impor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 0,63 persen.

Setelah setahun lebih pandemi COVID-19 melanda Indonesia, perbaikan perekonomian mulai terjadi di semua provinsi dengan level pertumbuhan yang berbeda-beda termasuk di Sumatera. Pada tahun 2021, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami pertumbuhan (c-to-c) tertinggi, yaitu sebesar 5,05 persen, diikuti Provinsi Jambi sebesar 3,66 persen serta Provinsi Sumatera Selatan tumbuh sebesar 3,58 persen. Sementara itu, provinsi lainnya berada pada pertumbuhan di bawah 3,5 persen.

Secara spasial, struktur perekonomian Sumatera pada tahun 2021 masih didominasi oleh provinsi lumbung energi. Tiga Provinsi dengan kontribusi terbesar adalah Provinsi Sumatera Utara dengan kontribusi sebesar 23,37 persen, Provinsi Riau sebesar 22,92 persen, dan Sumatera Selatan sebesar 13,36 persen. Provinsi Jambi bila dilihat dari distribusinya terhadap PDRB Sumatera berada pada peringkat tujuh dengan share sebesar 6,35 persen.

Gambar 1. ... Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Menurut Provinsi di Sumatera (persen)



Sumber : BRS BPS 2021 (2022)

1.5.2. Inflasi

Pada November 2021, Kota Jambi mengalami inflasi sebesar 0,49 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,48, dan Kota Muara Bungo inflasi sebesar 0,60 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,21. Inflasi Kota Jambi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks pada enam kelompok pengeluaran. Sedangkan inflasi Kota Muara Bungo terjadi karena adanya kenaikan indeks pada empat kelompok pengeluaran barang dan jasa. Laju inflasi tahun kalender dan year on year Kota Jambi pada bulan ini masing-masing sebesar 1,18 persen dan 1,91 persen. Sedangkan laju inflasi tahun kalender dan year on year Kota Muara Bungo masing-masing sebesar 1,20 persen dan 1,77 persen.



Dari 24 kota IHK di Sumatera, seluruhnya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi se-Sumatera terjadi di Kota Banda Aceh sebesar 0,87 persen dan terendah di Kota Lubuk Linggau sebesar 0,29 persen. Dari 90 kota IHK se-Indonesia, sebanyak 84 kota mengalami inflasi, dan enam kota deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Sintang sebesar 2,01 persen dan terendah di Kota Bima dan Kota Pontianak masing-masing sebesar 0,02 persen. Sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Kota Kotamobagu sebesar 0,53 persen dan terendah di Kota Tual sebesar 0,16 persen.

Indeks Harga Konsumen/Inflasi Kota Jambi dan Kota Muara Bungo menurut Kelompok Pengeluaran

Tabel 1.3. Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi Kota Jambi Bulan November 2021, Inflasi Tahun Kalender 2021, dan Tahun ke Tahun menurut Kelompok Pengeluaran COICOP (2018=100)

| Kelompok Pengeluaran | IHK November 2021 | Tingkat Inflasi November 2021 (%) | Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2021 (%) | Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun (%) | Andil Inflasi November 2021 (%) |
|--|-------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Utum (Headline) | 107,48 | 0,49 | 1,18 | 1,91 | 0,4900 |
| Makanan, Minuman, dan Tembakau | 110,01 | 1,16 | 2,33 | 1,71 | 0,3530 |
| Pakaian dan Alat Kald | 104,65 | 0,00 | 0,63 | 0,64 | 0,0000 |
| Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga | 106,16 | 0,38 | 1,68 | 1,66 | 0,0703 |
| Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga | 108,88 | 0,34 | 1,19 | 1,23 | 0,0204 |
| Kesehatan | 112,13 | -0,20 | 0,30 | 0,30 | -0,0037 |
| Transportasi | 104,01 | 0,15 | -0,28 | 0,18 | 0,0176 |
| Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan | 101,36 | 0,04 | 1,10 | 1,30 | 0,0020 |
| Rekreasi, Olahraga, dan Budaya | 122,50 | 0,00 | 2,30 | 2,30 | 0,0000 |
| Pendidikan | 104,83 | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,0000 |
| Penyelesaian Makanan dan Minuman/ Restoran | 105,36 | 0,00 | 0,67 | 0,67 | 0,0000 |
| Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya | 111,77 | 0,53 | 0,38 | 0,11 | 0,0329 |

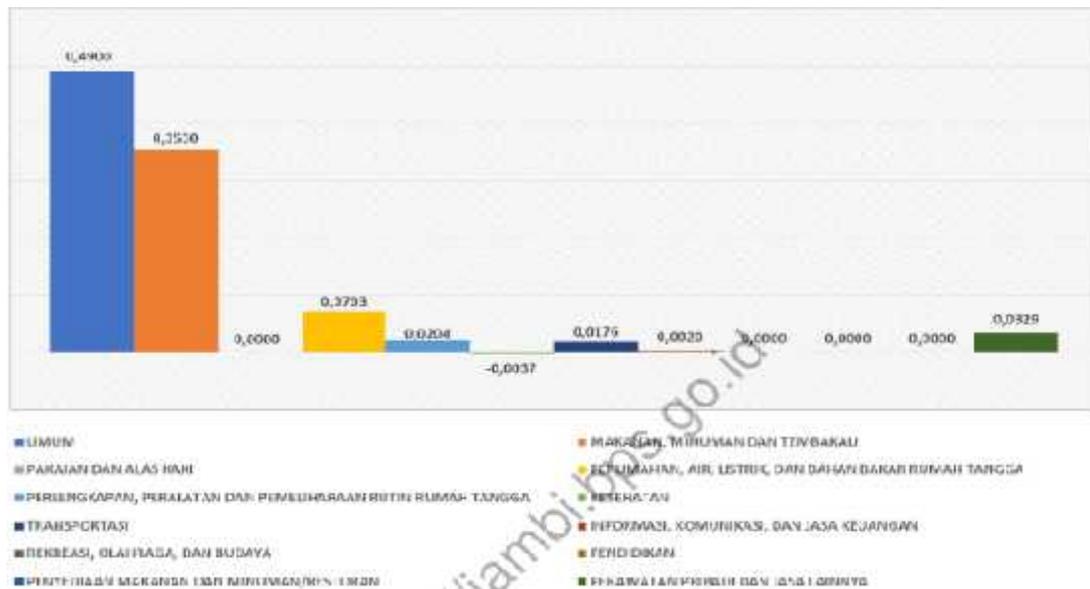
Sumber : Survei Harga Konsumen Kota Jambi, BPS, 2021

Pada November 2021, Kota Jambi mengalami inflasi sebesar 0,49 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,48. Sedangkan Kota Muara Bungo mengalami inflasi sebesar 0,60 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,21. Laju inflasi tahun kalender Kota Jambi sebesar 1,18 persen dan Kota Muara Bungo sebesar 1,20 persen. Sedangkan inflasi year on year Kota Jambi sebesar 1,91 persen dan Kota Muara Bungo sebesar 1,77 persen.

Inflasi Kota Jambi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks pada enam kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 1,16 persen; kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,38 persen; kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,34 persen; kelompok Transportasi sebesar 0,15 persen; kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,04 persen; serta kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,53 persen.

Dalam pembentukan inflasi Kota Jambi sebesar 0,49 persen, andil terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,3530 persen. Komoditas utama yang memberikan andil terhadap terjadinya inflasi Kota Jambi bulan November 2021 antara lain: cabai merah, minyak goreng, udang basah, ikan gabus, kangkung, emas perhiasaan, tukang bukan mandor, cabai hijau, semen, dan pipa.

Gambar 1.7. Sumbangan Kelompok Pengeluaran terhadap Inflasi Kota Jambi, November 2021 (2018=100)



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2021

Inflasi Kota Muara Bungo terjadi pada empat kelompok pengeluaran karena adanya kenaikan indeks harga, yaitu pada kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 1,74 persen; kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,13 persen; kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,04 persen; serta kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,73 persen. Komoditas utama yang memberikan andil terhadap terjadinya inflasi Kota Muara Bungo adalah cabai merah, minyak goreng, kopi bubuk, emas perhiasaan, telur ayam ras, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, shampo, rokok kretek filter, daging ayam ras, dan semen.

Tabel 1.4. Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi Kota Muara Bungo Bulan November 2021, Inflasi Tahun Kalender 2021, dan Tahun ke Tahun menurut Kelompok Pengeluaran COICOP (2018=100)

| Kelompok Pengeluaran | IHK November 2021 | Tingkat Inflasi November 2021 (%) | Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2021 (%) | Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun (%) | Andil Inflasi November 2021 (%) |
|---|-------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Umum (Headline) | 107,21 | 0,60 | 1,20 | 1,77 | 0,6000 |
| Makanan, Minuman, dan Tembakau | 109,59 | 1,74 | 0,90 | 2,86 | 0,5387 |
| Pakaian dan Alas Kaki | 110,01 | 0,00 | 1,58 | 1,91 | 0,0000 |
| Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga | 102,62 | 0,13 | 1,43 | 1,47 | 0,0236 |
| Perengkapan, Peralatan, dan Perbaikan Rumah Tangga | 108,62 | -0,03 | 3,59 | 3,67 | -0,0012 |
| Kesehatan | 105,60 | -0,09 | 1,65 | 1,63 | -0,0017 |
| Transportasi | 104,48 | 0,02 | 1,17 | 1,22 | 0,0025 |
| Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan | 103,21 | 0,04 | 0,86 | 0,98 | 0,0022 |
| Rekreasi, Olahraga, dan Budaya | 106,90 | 0,00 | 0,39 | 0,39 | 0,0000 |
| Pendidikan | 103,16 | 0,00 | 0,41 | 0,41 | 0,0000 |
| Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran | 105,43 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,0000 |
| Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya | 119,26 | 0,73 | 1,32 | -0,06 | 0,0401 |

Sumber: Survei Harga Konsumen Kota Muara Bungo, BPS

Selanjutnya, inflasi Provinsi Jambi pada triwulan IV 2021 tumbuh melambat dibanding triwulan sebelumnya. pertumbuhan inflasi terutama dipengaruhi oleh tingginya permintaan barang dan jasa seiring membaiknya kondisi perekonomian nasional dan global dan meningkatnya keyakinan masyarakat seiring sentimen positif terhadap program vaksinasi COVID-19. Inflasi keseluruhan tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Kondisi ini utamanya disebabkan oleh meningkatnya tekanan inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi bahan pangan terutama meningkat tajam pada triwulan IV 2021 akibat potensi cuaca yang kurang kondusif dan pemangkasan produksi oleh produsen untuk menghindari kerugian, namun disisi lain permintaan meningkat karena momentum HBKN dan Tahun Baru 2022.

1.5.3. Profil Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari tingkat kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Berdasarkan Berita Resmi yang diekspos BPS, Angka kemiskinan Provinsi Jambi tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020 yakni sebesar 7,67% pada periode September 2021. Ditinjau dari sisi penyebab kemiskinan, sumbangan penyebab garis kemiskinan sangat dipengaruhi dari faktor makanan. Untuk periode September 2021 ini, faktor makanan berperan 76,10% terhadap kemiskinan, sementara sisanya 23,90% dari non makanan.

Jika dibandingkan tingkat kemiskinan regional Sumatera, Provinsi Jambi masih menempati peringkat 5 dari 10 Provinsi di Sumatera dimana rata-rata tingkat kemiskinan Regional Sumatera adalah 9,82%. Dengan kata lain, tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi masih cukup rendah dan berada di bawah rata-rata Regional Sumatera. Sedangkan jika dibandingkan secara Nasional, Provinsi Jambi juga masih cukup baik dengan tingkat kemiskinan di bawah rata-rata Nasional yang memiliki tingkat kemiskinan sebesar 9,71%.

Dalam 10 tahun terakhir, tingkat kemiskinan Provinsi Jambi selalu berada pada rentang 7% - 9%. Stagnasi tingkat kemiskinan ini disebabkan masih kurangnya edukasi bisnis dan inklusi keuangan masyarakat sehingga program-program yang dijalankan Pemerintah juga belum banyak membuahkan hasil.

Selain itu, rendahnya tingkat edukasi bisnis dan tata niaga juga turut mempengaruhi stagnasi ini sehingga kondisi usaha ataupun produksi hanya tergantung bagaimana harga dipasaran tanpa adanya kemampuan untuk melakukan intervensi ataupun strategi mitigasi mengenai apa yang harus dilakukan ketika kondisi pasar berubah.

Pandemi Covid-19 menyebabkan angka kemiskinan di Provinsi Jambi meningkat. Per September 2021, jumlah penduduk miskin di provinsi tersebut mencapai 279,86 ribu jiwa atau 7,6% dari total penduduk. Angka kemiskinan tersebut menurun sekitar 14 ribu jiwa dibandingkan periode Maret 2021 jumlah penduduk miskin di Jambi sebanyak 293,86 ribu jiwa atau 8,07%.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mencatat jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Jambi pada bulan September 2021 mencapai 279,86 ribu orang (7,6 persen) atau berkurang sebanyak 14 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2021 yang sebesar 293,860 ribu orang (8,07 persen). Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2021, maka selama enam bulan tersebut terjadi pengurangan jumlah penduduk miskin sebanyak 14 ribu orang.

1.6. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan suatu wilayah dimasa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Isu – isu strategis yang menjadi perhatian Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Tata kelola pemerintahan masih memerlukan perbaikan terutama dalam hal akuntabilitas dan pelayanan publik. Hal ini berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah yang belum berjalan efektif sehingga masih terjadi penyalahgunaan keuangan daerah dalam bentuk tindak pidana korupsi. Selain itu, *e- government system* belum optimal dan inovasi dalam penggalian sumber-sumber pendapatan daerah menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pendapatan asli daerah dan masih lambatnya birokrasi serta rendahnya kualitas pelayanan publik.
2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) belum sesuai dengan kebutuhan pasar dan belum mendukung pembangunan di Provinsi Jambi. Belum meratanya akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas menjadi salah satu penyebab kualitas SDM belum memiliki daya saing sesuai harapan. Disamping itu, mulai lunturnya nilai – nilai luhur agama dan budaya juga berimplikasi pada minimnya SDM yang berkarakter dan berdaya saing Perbaikan karakter SDM sekaligus dapat mendukung upaya pemerintah pusat melalui gerakan revolusi mental.
3. Predikat Provinsi Jambi sebagai salah satu daerah yang aman di Indonesia merupakan salah satu hal positif yang harus dipertahankan. Situasi daerah yang kondusif akan menjadi salah satu modal penciptaan iklim investasi di Provinsi Jambi.
4. Pengelolaan sumberdaya alam (SDA) berwawasan lingkungan belum optimal. Kurang optimalnya pengelolaan SDA tersebut disebabkan oleh kurangnya sentuhan IPTEK dan inovasi, sehingga nilai tambah produk unggulan daerah tidak didapatkan oleh Provinsi Jambi. Demikian pula dengan eksplorasi sumberdaya alam yang hanya berorientasi pada profit tanpa mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan.

5. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur umum masih kurang memadai dalam mendukung pengembangan wilayah.
6. Adanya kesenjangan ekonomi ditandai angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin.
7. Kondisi perekonomian global yang berfluktuatif berdampak terhadap harga komoditi unggulan Provinsi Jambi seperti Migas, Batubara, Crude Palm Oil (CPO), Karet dan kelapa dalam. Kondisi ini berdampak pada pendapatan masyarakat yang sekitar 65 persen berada disektor pertanian dan perkebunan yang pada gilirannya berdampak pada daya beli masyarakat.
8. Isu dunia yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan iklim terkait program Pengurangan Emisi Karbon akibat Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan serta SDGs. Dalam hal pengurangan emisi, Provinsi Jambi berpotensi menjadi daerah yang potensial untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Sebagai jantung pulau Sumatera, posisi hutan Jambi sangat strategis sebagai rumah terakhir bagi keanekaragaman hayati Sumatera. Dengan memiliki 4 Taman Nasional (TNKS, TNBT, TNBD dan TNB) dapat dipastikan Provinsi Jambi merupakan benteng terakhir dari habitat bermacam satwa liar, seperti Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatraensis*), Gajah Sumatera (*Elephas maximus*) dan lainnya yang terus menurun drastis akibat perburuan dan penyempitan habitat. Selain itu juga sebagai rumah yang nyaman untuk flora khas seperti cendawan muka harimau (*Rafflesia haseltii*), *Rafflesia arnoldi*, *Amorphopus titanum* dan berbagai jenis kayu, perdu juga bebungaan. Demikian pula dalam hal pencapaian SDGs, Provinsi Jambi harus ikut berperan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar manusia.
9. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan energi harus didukung dengan peningkatan produksi pangan melalui perbaikan sarana prasarana pendukung dan intensifikasi serta pemberian sentuhan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi dalam pengolahan lahan pertanian serta optimalisasi penggunaan potensi energi baru dan terbarukan guna pemenuhan kebutuhan energi di Provinsi Jambi.

1.7. Inovasi Dalam Reformasi Sistem AKIP dan Pengelolaan Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Karenanya, berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah membangun sistem akuntabilitas kinerja terpadu.

Sistem akuntabilitas kinerja terpadu ini untuk memastikan sinkronisasi planning dan implementasi yang terukur dan akuntabel. Pengembangan sistem akuntabilitas terpadu ini diupayakan melalui pengembangan teknologi informasi untuk peningkatan kualitas perencanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Hal ini meliputi pengembangan e-Planning untuk perencanaan, dan pengembangan sistem aplikasi untuk monitoring dan evaluasi yang mengintegrasikan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK), Monev APBD dan E-sakip. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jambi juga melakukan rangkaian inovasi untuk peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, termasuk pengembangan sistem tunjangan kinerja pegawai bagi aparatur di jajaran Pemerintah Provinsi Jambi.

Untuk peningkatan monitoring dan evaluasi pembangunan, Pemerintah Provinsi Jambi mengembangkan aplikasi LPPK, Web Monev dan e-SAKIP. Program aplikasi LPPK adalah instrumen yang digunakan oleh SKPD untuk menuangkan detail pelaksanaan kegiatan dalam waktu dengan memberikan target progres capaian fisik dan keuangan pada tahapan waktunya. Webmonev merupakan aplikasi untuk melaporkan realisasi progres pelaksanaan kegiatan. Data yang dihasilkan dalam LPPK telah diintegrasikan dengan Webmonev dalam bentuk database nama program dan kegiatan serta target fisik dan keuangan. Penggunaan LPPK dan Webmonev dalam rangka mendukung pelaksanaan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. Selanjutnya, aplikasi e-Sakip merupakan aplikasi yang dibangun untuk melakukan evaluasi atas sejauh mana tingkat pencapaian target kinerja baik di tingkat provinsi maupun di level SKPD, sistem aplikasi berbasis teknologi informasi ini bisa diakses di sakip.jambiprov.go.id.

1.8. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja (LKj)

Sistematika penyajian LKj Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, sejarah pemerintah Provinsi Jambi, kondisi geografis, data demografi dan kondisi ekonomi daerah. Bab ini juga berisi penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Memuat Pengelolaan Kinerja Daerah, Rencana Strategis Daerah, Tema Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 2021, dan Perjanjian Kinerja tahun 2021. Bab ini juga berisi Program-program untuk Pencapaian IKU 2021.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi

Berisi penjelasan singkat tentang capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jambi untuk setiap pernyataan kinerja, capaian IKU tahun 2021, juga Evaluasi dan Analisis Capaian IKU 2021 yang diuraikan per sasaran dan IKU. Selain itu, bab ini juga berisikan program/kegiatan yang menunjang capaian Kinerja serta capaian Kinerja Keuangan Daerah.

Bab IV : Penutup

Berisi ringkasan dan kesimpulan terkait pencapaian kinerja, dan pemanfaatannya untuk umpan balik dalam perencanaan pembangunan daerah pada masa yang akan datang.



BAB II
PERENCANAAN &
PERJANJIAN
KINERJA

SEPUCUK JAMBI SEMBILAN LURAH



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1. Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan rencana strategis daerah untuk periode 5 tahun. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2016–2021, yaitu :

“Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera”

JAMBI TUNTAS 2021

Tertib : diartikan sebagai wujud tata kelola pemerintah Provinsi Jambi yang menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan harmonis yang tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di

berbagai bidang, birokrasi pemerintahan yang professional dan berkinerja tinggi, adanya jaminan kepastian hukum, serta terjadi harmonisasi antar tingkatan pemerintahan dari pusat sampai desa.

Unggul : Menggambarkan kualitas Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi yang berdaya saing dan mampu menjadi modal sosial bagi perwujudan perekonomian Provinsi Jambi yang berdaya saing.

Nyaman : Keadaan yang menggambarkan kehidupan masyarakat di Provinsi Jambi yang hidup dalam suasana aman, tenteram, damai, saling menghargai dan bertoleransi tinggi antar Suku, Agama dan Ras dilandasi supremasi hukum sehingga dapat mendorong iklim investasi dan berusaha yang kondusif.

Tangguh : Menggambarkan kemandirian ekonomi masyarakat yang mampu bertahan terhadap guncangan ekonomi global dan mampu bersaing secara global, berkembangnya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN) serta pembangunan yang berwawasan lingkungan

Adil : mengartikan perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu, golongan maupun antar wilayah, sehingga hasil dari pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat

Sejahtera : mengandung makna bahwa kondisi semua lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dibidang sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. **Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik**, yaitu menerapkan prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kuantitas aparatur pemerintahan yang profesional, berkinerja tinggi dan berorientasi melayani masyarakat.
2. **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender**, yaitu membangun sumber daya manusia yang berdaya saing, ditandai oleh penduduk laki-laki dan perempuan yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat masyarakat kesehatan yang lebih baik serta adil dalam kerangka masyarakat yang berbudaya dan agamis.
3. **Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat**, yaitu melakukan langkah-langkah antisipasi dini dan pencegahan terhadap potensi konflik yang muncul dengan menerapkan kepastian hukum sehingga suasana aman, tenteram dan kondusif.
4. **Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu Pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan**, yaitu meningkatkan nilai tambah produk – produk unggulan daerah dengan memanfaatkan IPTEKIN yang ramah lingkungan.
5. **Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan**, yaitu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar serta mengoptimalkan potensi sumber energi terbarukan untuk pemerataan akses energi wilayah sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mobilitas penduduk antar wilayah.
6. **Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat**, yaitu meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap kehidupan yang lebih baik.

2.1.2. Tujuan , Sasaran, Indikator Kinerja

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan adalah :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
3. Meningkatkan kualitas SDM perempuan dan SDM yang berbudaya dan agamis.
4. Mewujudkan ketertiban umum daerah.
5. Meningkatkan daya saing daerah berbasis IPTEKIN.
6. Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian tanaman pangan.

7. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum.
8. Meningkatkan kualitas pengelolaan energi dan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
9. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan tujuan, maka sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan pada instansi/ lembaga pemerintah daerah yang melayani publik.
3. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.
4. Meningkatnya kualitas pendidikan menengah.
5. Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan.
6. Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembangan seni dan budaya.
7. Meningkatnya harmonisasi kehidupan umat beragama.
8. Meningkatnya stabilitas ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan hukum.
9. Meningkatnya stabilitas demokrasi di daerah.
10. Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP).
11. Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah.
12. Meningkatnya ketahanan pangan.
13. Meningkatnya indeks pertanaman pada lahan tanaman pangan.
14. Terciptanya akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian.
15. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik.
16. Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi.
17. Meningkatnya pengelolaan SDA dan bahan tambang dengan dampak lingkungan yang minimal.
18. Meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi.
19. Menurunnya angka kemiskinan.
20. Menurunnya angka pengangguran.
21. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

| No | Misi | Tujuan | Indikator Kinerja | Sasaran | Indikator Kinerja |
|---|--|---|---|--|---|
| 1 | MISI 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik | Mewujud-kan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas | Indeks Reformasi Birokrasi (Kondisi awal "CC", dan target capaian akhir "B") | Meningkat-nya transparan-si dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan daerah yang efisien | Nilai SAKIP |
| | | | | | Hasil audit BPK terhadap laporan keuangan |
| | | | | | Efisiensi pengelolaan Keuangan daerah |
| | | | | Meningkat-nya kualitas pelayanan pada instansi/lembaga pemerintah daerah yang melayani publik | IKM |
| 2 | MISI 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender. | Meningkat-kan kualitas sumberdaya manusia melalui peningka-tan kualitas pendidikan dan kesehatan | Indeks Pembangunan Manusia (kondisi awal 68,24 dan target capaian akhir 71,8) | Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat | Usia Harapan Hidup |
| | | | | | Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran) |
| | | | | | Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran hidup) |
| | | | | | Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita (persen) |
| | | Meningkatnya kualitas Pendidikan Menengah | Angka Melanjut-kan ke PT Akreditasi B | | |
| | | | Tingkat kelulusan SMA dan SMK | | |
| Meningkatkan kualitas SDM perempuan dan SDM yang berbudaya dan agamis | 1. Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender (IKKG) (kondisi awal 0,809 dan target capaian akhir 0,815) | Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan | IDG | | |

| No | Misi | Tujuan | Indikator Kinerja | Sasaran | Indikator Kinerja |
|----|--|--|---|---|---|
| | | | 2. Indeks kebebasan dari diskriminasi (kondisi awal 96,7 dan target capaian akhir 100) | Meningkat-nya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam pengembang-an seni dan budaya | HAKI (Hak Atas kekayaan Intelektual) Karya Seni |
| | | | | Meningkat-nya harmonisasi kehidupan umat beragama | Indeks Kebebasan Berkeyakinan |
| 3 | MISI 3: Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat Beragama dan kesadaran hukum masyara-kat | Mewujud-kan ketertiban umum daerah | Indeks Demokrasi Indonesia (kondisi awal 70,68 dan target capaian akhir 79,0) | Meningkat-nya stabilitas tibumtranmas dan hukum | Indeks Aspek Kebebasan Sipil |
| | | | | Meningkatnya stabilitas demokrasi di daerah | Indeks Aspek Lembaga Demokrasi |
| 4 | MISI 4 : Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyat-an yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan , teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan | Meningkatkan daya saing daerah berbasis IPTEKIN | Nilai Daya Saing (ACI) (Kondisi awal - 0,7379 dan target capaian akhir sebesar 0,1) | Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP) | Total Factor Productivity (TFP) |
| | | | | Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah | Persentase share sektor Sekunder terhadap PDRB |
| | | | | Meningkat-nya ketahanan pangan | Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari) |
| | | | | Meningkatnya Indeks Pertanaman pada lahan Tanaman Pangan | Persentase Peningkatan luas lahan dengan Indeks Pertanaman: - IP 200 - IP 300 |
| 5 | MISI 5 : Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan | Meningkat-kan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum serta pengelolaan energi | Nilai Komponen daya saing infrastruktur dan kualitas hidup (ACI) (Kondisi awal sebesar - 0,3915 dan target akhir sebesar 0,1) | Terciptanya akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian | Persentase jalan provinsi menuju sentra produksi kondisi mantap |
| | | | | | Jalan Provinsi dalam kondisi mantap |
| | | | | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik | Rasio Elektrifikasi |

| No | Misi | Tujuan | Indikator Kinerja | Sasaran | Indikator Kinerja |
|----|--|--|---|--|--|
| | | | | Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik |
| | | Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Kondisi awal sebesar 52,72 dan target capaian akhir sebesar 66,0) | Meningkatnya pengelolaan SDA dan bahan tambang dengan dampak lingkungan yang minimal | <p>persentase peningkatan pemanfaatan energi terbarukan</p> <p>Persentase Perusahaan minerba yang menerapkan > 75% syarat <i>good mining practise</i></p> <p>persentase perusahaan proper hijau</p> <p>Persentase peningkatan industri ekowisata</p> <p>Persentase pengelolaan hutan yang lestari</p> |
| | | | | Meningkatnya kualitas pengelolaan DAS dan meningkatnya luasan tutupan lahan di Provinsi Jambi | <p>Persentase penurunan luas kawasan hutan dan lahan terbakar</p> <p>persentase penurunan luas lahan kritis</p> |
| 6 | MISI 6 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat | Meningkatkan kualitas hidup masyarakat | Indeks kebahagiaan (Kondisi awal 71,1 dan target capaian akhir sebesar 72,5) | <p>Menurunnya angka kemiskinan</p> <p>Menurunnya angka pengangguran</p> <p>Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk</p> | <p>Angka Kemiskinan</p> <p>Tingkat pengangguran Terbuka</p> <p>Laju Pertumbuhan Penduduk</p> |

Dari indikator-indikator kinerja tersebut dipilih 15 indikator kinerja utama yang selanjutnya ditetapkan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama

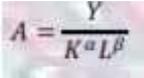
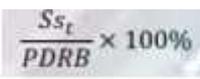
| No | Sasaran Strategis | IKU | Formulasi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|--|-----|-----------------|----------------|----|---------------------|-----|----|---------------------------------------|-----|----|-----------------------------------|-----|----|----------------------|-----|----|-------------------------------|------|----|-------------------------|-----|----|----------------------|------|----|---------------------------------------|-----|---------------|--|-----------|-----|-----------------|----------------|----|--|------|----|--------------------------------------|------|----|---------------------------|------|---------------|--|-------------|
| MISI 1: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas | Indeks Reformasi Birokrasi | <p>a. Pengukuran dibagi ke dalam dua komponen, yaitu komponen pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit adalah pengukuran terhadap seluruh upaya perbaikan tata kelola pemerintah yang dilakukan oleh pihak internal instansi pemerintah agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif, efisien, akuntabel, dan bebas KKN. Komponen hasil adalah pengukuran terhadap kapasitas dan akuntabilitas, integritas (bersih dan bebas KKN), dan kepuasan pengguna layanan; dan</p> <p>b. Bobot Pengukuran diberikan 60% untuk Komponen Pengungkit dan 40% untuk Komponen Hasil. Unsur yang diukur dalam komponen Pengungkit adalah sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Unsur Penilaian</th> <th>Nilai Maksimal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Manajemen Perubahan</td> <td>5,0</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Penataan Peraturan Perundang-undangan</td> <td>5,0</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Penataan dan Penguatan organisasi</td> <td>6,0</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Penataan Tatalaksana</td> <td>5,0</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Penataan Sistem Manajemen SDM</td> <td>15,0</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Penguatan Akuntabilitas</td> <td>6,0</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Penguatan Pengawasan</td> <td>12,0</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</td> <td>6,0</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">JUMLAH</td> <td style="text-align: center;">60</td> </tr> </tbody> </table> <p>Unsur yang diukur dalam Komponen Hasil adalah sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Unsur Penilaian</th> <th>Nilai Maksimal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi</td> <td>20,0</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pemerintah yang bersih dan bebas KKN</td> <td>10,0</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kualitas Pelayanan Publik</td> <td>10,0</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">JUMLAH</td> <td style="text-align: center;">40,0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Metode pengukuran/penilaian adalah dengan <i>self assessment</i> (penilaian mandiri) yang dievaluasi melalui wawancara, observasi langsung, pengumpulan bukti-bukti pendukung, survey internal dan eksternal.</p> | No. | Unsur Penilaian | Nilai Maksimal | 1. | Manajemen Perubahan | 5,0 | 2. | Penataan Peraturan Perundang-undangan | 5,0 | 3. | Penataan dan Penguatan organisasi | 6,0 | 4. | Penataan Tatalaksana | 5,0 | 5. | Penataan Sistem Manajemen SDM | 15,0 | 6. | Penguatan Akuntabilitas | 6,0 | 7. | Penguatan Pengawasan | 12,0 | 8. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 6,0 | JUMLAH | | 60 | No. | Unsur Penilaian | Nilai Maksimal | 1. | Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi | 20,0 | 2. | Pemerintah yang bersih dan bebas KKN | 10,0 | 3. | Kualitas Pelayanan Publik | 10,0 | JUMLAH | | 40,0 |
| No. | Unsur Penilaian | Nilai Maksimal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Manajemen Perubahan | 5,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Penataan Peraturan Perundang-undangan | 5,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Penataan dan Penguatan organisasi | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Penataan Tatalaksana | 5,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Penataan Sistem Manajemen SDM | 15,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Penguatan Akuntabilitas | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Penguatan Pengawasan | 12,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 6,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH | | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Unsur Penilaian | Nilai Maksimal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi | 20,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Pemerintah yang bersih dan bebas KKN | 10,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Kualitas Pelayanan Publik | 10,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUMLAH | | 40,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| MISI 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, terdidik, berbudaya, agamis, dan berkesetaraan gender | | | |
|--|--|----------------------------|---|
| 2 | Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan | Indeks Pembangunan Manusia | <p>IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup (e_0), indeks pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak.</p> $IPM = \frac{1}{3} [X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}]$ <p>dimana :</p> <p>$X_{(1)}$: Indeks harapan hidup $X_{(2)}$: Indeks pendidikan = $\frac{2}{3}$(indeks melek huruf) + $\frac{1}{3}$(indeks rata-rata lama sekolah) $X_{(3)}$: Indeks standar hidup layak</p> |
| 3 | Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan | Indeks Pemberdayaan Gender | <p>IDG merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik.</p> $IDG = \frac{(I_{par} + I_{DM} + I_{inc-dis})}{3}$ <p>Dimana: I_{par} = Indeks Keterwakilan di parlemen I_{DM} = Indeks pengambilan keputusan $I_{inc-dis}$ = Indeks distribusi pendapatan</p> |
| MISI 3: Menjaga situasi daerah yang kondusif, toleransi antar umat Beragama dan kesadaran hukum masyarakat | | | |
| 4 | Terwujudnya ketertiban umum daerah | Indeks Demokrasi Indonesia | <p>Metode pengumpulan data menerapkan metode triangulation dengan mengombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (<i>cross validate</i>) data yang didapat dengan metode yang lain.</p> <p>Terdapat 4 metode utama yang digunakan di dalam pengumpulan data penyusunan indeks ini yakni : Reviu Media (analisis isi berita surat kabar) dan Reviu Dokumen (analisis isi dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah); <i>Focus Group Discussion</i> (FGD); Wawancara Mendalam (<i>in-depth interview</i>).</p> <p>Terdapat 11 indikator yang berkontribusi pada pengukuran di tingkat indeks indikator yang membentuk indeks variabel kemudian ditimbang menggunakan penimbang indikator yang didapat melalui suatu proses terpisah yang disebut <i>Analytical Hierarchy Procedure</i> (AHP).</p> <p>Penimbang ini menentukan berapa kontribusi masing-masing indikator terhadap variabel di mana indikator tersebut menjadi salah satu komponennya. Indeks variabel kemudian menyumbang kepada indeks aspek.</p> |

Laporan Kinerja

Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021

| No | SasaranStrategis | IKU | Formulasi |
|----|------------------|-----|---|
| | | | <p>Dalam proses pembentukan skor aspek setiap variabel ditimbang menggunakan penimbang hasil AHP. Metode perhitungan salah satu aspek IDI ini melalui 4 tahap perhitungan, yakni :</p> <p>Tahap pertama yakni menghitung indeks data kuantitatif masing-masing indikator komponen penyusun IDI dari hasil koding surat kabar dan koding dokumen, dengan rumus sebagai berikut :</p> <p>Indeks (X_{ijk}) = Di mana:</p> <p>X_{ijk} : Tingkat capaian indikator komponen penyusun IDI dari aspek ke I, variabel ke j, indikator ke k. K_{ideal} : Tingkat capaian ideal yang mungkin dicapai dari indikator X_{ijk}. $X_{terburuk}$: Tingkat capaian terburuk dari indikator X_{ijk} Persamaan (1) menghasilkan nilai $0 < \text{Indeks } (X_{ijk}) < 1$; untuk memudahkan cara membaca, skala dinyatakan dalam 100 dengan cara mengalikan persamaan (1) dengan 100 sehingga menghasilkan nilai $0 < \text{Indeks } (X_{ijk}) < 100$.</p> <p>Tahap kedua, mempertimbangkan data kualitatif hasil FGD dan atau hasil wawancara mendalam pada hasil perhitungan persamaan (1) dalam skala 100. Hasil FGD dan atau wawancara mendalam dinilai 10 poin indeks.</p> <p>Nilai tersebut dapat menjadi faktor penambah atau pengurang indeks tergantung pada sifat indikator yang bersangkutan. Nilai FGD dan/atau wawancara mendalam menjadi faktor penambah apabila indikator bersifat searah dengan tingkat demokrasi, artinya semakin banyak jumlah kejadian pada suatu indikator merupakan indikasi semakin baik tingkat demokrasi.</p> <p>Salah satu ciri indikator yang bersifat searah dengan tingkat demokrasi adalah $X_{ideal} > 0$. Sebaliknya nilai FGD dan atau wawancara mendalam menjadi faktor pengurang apabila indikator bersifat berlawanan dengan tingkat demokrasi yang dicirikan dengan $X_{ideal} > 0$. Rumus penghitungan pada tahap ini yakni :</p> $I(X_{ijk}) = (\text{Indeks } (X_{ijk}) \times 100\% \pm 10)$ <p>Di mana :</p> <p>$I(X_{ijk})$: Indeks indikator komponen penyusun IDI dari aspek ke I, variabel ke j indikator ke k, setelah mempertimbangkan hasil FGD dan/atau wawancara mendalam. Tahap ketiga adalah menghitung indeks masing- masing variabel.</p> <p>Indeks variabel merupakan rata- rata tertimbang dari indeks indikator komponen variabel. Penghitungan indeks variabel dilakukan dengan rumus sebagai berikut :</p> $I(V_{ij}) = \sum = 1 P_{ijk} I(X_{ijk})$ <p>Di mana : $I(V_{ik})$: Indeks variabel ke j dari aspek ke i. P_{ijk} : Nilai penimbang dari AHP untuk indikator kompopnen penyusun IDI ke k dari variabel ke j dan aspek ke i.</p> |

| No | Sasaran Strategis | IKU | Formulasi |
|---|---|---|---|
| | | | <p>(X_{ijk}) : Indeks indikator komponen penyusun IDI ke k dari variabel ke j, aspek ke l setelah mempertimbangkan hasil FGD dan/atau wawancara mendalam.</p> <p>Tahap keempat adalah menghitung indeks aspek dengan rumus sebagai berikut :</p> $I(A_i) = \sum P_{ij} I(V_{ij})$ <p>Di mana:</p> <p>$I(A_i)$: Indeks aspek ke i.</p> <p>P_{ij} : Nilai penimbang dari AHP untuk variabel ke j dari aspek ke i.</p> <p>$I(V_{ij})$: Indeks variabel ke j dari aspek ke i.</p> |
| <p>MISI 4: Meningkatkan daya saing daerah melalui optimalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh penerapan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) berwawasan lingkungan</p> | | | |
| 5 | Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP) | Total Factor Productivity (TFP) |  <p>Dengan</p> <p>A = Total Factor Productivity</p> <p>Y = total produksi (output yang dihasilkan)</p> <p>K = input kapital</p> <p>L = input tenaga kerja</p> <p>, = konstanta (elastisitas input) dari kapital dan tenaga kerja</p> |
| 6 | Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah | Persentase <i>share</i> sektor Sekunder terhadap PDRB |  <p>dengan :</p> <p>S_{st} = besarnya <i>share</i> sektor sekunder terhadap PDRB pada tahun t</p> <p>PDRB = Total PDRB pada tahun t</p> |
| 7 | Meningkatnya ketahanan pangan | Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari) | $KSPe = \frac{KTSP}{(P \times 365 \text{ hari})} \times Kand.e$ <p>Dimana:</p> <p>KSPe = Ketersediaan Energi (Kkal/kap/hari)</p> <p>KTSP = Ketersediaan pangan untuk dikonsumsi manusia (ton/tahun)</p> <p>P = Jumlah Penduduk (jiwa)</p> <p>Kand. e = Kandungan energi</p> |

| MISI 5: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan | | | |
|---|---|---|---|
| No | Sasaran Strategis | IKU | Formulasi |
| 8 | Terciptanya akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian | Jalan Provinsi dalam kondisi mantap | <p>Jalan Prov. Dalam kondisi mantap =</p> $\frac{J_{baik} + J_{sedang}}{J} \times 100\%$ <p>Dimana: J_{baik} = Panjang Jalan provinsi dalam kondisi baik (km) J_{sedang} = Panjang Jalan provinsi dalam kondisi sedang (km) J = Total panjang jalan kewenangan Provinsi</p> |
| 9 | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik | Rasio Elektrifikasi | $\text{Rasio Elektrifikasi} = \frac{\sum RT_L}{\sum RT} \times 100\%$ <p>RT_L = Jumlah rumah tangga dengan listrik RT = Jumlah rumah tangga</p> |
| 10 | Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan | <p>Cara perhitungan:</p> <p>Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya pada periode yang sama dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> <p>Rumu :</p> $P_{AML} = \frac{J_{RTML}}{J_{RTS}} \times 100\%$ <p>Keterangan: P_{AML}: Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. J_{RTML}: Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak). J_{RTS} : Jumlah rumah tangga seluruhnya. (penduduk 40% terbawah/berpendapatan terendah).</p> |
| | | Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik | $= \frac{J_{baik}}{JI} \times 100\%$ <p>J_{baik} = panjang jaringan irigasi provinsi dalam kondisi baik (km) JI = total panjang jaringan irigasi provinsi (km)</p> |

| No | Sasaran Strategis | IKU | Formulasi |
|---|--|----------------------------------|--|
| 11 | Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | $IKLH\ Prov = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$ <p>Keterangan: IKLH Prov = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi IKA = Indeks Kualitas Air Prov IKU = Indeks Kualitas Udara Prov IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan</p> <p>Dimana:</p> $Pl_j = \sqrt{\frac{\left(\frac{Ci}{Lij}\right)_M^2 + \left(\frac{Ci}{Lij}\right)_B^2}{2}}$ <p>Keterangan: Pl_j adalah indeks pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan fungsi dari Ci/L_{ij}, dimana Ci menyatakan konsentrasi parameter kualitas air ke i dan L_{ij} menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j. Dalam hal ini peruntukan yang digunakan adalah klasifikasi baku mutu air kelas I berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 82 Tahun 2001.</p> $IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{EU} - 0,1)\right)$ <p>Keterangan : I_{EU} = Standar kualitas udara berdasarkan EU Directives, dimana I_{EU} > 1 berarti kualitas udara melebihi standar EU dan sebaliknya</p> $IKTL = 0,23\ ITH + 0,24\ IPH + 0,30\ IKT + 0,15\ IKBA + 0,08\ IKH$ <p>Keterangan : IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan ITH = Indeks Tutupan Lahan IPH = Indeks <i>Performance</i> Hutan IKT = Indeks Kondisi Tutupan Hutan IKBA = Indeks Konservasi Badan Air IKH = Indeks Kondisi Habitat</p> |
| <p>MISI 6: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat</p> | | | |
| 12 | Menurunnya angka kemiskinan | Angka Kemiskinan | $P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^0$ <p>Dengan: P₀ = Persentase penduduk miskin (head count index) Z = garis kemiskinan y_i = rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i = 1, 2, 3, ..., q); y_i < z q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk</p> |

| No. | Sasaran Strategis | IKU | Formulasi |
|-----|---|------------------------------|--|
| 13. | Menurunnya angka pengangguran | Tingkat pengangguran Terbuka | $TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$ |
| 14. | Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk | Laju Pertumbuhan Penduduk | $r = \left(\frac{P_t}{P_0}\right)^{1/t} - 1$ <p>Keterangan: r = laju pertumbuhan penduduk P_t = jumlah penduduk pada tahun t P₀ = jumlah penduduk pada tahun dasar t = jangka waktu</p> |

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah wujud komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk mencapai sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang terukur. Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas | Indeks Reformasi Birokrasi | B |
| 2. | Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan | Indeks Pembangunan Manusia | 71,8 |
| 3. | Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan | Indeks Pemberdayaan Gender | 67,01 |
| 4. | Terwujudnya ketertiban umum daerah | Indeks Demokrasi Indonesia | 78 |
| 5. | Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP) | Total Factor Productivity (TFP) | 1,5 |
| 6. | Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah | Persentase <i>share</i> sektor Sekunder terhadap PDRB | 22% |
| 7. | Meningkatnya ketahanan pangan | Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari) | 3.217 |
| 8. | Terciptanya akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian | Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi mantap | 79,54% |
| 9. | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik | Rasio Elektrifikasi | 96% |

Laporan Kinerja

Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 10. | Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi | 1. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan | 80% |
| | | 2. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik | 91% |
| 11. | Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 66 |
| 12. | Menurunnya angka kemiskinan | Angka Kemiskinan | 7,40% |
| 13. | Menurunnya angka pengangguran | Tingkat pengangguran Terbuka | 2,8% |
| 14. | Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk | Laju Pertumbuhan Penduduk | 1,82% |



BAB III
AKUNTABILITAS
KINERJA

SEPUCUK JAMBI SEMBILAN LURAH



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam

memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Povinsi Jambi untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan monitoring dan evaluasi kinerja adalah bagian kunci untuk mendorong pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja yang berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam mereviu kinerja organisasi pemerintah.

3.1.1. Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan /program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja mencakup : (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan (2) tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran diukur berdasarkan pada data hasil pengukuran indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran.

Jika dilihat bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian Rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja maka dibutuhkan suatu skala penilaian. Dalam hal ini skala yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dengan tingkatan sebagai berikut :

Tabel 3.1. Skala nilai capaian kinerja

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian realisasi Kinerja | Kode |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|------|
| 1. | 91 ≥100 | Sangat baik | |
| 2. | 76 s.d. 90 | Tinggi | |
| 3. | 66 s.d. 75 | Sedang | |
| 4. | 51 s.d. 65 | Rendah | |
| 5. | s.d. 50 | Sangat rendah | |

Sumber : Permendagri 86 tahun 2017, diolah.

Indikator dan target yang ingin dicapai Pemerintah Provinsi Jambi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, antara lain :

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama s.d. 2021

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Provinsi Jambi untuk tahun 2021. Pencapaian IKU Gubernur Jambi s.d. tahun 2021 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut :

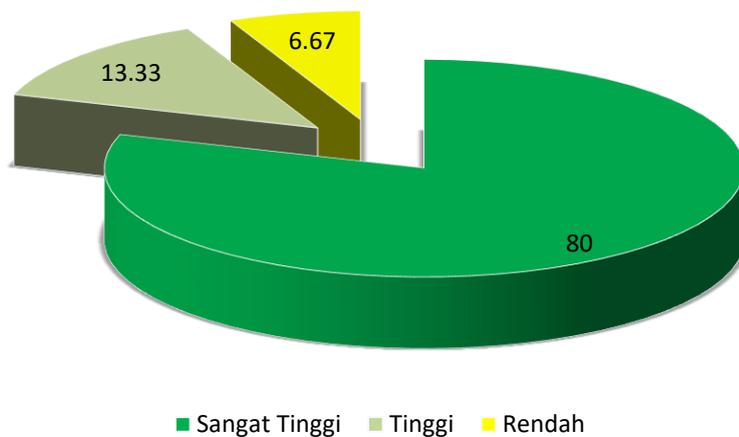
Tabel 3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan Tahun 2021

| No. | Indikator | Kondisi Awal (2016) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | Angka Realisasi Akhir RPJMD |
|-----|---|---------------------|------|-------|--------|--------|-----------|-----------------|-----------------------------|
| | | | | | | Target | Realisasi | % Capaian RPJMD | |
| 1. | Indeks Reformasi Birokrasi | CC | B | B | B | B | B | 100 | B |
| 2. | Indeks Pembangunan Manusia | 68,24 | | 71,26 | 71,29 | 71,8 | 71,63 | 99,76 | 71,63 |
| 3. | IDG | 61,93 | | 67,78 | 88,44 | 67,01 | 67,01 | 100 | 67,01 |
| 4. | Indeks Demokrasi Indonesia | 70,68 | | 68,71 | 69,76 | 78 | 75,53 | 96,83 | 75,53 |
| 5. | Total Factor Productivity (TFP) | NA | | 4,08 | 4,09 | 1,5 | 4,10 | 273,33 | 4,01 |
| 6. | Persentase share sektor Sekunder terhadap PDRB | 18,38 | | 17,77 | 18,99 | 22 | 20,03 | 91,04 | 20,03 |
| 7. | Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari) | 3.204 | | 3.047 | 3.005 | 3.217 | 3.008 | 93,5 | 3.008 |
| 8. | Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi mantap | 75,56% | | 77,93 | 76,51% | 79,54 | 76,29 | 95,91 | 76,29 |
| 9. | Rasio Elektrifikasi | 81,5 | | 99,89 | 99,90% | 96 | 99,99 | 104,15 | 99,99 |
| 10. | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan | 62,75% | | 66,66 | 70,71% | 80 | 79,70 | 99,62 | 79,70 |
| 11. | Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik | 66,35 | | 73,3 | 76,89 | 91 | 77,02 | 84,63 | 77,02 |
| 12. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 52,72 | | 71* | 68,06% | 66 | 68,02 | 103,06 | 68,02 |
| 13. | Angka Kemiskinan | 9,12% | | 7,51 | 7,58% | 7,4 | 8,09 | 91,47 | 8,09 |
| 14. | Tingkat pengangguran Terbuka | 4,20% | | 4,19 | 5,13% | 2,80 | 5,09 | 55,01 | 5,09 |
| 15. | Laju Pertumbuhan Penduduk | 2,24 | | 1,55 | 1,34% | 1,82 | 1,34 | 135,82 | 1,34 |

Dari 15 Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas, 6 indikator menunjukkan capaian 100% atau lebih. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan dukungan kerja keras seluruh stakeholder dalam pelaksanaan program pendukung sasaran tersebut. Bila dikelompokkan berdasarkan kriteria penilaian realisasi kinerja sebagaimana tabel di atas, maka 13 indikator (86,66%) masuk dalam kategori dengan capaian sangat tinggi, 1 indikator (6,66%) dengan capaian tinggi, dan 1 indikator (6,66%) terealisasi rendah. Sehingga bila dihitung rata-rata keseluruhan IKU telah tercapai 108,33% dari target tahun 2021 dan berbanding sama dengan target akhir RPJMD atau masuk dalam kriteria capaian tinggi.

Sejumlah target IKU yang tingkat pencapaiannya belum optimal pada tahun 2021 akan diupayakan melalui kinerja yang lebih keras, fokus dan terarah dengan pertimbangan sejumlah analisa di masa yang akan datang yang tentunya akan diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Jambi yang baru. Secara umum, tingkat capaian seluruh indikator dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.1. Persentase capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021



3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Perjanjian Kinerja

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan dalam subbab sebelumnya. Penyajian untuk subbab ini disajikan berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan sebagai berikut :



Sasaran 1

Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas

Istilah *good and clean governance* memiliki pengertian akan segala hal terkait dengan tindakan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam prakteknya, pemerintahan yang bersih adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif.

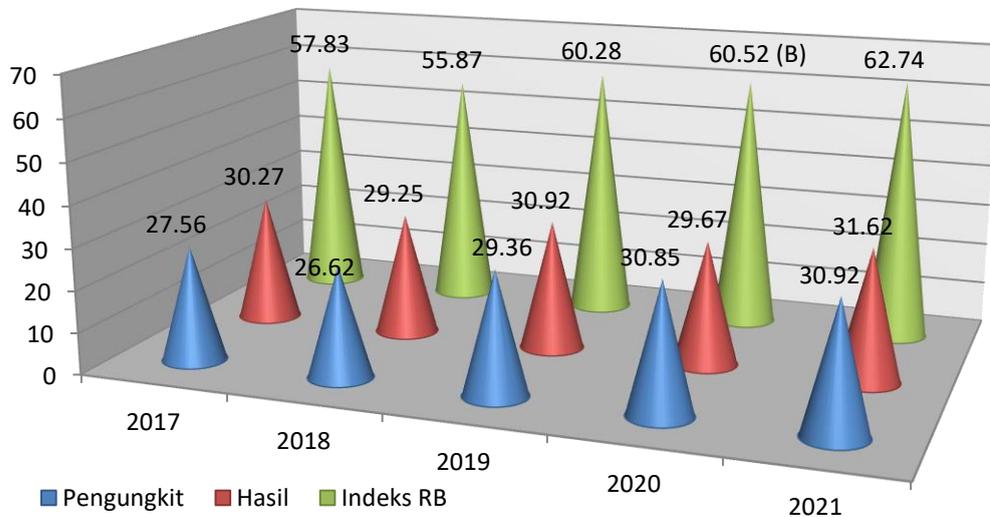
Ukuran yang digunakan untuk melihat capaian sasaran strategis ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun capaian Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2021 adalah Indeks Reformasi Birokrasi dengan capaian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi sebagai Indikator Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Akuntabel dan Partisipatif dengan Pelayanan Publik yang Berkualitas

| Indikator Kinerja | Kondisi Awal (2016) | 2020 | 2021 | | | Target Akhir RPJMD 2021 |
|----------------------------|---------------------|------|--------|-----------|-----------|-------------------------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | |
| Indeks Reformasi Birokrasi | CC | B | B | B | 100 | B |

Pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia. Sebagai bentuk komitmen pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi Jambi menetapkan Indeks Reformasi Birokrasi sebagai indikator kinerja utama yang harus diwujudkan dan menggambarkan keberhasilan misi 1 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Adapun capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2021 dapat dilihat pada Diagram dibawah ini.

Diagram 3.1 Realisasi Nilai Indeks Reformasi Birokrasi beserta komponen pengungkit dan komponen hasilnya.



Sumber: Kemenpan RB Data hasil Indeks RB 2021, 2022

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, Indeks Reformasi Birokrasi yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2021 adalah 62,74 dengan kategori B. Evaluasi ini dilakukan guna menilai pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Perkembangan rincian hasil evaluasi reformasi birokrasi dapat dilihat pada tabel berikut.

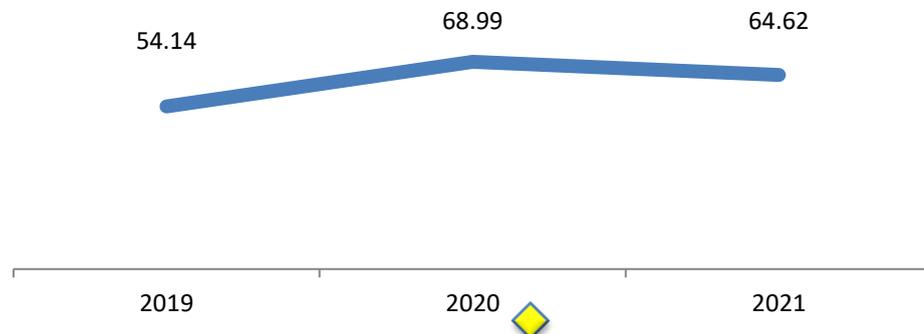
Tabel 3.4 Perbandingan Bobot Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020 dan Tahun 2021

| No | Komponen Penilaian | Bobot | 2020 | 2021 (2020) |
|-----------|---|---------------|--------------|--------------|
| A. | Komponen Pengungkit | | | |
| 1. | Pemenuhan | 20,00 | 12,07 | 12,2 |
| 2. | Hasil Antara Area Perubahan | 10,00 | 5,95 | 5,85 |
| 3. | Reform | 30,00 | 12,83 | 12,87 |
| | Total Komponen pengungkit (A) | 60,00 | 30,85 | 30,92 |
| B. | Komponen Hasil | | | |
| 1. | Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | 10,00 | 7,29 | 7,36 |
| 2. | Kualitas Pelayanan Publik | 10,00 | 7,98 | 9,16 |
| 3. | Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN | 10,00 | 8,00 | 8,35 |
| 4. | Kinerja Organisasi | 10,00 | 6,40 | 6,95 |
| | Total komponen hasil (B) | 40,00 | 29,67 | 31,82 |
| | Indeks reformasi birokrasi (A+B) | 100,00 | 60,52 | 62,74 |

Sumber: KemenPANRB, 2022

Berbagai upaya telah dilakukan demi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Dalam pengelolaan kearsipan dapat dilihat hasilnya dari hasil evaluasi atas pengawasan kearsipan oleh ANRI, dimana Provinsi Jambi memperoleh penilaian kategori baik dengan nilai 64,62.

Grafik 3.1. Trend Perkembangan Indeks Kearsipan Provinsi Jambi Tahun 2019-2021



Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga telah dikembangkan guna peningkatan kualitas pelayanan, baik layanan pada masyarakat maupun layanan internal. Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan mendapatkan nilai yang baik dan masuk dalam Zona Hijau dengan raihan nilai 83,43 sebagaimana yang dirilis oleh Ombudsman Republik Indonesia. Demikian pula dalam hal pembangunan zona integritas, terdapat peningkatan jumlah unit yang diajukan oleh Provinsi Jambi serta maturitas SPIP berada pada level 3.

Dalam rangka peningkatan nilai penataan organisasi/kelembagaan adalah penataan struktur organisasi dan tata laksana terus disempurnakan setiap tahun untuk mencapai struktur ideal yang diinginkan, pada tahun 2021 tingkat kematangan perangkat daerah mencapai indeks 28,1 masuk kategori Sedang. Dalam rangka penguatan komponen penataan Ketatalaksanaan, telah disusun Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Jambi periode Jambi Tuntas serta serta Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah dan selanjutnya dijabarkan dalam Standar Operasional Prosedur pada seluruh perangkat daerah Provinsi Jambi.

Untuk kembali mensinergikan capaian Jambi Tuntas 2016 - 2021, maka di awal tahun 2022 telah dilakukan inisiasi penyusunan Peta Proses Bisnis periode Jambi MANTAP 2021 – 2026. Menurut prosesnya kembali maka akan dilakukan inisiasi terhadap penyusunan Peta Proses Bisnis dan SOP Perangkat Daerah sesuai dengan periode RPJMD 2021 – 2026 dengan jargon Jambi MANTAP.

Sementara itu, pada komponen penguatan akuntabilitas, pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Jambi juga telah melakukan beberapa perbaikan pada seluruh komponen SAKIP, diantaranya melakukan penyusunan Pohon Kinerja (Logical Framework) Pemerintah Provinsi Jambi beserta Cascading Kinerjanya. Selanjutnya penjabaran dilakukan dengan penyusunan Logika Kinerja serta Cascading Kinerja Perangkat Daerah, kemudian menyempurnakan indikator kinerja disetiap level jabatan sampai dengan staf, serta memanfaatkan media teknologi informasi untuk mengukur kinerja dengan penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Online berbasis kinerja, dan e-SAKIP Provinsi Jambi.

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, instansi Pemerintah didorong untuk lebih akuntabel dan lebih bertanggungjawab terhadap kinerja atau hasil yang dicapai.

Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya, setiap tahun Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), baik di tingkat Pusat maupun daerah. Komponen penilaian meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Instansi pemerintah yang dinilai akuntabel atau yang akuntabilitas kinerjanya baik adalah instansi yang berdasarkan hasil evaluasi memperoleh predikat minimal “B” atau “Baik”.

Tabel 3.5. Kategori Penilaian SAKIP

| Predikat | Nilai Absolut | Interpretasi |
|----------|---------------|------------------|
| AA | >90-100 | Sangat Memuaskan |
| A | >80-90 | Memuaskan |
| BB | >70-80 | Sangat Baik |
| B | >60-70 | Baik |
| CC | >50-60 | Cukup Baik |
| C | >30-50 | Agak Kurang |
| D | 0-30 | Kurang |

Sumber: Perpres Nomor 29 Tahun 2014

Perbaikan komponen akuntabilitas kinerja menghasilkan capaian yang baik, sehingga Provinsi Jambi berhasil meningkatkan nilai SAKIP dari tahun ke tahun mulai dari 60,02 pada tahun 2018 menjadi 61,35 pada tahun 2019, pada tahun 2020 mendapat nilai 62,32 dan pada tahun 2021 mendapatkan nilai 64,08. Bila dibandingkan dengan target, dimana target akhir periode RPJMD tepatnya pada tahun 2021 adalah B, maka persentase realisasi capaian kinerja pada indikator ini telah mencapai 100% atau masuk dalam kategori **sangat tinggi**.

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah pada tahun 2021, maka capaian hingga tahun 2021 ini mencapai 100% atau masuk dalam kategori tinggi. Bila melihat tren perolehan nilai, maka secara umum dapat dilihat bahwa peningkatan terjadi hampir pada seluruh komponen penilaian.

Tabel 3.6. Capaian Nilai per komponen SAKIP

| Komponen | 2020 | 2021 |
|---------------------|--------------|--------------|
| Perencanaan Kinerja | 20,49 | 21,22 |
| Pengukuran Kinerja | 13,41 | 13,86 |
| Pelaporan Kinerja | 10,08 | 10,72 |
| Evaluasi Kinerja | 5,57 | 5,65 |
| Capaian Kinerja | 12,77 | 12,63 |
| Nilai SAKIP | 62,32 | 64,08 |

Sumber: Hasil Evaluasi SAKIP 2021 (2022)

Gambar 3.2. Piagam Penghargaan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2021 (2022)



Perkembangan capaian nilai SAKIP dan nilai komponen SAKIP Pemerintah Provinsi Jambi dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.2. Trend Perkembangan Nilai SAKIP Provinsi Jambi Tahun 2018-2021

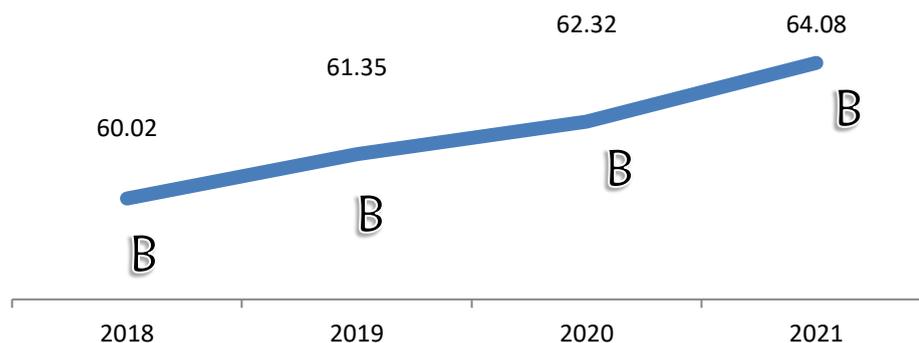
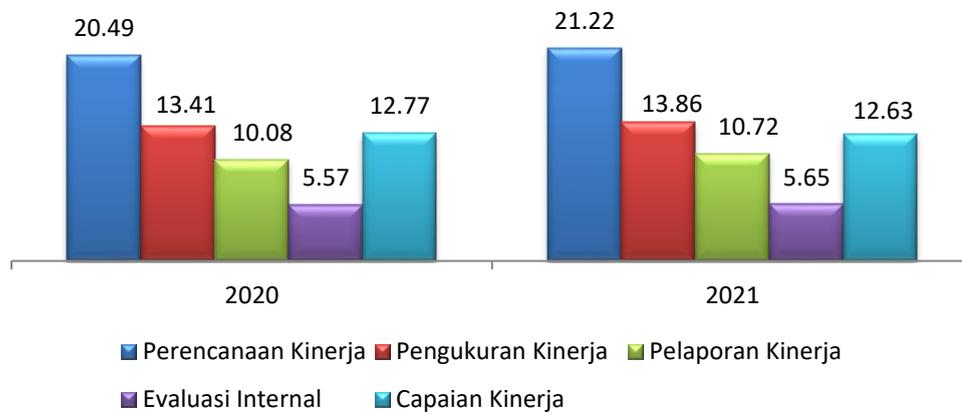


Diagram 3.2. Perkembangan Nilai Komponen SAKIP



Dalam rangka perbaikan komponen perencanaan kinerja, selain telah melakukan perubahan atas RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 yang diikuti oleh perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Jambi juga telah melakukan perbaikan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) dengan melibatkan seluruh pimpinan di level Pemerintah Provinsi Jambi dan Perangkat Daerah. Pemerintah Provinsi Jambi juga telah menyusun Pohon Kinerja (logical framework) beserta Cascading Kinerjanya sekaligus mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun pohon kinerja dan cascading kinerja serta memantau perjanjian kinerja sampai dengan level Staf/fungsional sehingga diharapkan seluruh komponen secara berjenjang memiliki kinerja yang saling mendukung dalam pencapaian sasaran daerah. Pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja juga mengalami perbaikan dan didukung oleh capaian kinerja yang secara umum menunjukkan capaian yang tinggi.

Tata kelola pemerintahan yang baik lazim digambarkan dalam 3 pilar yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Ketiga pilar tersebut menunjukkan pengakuan akan kontribusi bukan hanya pemerintah dalam penyelesaian urusan-urusan publik, namun juga masyarakat dan pihak non pemerintah lainnya.

Upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka peningkatan indeks Reformasi Birokrasi, hingga kembali menunjukkan hasil yang sangat baik karena untuk kesembilan kalinya Provinsi Jambi dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya. Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Gambar 3.3. Pj. Gubernur Jambi menerima Laporan hasil audit BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020 pada Tahun 2021



Penilaian oleh lembaga eksternal ini menjadi komponen penting untuk karena secara objektif menunjukkan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari segi keuangan. Hal ini menjadi bagian yang menguatkan akuntabilitas pada aspek pencapaian kinerja.

Pemeriksaan oleh BPK dilakukan berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik setiap tahun ini mencakup pemeriksaan terhadap neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Atas pencapaian opini BPK ini maka kinerja indikator pendukung indikator Kinerja Utama Indeks RB ini menjadi **sangat tinggi** atau memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja ini bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD juga telah mencapai 100% atau sangat tinggi. Sebagai catatan, realisasi ini merupakan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jambi untuk tahun 2020 yang dikeluarkan oleh BPK pada tahun 2021. Untuk hasil pemeriksaan atas kinerja tahun 2021 masih dalam proses ketika laporan ini disusun.

Tabel 3.7. Realisasi Capaian komponen hasil Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

| Indikator Kinerja | Kondisi Awal (2015) | 2020 | 2021 | | | Realisasi Akhir RPJMD 2021 |
|-------------------------------------|---------------------|------|--------|-----------|-----------|----------------------------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | |
| Opini BPK terhadap Laporan Keuangan | WTP | WTP | WTP | WTP | 100 | WTP |

Pada komponen kualitas pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Jambi terus melakukan survey kepuasan masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Pelayanan publik yang baik merupakan muara dari sebuah reformasi birokrasi, oleh karena itu upaya memperbaiki kinerja organisasi layanan publik harus dilakukan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat menerima layanan sesuai dengan kebutuhannya. Kepuasan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik karena masyarakat adalah konsumen dari produk layanan yang dihasilkan. Keluhan masyarakat yang tidak direspon oleh pemerintah akan menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparat pemerintah, sehingga pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah yang responsif dalam arti positif merupakan dambaan seluruh masyarakat.

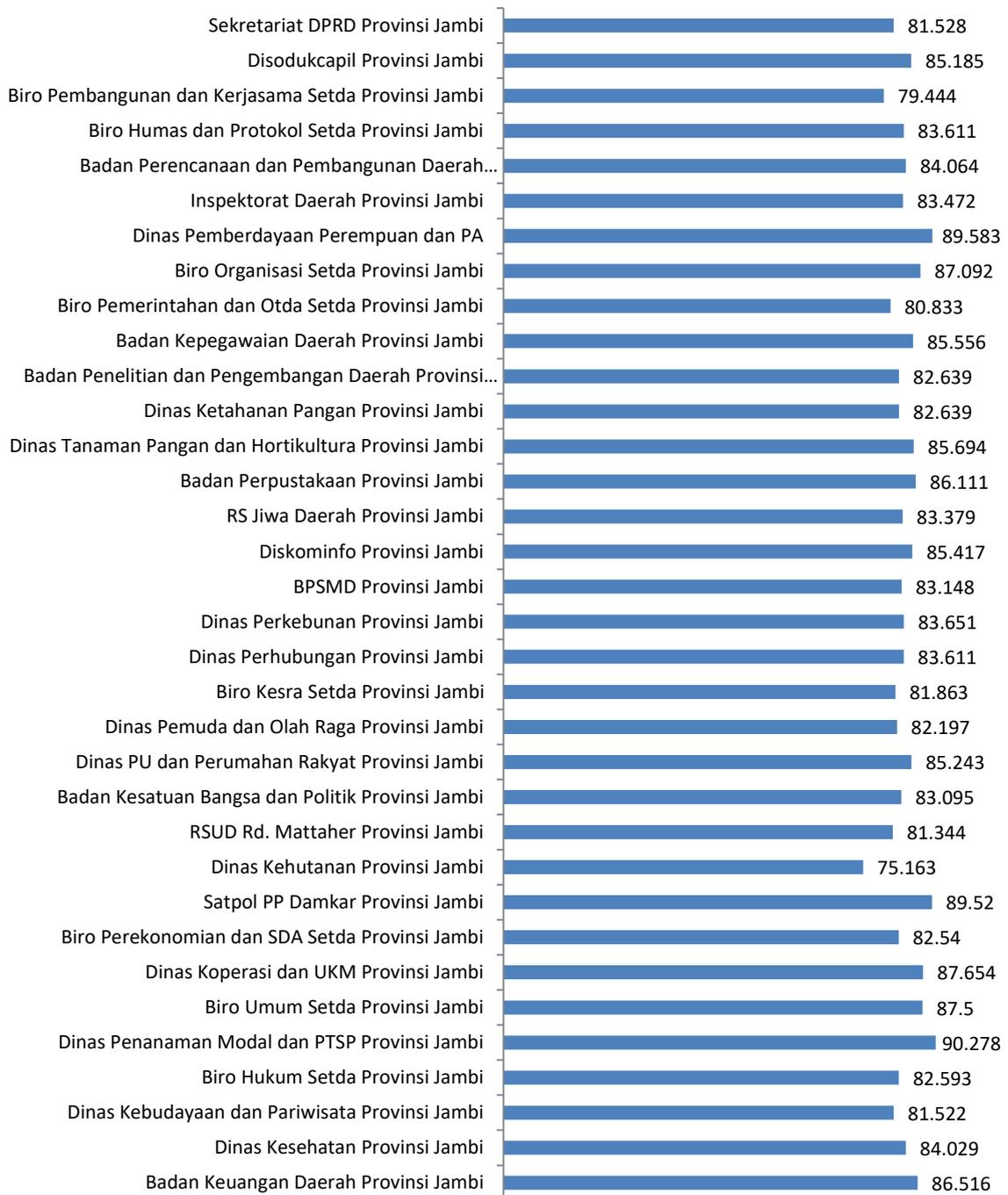
Gambar 3.4. Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., menerima Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2021 dari Menteri Dalam Negeri RI



Upaya untuk menghubungkan tata pemerintahan yang baik dengan pelayanan publik bukan merupakan hal yang baru. Pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disamping telah menerbitkan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI sebelumnya sebagai upaya untuk memperkuat landasan dalam memberikan jaminan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan publik di Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi bertekad untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada instansi/lembaga pemerintah daerah yang melayani publik.

Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu bentuk upaya yang bisa dilakukan dalam rangka melihat sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Hal ini telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2004 tentang Pedoman Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Terdapat 9 unsur yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat ini, kesembilan unsur yang ada dalam survei dijadikan tolok ukur perbaikan pelayanan pada masa yang akan datang.

Diagram 3.3. Nilai Rata-Rata IKM Perangkat Daerah Tahun 2021



Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, 2021

Pada tahun 2021, perhitungan indeks kepuasan masyarakat didasarkan pada hasil survey pada 43 Perangkat Daerah guna mendapatkan gambaran secara utuh hasil pelaksanaan upaya perbaikan kinerja pelayanan publik Pemerintah Provinsi Jambi. Hasil perhitungan dan konversi Indeks menjadi mutu pelayanan dan kinerja dapat dilihat pada tabel di di bawah. Berdasarkan tabel di bawah, capaian indeks kepuasan masyarakat Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2021 masuk dalam kategori “Baik” atau “B” dengan nilai rata-rata **83,723**.

Tabel 3.8 Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Jambi Tahun 2021

| Unsur Pelayanan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>U1: Persyaratan pelayanan</i> | 78,07 | 81,713 | 83,862 | 84,296 | 86,290 |
| <i>U2: Prosedur pelayanan</i> | 78,14 | 81,390 | 82,776 | 83,877 | 84,375 |
| <i>U3: Waktu pelayanan</i> | 76,53 | 78,860 | 81,326 | 81,741 | 82,158 |
| <i>U4: Biaya/tarif pelayanan</i> | 78,88 | 82,229 | 83,006 | 85,226 | 85,906 |
| <i>U5: Produk/hasil pelayanan</i> | 78,11 | 79,931 | 81,742 | 82,759 | 83,375 |
| <i>U6: Kemampuan petugas pelayanan</i> | 80,43 | 80,763 | 82,070 | 82,665 | 82,653 |
| <i>U7: Perilaku petugas pelayanan</i> | 81,03 | 81,858 | 82,480 | 83,057 | 83,089 |
| <i>U8: Maklumat pelayanan</i> | 76,77 | 78,916 | 80,961 | 81,740 | 82,073 |
| <i>U9: Mekanisme pengaduan pelayanan</i> | 75,75 | 79,775 | 80,382 | 82,451 | 83,590 |
| Indeks Kepuasan Masyarakat | 78,19 | 80,604 | 82,063 | 83,090 | 83,723 |

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, 2021

Pada tabel di atas menggambarkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Provinsi Jambi termasuk dalam kategori baik dengan peningkatan nilai pada seluruh setiap unsur pelayanan pada setiap tahunnya. Unsur dengan nilai tertinggi adalah persyaratan pelayanan dan terendah adalah pada unsur maklumat pelayanan. Berdasarkan hasil survey ini, kedepan harus dilakukan perbaikan atas informasi mengenai maklumat pelayanan sehingga akan berdampak pada komitmen dalam memberikan layanan. Selanjutnya, perlu juga upaya penanganan pengaduan, saran dan masukan dengan menerapkan SOP yang lebih baik dan tetap melaksanakan perbaikan- perbaikan pada unsur lainnya.

Program-program yang telah dilakukan pada tahun 2021 dalam rangka meningkatkan indeks reformasi birokrasi adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
3. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan
4. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
5. Program Pembangunan dan Pengembangan sarana teknologi informasi dan komunikasi
6. Program penataan batas dan wilayah administrasi
7. Program Pelayanan, Pengolahan dan Akuisisi Arsip
8. Program Pengembangan kearsipan
9. Program Profesionalisasi PNS
10. Program Manajemen pelayanan kediklatan
11. Program Promosi dan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka
12. Program Penataan, Perencanaan, dan Rekrutmen SDM Aparatur Berbasis Kompetensi
13. Program Peningkatan Kesejahteraan PNS dan Pemberian Penghargaan PNS
14. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

15. Program penelitian dan pengembangan
16. Program penghimpunan data dan penyebarluasan informasi pembangunan daerah Provinsi Jambi
17. Program Perencanaan dan Penataan Peraturan daerah provinsi
18. Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
19. Program Pengelolaan Kekayaan Daerah
20. Program pembangunan, pengembangan aplikasi dan telematika
21. Program Pengembangan Koleksi, Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka
22. Program Pembinaan, Pengembangan Perpustakaan dan Kegemaran Membaca
23. Program Reformasi Birokrasi
24. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Permasalahan :

- a. Penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja telah dilakukan, namun belum sepenuhnya terimplementasi.
- b. Unsur-unsur pelayanan masih memerlukan pembenahan, terutama berkaitan dengan unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Solusi :

- a. Penyempurnaan perencanaan kinerja dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan perencanaan kinerja sehingga sasaran strategis berorientasi pada hasil atau bermanfaat bagi masyarakat (*result oriented*), kualitas indikator kinerja yang SMART dan terjalin keterpaduan perencanaan (*integrated development plan*)
- b. Penetapan standar operasi pelayanan (SOP) pelayanan yang diterapkan secara terbuka kepada pihak pemakai jasa atau masyarakat, yang disertai tenggat waktu yang jelas. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak yaitu Perangkat Daerah dan masyarakat karena seluruh petugas pada unit pelayanan akan bekerja secara maksimal berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan pada sisi lain, masyarakat merasa yakin akan mendapatkan produk/ jasa pelayanan yang cepat, murah dan maksimal.
- c. Pemberian reward atau prestasi kerja penyelenggara pelayanan publik dan punishment terhadap hasil kerja yang tidak baik.
- d. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan maka perlu dilakukan peningkatan pengetahuan, keahlian dan keterampilan petugas pemberi pelayanan pada setiap unit di masing-masing Perangkat Daerah
- e. Peningkatan ketersediaan fasilitas pelayanan yang didukung oleh sistem IT pada setiap unit pelayanan, baik secara kuantitas maupun kualitas



Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Pembangunan kesehatan sebagaimana kita ketahui bertujuan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal. Keberhasilan pembangunan kesehatan mempunyai peran penting dalam meningkatkan mutu dan daya saing sumberdaya kesehatan. Oleh karena itu peningkatan kualitas kesehatan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.



Demikian pula pendidikan, sebagai salah satu hak asasi manusia maka setiap warga negara berhak untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran, minimal pada tingkat pendidikan dasar. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, agama, maupun gender. Pemenuhan atas hak

untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pendidikan merupakan salah satu sarana penting agar masyarakat dapat terampil dan produktif yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan juga merupakan aspek yang sangat strategis untuk menghadapi era globalisasi yang sedang berlangsung. Dalam era globalisasi, keunggulan kompetisi suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusianya.

Ukuran yang digunakan untuk melihat capaian sasaran strategis ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Adapun capaian Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2021 adalah sebesar 71,63 meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yakni sebesar 71,29.

Tabel 3.9. Capaian Indeks Pembangunan Manusia sebagai Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

| Indikator Kinerja | Kondisi Awal (2015) | 2020 | 2021 | | | Realisasi Akhir RPJMD 2021 |
|-------------------|---------------------|-------|--------|-----------|-----------|----------------------------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | |
| IPM | 68,24 | 71,29 | 71,8 | 71,63 | 99,76 | 71,63 |

Provinsi Jambi terdiri dari 9 (sembilan) kabupaten dan 2 (dua) kota. Untuk melihat lebih dalam sejauh mana pembangunan manusia di wilayah Provinsi Jambi, perlu diketahui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 3,73 juta jiwa (hasil proyeksi penduduk), Provinsi Jambi terus mengalami kenaikan nilai IPM dari tahun ke tahun.

Berdasarkan penghitungan dengan metode baru, tercatat IPM Jambi tahun 2012 sebesar 66,94. Angka ini terus meningkat setiap tahunnya yang mencapai angka 71,63 pada tahun 2021. Capaian ini merupakan agregasi dari tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

Untuk menghitung dimensi umur panjang dan hidup sehat, digunakan indikator Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Selanjutnya, dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan.

Grafik 3.3. Trend Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi, 2012-2021



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2021

Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota

Capaian pembangunan manusia di kabupaten/kota se-Provinsi Jambi tampaknya mengikuti tren IPM Provinsi Jambi, selalu meningkat dari tahun ke tahun dan cukup merata di 9 (sembilan) kabupaten dan 2 (dua) kota. IPM tertinggi berada di Kota Jambi dan terendah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pada tabel dibawah terlihat bahwa dua besar IPM tertinggi berada di dua kota di Provinsi Jambi, yaitu Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh kemudian diikuti oleh tertinggi ketiga Kabupaten Kerinci. Kabupaten yang perlu mendapat perhatian lebih adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memiliki IPM terendah sejak 2010. Walaupun setiap tahunnya mengalami peningkatan tapi jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya angka IPM di kabupaten ini cukup jauh berbeda.

Tabel 3.10. Perkembangan IPM Kabupaten/Kota 2012-2021

| No. | Kabupaten/Kota | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 01 | Kerinci | 66,71 | 67,49 | 67,96 | 68,89 | 69,68 | 70,03 | 70,59 | 70,95 | 71,21 | 71,45 |
| 02 | Merangin | 65,31 | 65,82 | 66,21 | 67,40 | 67,86 | 68,30 | 68,81 | 69,07 | 69,19 | 69,53 |
| 03 | Sarolangun | 66,16 | 67,13 | 67,67 | 68,10 | 68,73 | 69,03 | 69,41 | 69,72 | 69,86 | 70,25 |
| 04 | Batang Hari | 66,97 | 67,24 | 67,68 | 68,05 | 68,70 | 68,92 | 69,33 | 69,67 | 69,84 | 70,11 |
| 05 | Muaro Jambi | 64,17 | 65,14 | 65,71 | 66,66 | 67,55 | 67,86 | 68,34 | 69,01 | 69,18 | 69,55 |
| 06 | Tanjung Jabung Timur | 58,63 | 59,41 | 59,88 | 61,12 | 61,88 | 62,61 | 63,32 | 63,92 | 64,43 | 64,91 |
| 07 | Tanjung Jabung Barat | 62,86 | 63,54 | 64,04 | 65,03 | 65,91 | 66,15 | 67,13 | 67,54 | 67,54 | 68,16 |
| 08 | Tebo | 65,23 | 65,91 | 66,63 | 67,29 | 68,05 | 68,16 | 68,67 | 69,02 | 69,14 | 69,35 |
| 09 | Bungo | 67,20 | 67,54 | 67,93 | 68,34 | 68,77 | 69,04 | 69,42 | 69,86 | 69,92 | 70,15 |
| 71 | Kota Jambi | 73,78 | 74,21 | 74,86 | 75,58 | 76,14 | 76,74 | 77,41 | 78,26 | 78,37 | 79,12 |
| 72 | Kota Sungai Penuh | 71,23 | 72,09 | 72,48 | 73,03 | 73,35 | 73,75 | 74,67 | 75,36 | 75,42 | 75,70 |

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2021

Kota identik dengan IPM yang lebih baik dibanding dengan kabupaten, mengingat di kota fasilitas pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap ekonomi juga biasanya lebih baik. Sejak tahun 2011 IPM Kota Jambi dan Sungai Penuh sudah melebihi 70 poin, jauh lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Jambi yang hanya 66,14. Di tahun 2021 urutan daerah dengan IPM tertinggi masih ditempati Kota Jambi dengan IPM mencapai 79,12 dan tidak menutup kemungkinan angka ini akan terus naik di tahun tahun berikutnya. Kota Sungai Penuh menjadi kota kedua dengan IPM tertinggi, yaitu 75,70.

Kota Sungai Penuh baru terbentuk dari pemecahan Kabupaten Kerinci pada tahun 2009 dan sudah menunjukkan IPM yang tinggi dibandingkan kabupaten induknya. Kabupaten dengan IPM tertinggi ketiga adalah Kabupaten Kerinci, yaitu sebesar 71,45. Selanjutnya di urutan ke empat adalah Kabupaten Sarolangun (70,25); urutan ke lima Kabupaten Bungo (70,15); urutan ke enam Kabupaten Batanghari (70,11); urutan ke tujuh Kabupaten Muaro Jambi (69,55); urutan ke delapan Kabupaten Merangin (69,53); urutan ke sembilan Kabupaten Tebo (69,35); urutan ke sepuluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat (68,16); dan di posisi terakhir adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (64,91).

Selama kurun waktu 2012-2021, IPM Jambi terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, IPM Jambi tercatat sebesar 66,94 kemudian meningkat menjadi 67,76 tahun 2013. IPM terus menanjak hingga pada 2018 memasuki angka 70,65 dan dilanjutkan peningkatannya pada 2021 sebesar 71,63. Dengan demikian, dalam kurun waktu sepuluh tahun telah terjadi kenaikan IPM sebesar 4,69 poin.

Pertumbuhan IPM tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu 1,22 persen atau naik sekitar 0,82 poin. Sedangkan pertumbuhan IPM terendah terjadi pada tahun 2020 sekitar 0,03 persen atau hanya meningkat sekitar 0,03 poin. Selama periode 2012 hingga 2021, IPM Provinsi Jambi secara rata-rata tumbuh sebesar 0,549 persen per tahun. Perkembangan tersebut menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia di Provinsi Jambi.

Provinsi Jambi mencapai pembangunan manusia di atas tujuh puluh sejak tahun 2018, yaitu sebesar 70,65 dan menjadi 71,63 di tahun 2021. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, tahun 2021 Provinsi Jambi menempati urutan ke-19. Tahun 2021, tiga provinsi dengan IPM tertinggi adalah DKI Jakarta (81,11), DI Yogyakarta (80,22), dan Kalimantan Timur (76,88). Sejak tahun 2012, tiga provinsi dengan IPM tertinggi ini bertahan di posisi masing-masing.

Dimensi Pembentuk IPM

Dimensi Kesehatan

Seperti diketahui bahwa pengukuran pembangunan manusia menggunakan indikator yang sudah diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada Human Development Report tahun 1990 diperkenalkan tiga dimensi pembentuk IPM, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dari ketiga dimensi tersebut, diturunkan empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM, yaitu umur harapan hidup (UHH) saat lahir, rata-rata lama sekolah (RLS), harapan lama sekolah (HLS), dan pengeluaran per kapita disesuaikan.

Dimensi pertama pembentuk IPM adalah umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan umur harapan hidup (UHH) saat lahir. Umur harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan. Hasil dari pencapaian pembangunan masyarakat dapat diukur dengan melihat seberapa jauh masyarakat di daerah tersebut telah memanfaatkan sumberdaya yang ada. Dimana fasilitas dan sarana yang dibangun mampu menambah kecerdasan warganya. Dengan kecerdasan diharapkan masyarakat dapat menata hidup sehat, karena hidup sehat dan cerdas diyakini akan meningkatkan kemampuan produktivitas seseorang sehingga dapat berumur panjang dan lebih berkualitas.

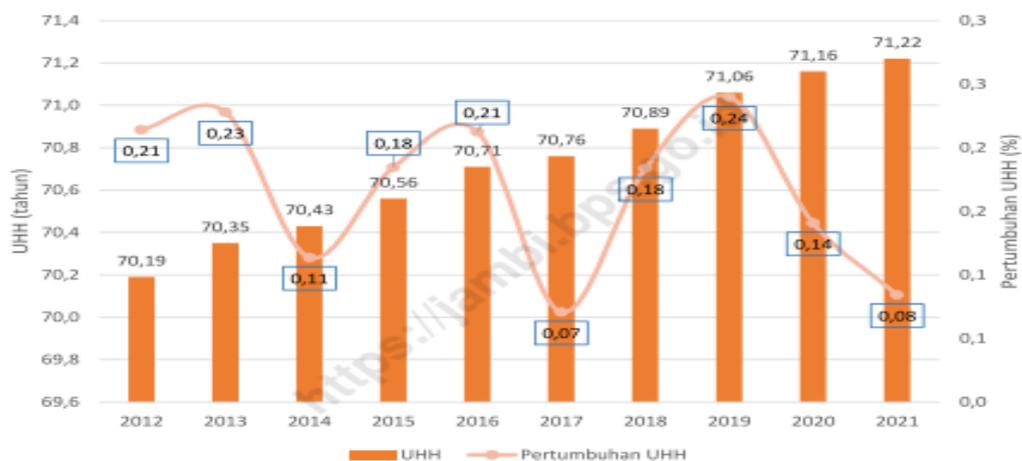
Kesehatan menjadi prioritas manusia untuk menjalani kehidupan, dengan jiwa dan raga yang sehat memudahkan seseorang untuk beraktivitas. Hidup lebih lama yang menjadi dambaan hampir semua orang adalah panjang umur dan sehat. Secara teori, seseorang dapat bertahan hidup lebih lama apabila dia sehat sehingga apabila seseorang sakit dia akan berupaya melakukan tindakan untuk mempercepat penyembuhan agar dia bisa bertahan hidup lebih lama.

Umur harapan hidup (UHH) saat lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. UHH merupakan indikator penting dalam mengukur panjang umur seseorang. Umur harapan hidup juga sering dimanfaatkan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk. Apabila umur harapan hidup di suatu daerah rendah maka harus segera diikuti dengan pembangunan fasilitas kesehatan dan peningkatan program sosial (Maryani & Kristiana, 2018).

Dimensi Kesehatan Semakin Baik

Dalam kurun waktu 2012-2021, umur harapan hidup (UHH) saat lahir di Provinsi Jambi selalu menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Lampiran 2). Sejak tahun 2012 hingga tahun 2018 umur harapan hidup Provinsi Jambi berada pada angka 70 tahun kemudian tahun 2019 umur harapan hidup (UHH) mencapai 71,06 tahun. Peningkatan terus terjadi hingga pada tahun 2021, umur harapan hidup (UHH) di Provinsi Jambi sebesar 71,22 tahun. Artinya hidup bayi yang baru lahir di Provinsi Jambi diharapkan dapat bertahan hidup hingga usia 71,22 tahun.

Grafik 3.4. Umur Harapan Hidup (UHH) dan Pertumbuhan UHH di Provinsi Jambi, 2012-2021



Pada tahun 2012, umur harapan hidup (UHH) bayi yang baru lahir lahir di Provinsi Jambi sebesar 70,19 tahun kemudian meningkat sekitar 0,21 persen menjadi 70,19 tahun pada tahun 2012. Pertumbuhan umur harapan hidup (UHH) dalam sepuluh tahun terakhir mencapai rata-rata 0,18 persen per tahun.

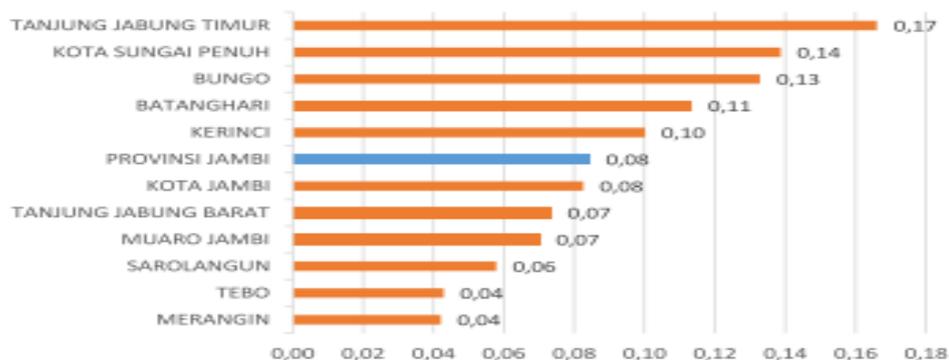
Pertumbuhan paling melambat terjadi pada tahun 2017 (0,07 persen), dengan pencapaian umur harapan hidup (UHH) hanya 70,76 tahun. Derajat kesehatan masyarakat Provinsi Jambi melewati fase tertinggi pada tahun 2019 dengan pertumbuhan umur harapan hidup mencapai 0,24 persen. Seiring dengan lompatan pencapaian IPM Provinsi Jambi dari angka 70 ke 71. Pada tahun 2020, pertumbuhan umur harapan hidup melambat hingga 0,14 persen. Umur harapan hidup masyarakat Provinsi Jambi hanya mencapai 71,16 tahun.

Dimensi Kesehatan di Kabupaten/Kota

Seseorang yang dapat menikmati umur panjang bukan semata-mata upaya dari pribadi yang bersangkutan. Ada peran serta pemerintah dengan memanfaatkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk memperpanjang umur penduduknya. Oleh karena itu pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perlu diarahkan pada pembinaan kesehatan agar warganya senantiasa menerapkan pola hidup sehat sehingga dapat menikmati umur panjang dan memiliki banyak aktivitas. Kesehatan adalah hal penting dalam kehidupan ini, modal bagi peningkatan produktivitas dan pencapaian kualitas manusia.

Salah satu unsur pembentuk kualitas manusia adalah umur harapan hidup yang merupakan salah satu indikator gambaran kesehatan masyarakat di suatu wilayah tertentu. Bila kita melihat data umur harapan hidup (UHH) bayi yang baru lahir pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi, maka pada 2021 sudah ada tujuh kabupaten/kota yang umur harapan hidup saat lahirnya melebihi 70 tahun. Hal ini merupakan sebuah peningkatan yang baik karena pada 2012 hanya ada empat kabupaten dan sejak 2016-2020 ada 5 kabupaten yang umur harapan hidup ketika lahirnya nya di atas 70 tahun.

Grafik 3.5. Pertumbuhan Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2021 (Persen)



Dari seluruh kabupaten/kota se-Jambi di tahun 2021, Kota Jambi memiliki umur harapan hidup tertinggi yaitu 72,71 tahun, disusul Kota Sungai Penuh dengan umur harapan hidup 72,21 tahun, dan pada urutan ketiga dan keempat ditempati oleh Kabupaten Muaro Jambi dan Merangin yang mencatat umur harapan hidup masing-masing 71,32 tahun dan 71,29. Dari kedua kota di Provinsi Jambi, yang lebih tinggi pertumbuhan umur harapan hidupnya dari tahun 2020-2021 adalah Kota Sungai Penuh sebesar 0,14 persen, sedangkan Kota Jambi mencatat perkembangan sebesar 0,08 persen dari tahun 2020-2021.

Apabila dibandingkan antara UHH di wilayah kota dengan umur harapan hidup di wilayah kabupaten, maka umur harapan hidup wilayah kota lebih tinggi dibandingkan dengan umur harapan hidup wilayah kabupaten. Hal ini antara lain karena fasilitas layanan kesehatan dan tenaga medis yang tersedia di wilayah kota lebih banyak dan lebih mudah dijangkau oleh masyarakatnya. Keberadaan fasilitas kesehatan sangat menentukan dalam pemulihan kesehatan, pencegahan dan pengobatan penyakit. Ketersediaan fasilitas juga dipengaruhi faktor lokasi apakah di pedesaan atau perkotaan.

Pada tahun 2021, Kabupaten Tanjung Jabung Timur tercatat sebagai kabupaten dengan umur harapan hidup terendah di Provinsi Jambi yaitu sebesar 66,34 tahun. Walaupun demikian Tanjung Jabung Timur juga meraih laju pertumbuhan umur harapan hidup tertinggi sebesar 0,17 persen. Pertumbuhan umur harapan hidup tertinggi berikutnya ditempati Kota Sungai Penuh sebesar 0,14 persen (dari 72,11 tahun naik menjadi 72,21 tahun). Pada tempat ketiga dan keempat ada Kabupaten Bungo dan Batang Hari dengan pertumbuhan umur harapan hidup dari tahun 2020-2021 sebesar 0,13 dan 0,11 persen. Sedangkan untuk kabupaten/kota yang lainnya, pertumbuhan umur harapan hidupnya di bawah 0,11 persen.

Tingkat keberhasilan peningkatan usia harapan hidup tidak terlepas dari upaya penurunan angka kematian ibu, penurunan angka kematian bayi dan penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita. Tingginya capaian usia harapan hidup memperlihatkan peningkatan derajat kesehatan dan pencapaian pembangunan kesejahteraan rakyat khususnya sektor kesehatan yang didukung oleh sektor ekonomi, budaya dan pendidikan.

Angka Kematian Ibu (AKI) atau *Maternal Mortality Rate* (MMR) adalah jumlah kematian ibu akibat proses kelahiran, persalinan, dan pasca persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. AKI didapatkan dari Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilakukan 5 tahun sekali dan digunakan untuk pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini dipengaruhi status kesehatan umum, pendidikan, dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Sensitifitas AKI terhadap perbaikan pelayanan kesehatan menjadikannya indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan.

Angka kematian ibu AKI di Indonesia masih cukup tinggi walaupun dalam beberapa decade terakhir AKI telah mengalami penurunan. Data terakhir AKI masih 306/100.000 Kelahiran Hidup (SUPAS 2015). Untuk mendapatkan capaian indikator terkait Angka Kematian Ibu (AKI) ini harus melalui Survey, sampai saat ini Provinsi Jambi untuk Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran tidak bisa dihitung karena jumlah kelahiran hidup tidak sampai 100.000. Pada tahun 2021 jumlah kelahiran hidup hanya 65.427 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Untuk mengetahui data tahunan, maka yang digunakan adalah jumlah kematian ibu.

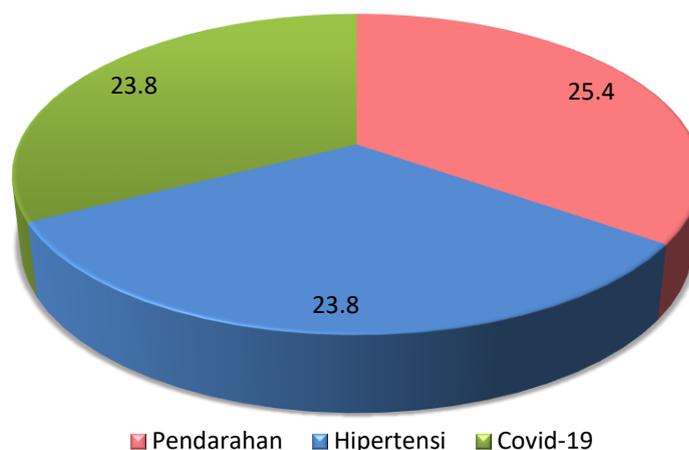
Tabel 3.11. Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Jambi Tahun 2015-2021

| No. | KABUPATEN/ KOTA | Tahun | | | | | |
|----------|--------------------|-------|------|------|------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Kerinci | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 |
| 2. | Merangin | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 8 |
| 3. | Sarolangun | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 4. | Batang Hari | 2 | 8 | 3 | 7 | 8 | 5 |
| 5. | Bungo | 10 | 5 | 1 | 9 | 1 | 11 |
| 6. | Tebo | 9 | 4 | 3 | 10 | 6 | 6 |
| 7. | Muaro Jambi | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 9 |
| 8. | Tanjab Barat | 5 | 7 | 4 | 5 | 12 | 5 |
| 9. | Tanjab Timur | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 |
| 10. | Kota Jambi | 3 | 4 | 2 | 5 | 11 | 6 |
| 11. | Kota Sei Penuh | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Provinsi | | 59 | 54 | 46 | 59 | 62 | 67 |

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi 2021

Data jumlah kematian ibu di Provinsi Jambi cenderung berfluktuatif, dan memperlihatkan peningkatan pada tahun 2021. Berdasarkan kasus kematian yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jambi pada tahun 2021, jumlah kematian ibu di Provinsi Jambi Tahun 2021 adalah sebanyak 67 kasus, dengan jumlah kematian ibu terbanyak terdapat pada Kabupaten Bungo dengan 11 kasus, sedangkan yang paling baik adalah pada Kota Sungai Penuh dengan dan Kabupaten Sarolangun dengan masing-masing 3 kasus. Jumlah Kematian Ibu ini berkaitan dengan berbagai sebab, baik langsung maupun tidak langsung. Penyebab langsung (*Direct Obstetric Death*) kematian ibu antara lain adalah komplikasi obstetri pada masa hamil, bersalin dan nifas, atau kematian yang disebabkan oleh suatu tindakan, atau berbagai hal yang terjadi akibat tindakan yang dilakukan selama hamil, bersalin atau nifas terkait erat dengan faktor penolong persalinan (tenaga) dan tempat/fasilitas persalinan.

Gambar 3.5 Penyebab kematian Ibu di Provinsi Jambi Tahun 2021



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2021

Berdasarkan data riwayat jenis penyebab kematian ibu di Provinsi Jambi Tahun 2021, jenis terbanyak adalah perdarahan dan hipertensi. Penyebab kematian terbanyak masih didominasi oleh perdarahan yaitu sebanyak 17 orang (25,4%), Hipertensi 16 orang (23,8 %), dan Covid-19 16 orang (23,8%).

Pada saat ini meningkatnya pelayanan kesehatan bagi Ibu dan anak ditandai dengan menurunnya Indikator Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA). AKI secara Nasional sudah jauh menurun yaitu dari 346 kematian per 100.000 KH pada target RPJMN 2020 – 2024 menjadi 217 kematian per 100.000 KH pada tahun 2021.

Pemerintah Daerah terus berupaya melakukan pelayanan terhadap ibu hamil ataupun ibu bersalin dan nifas guna menekan jumlah kematian ibu, antara lain mendorong ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan rutin kehamilannya serta meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan melalui pemenuhan tenaga kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak serta peningkatan kemampuan tenaga kesehatan yang membantu proses melahirkan. Bila dilihat dari data cakupan penolong persalinan, masyarakat di Provinsi Jambi lebih banyak memilih bidan sebagai penolong persalinan, serta penggunaan tenaga dukun pada posisi kedua dan dokter kandungan pada posisi ketiga.

Jika melihat preferensi ini, maka perlu peningkatan pengetahuan kepada tenaga kesehatan seperti bidan di Provinsi Jambi serta pelatihan bagi dukun-dukun beranak yang ada agar dapat menolong proses persalinan dengan aman dan selamat.

Selain AKI, situasi derajat kesehatan digambarkan pula oleh Angka Kematian Bayi (AKB). Angka Kematian Bayi (AKB) atau *Infant Mortality Rate* (IMR) dapat didefinisikan sebagai banyaknya bayi meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka kematian bayi (*Infant Mortality Rate*) merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum. Angka ini sangat sensitif terhadap perubahan tingkat kesejahteraan dan kesehatan, dimana dapat didefinisikan sebagai kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu bulan.

Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Jambi yang digunakan adalah data SDKI yang dirilis setiap 5 tahun sekali, dan data terakhir yang dirilis adalah hasil SDKI 2017 yang baru saja dirilis. Berdasarkan data SDKI 2017, terlihat bahwa telah terjadi kecenderungan penurunan AKB di Provinsi Jambi dari 34 kematian per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2012 menjadi 24 kematian per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2017. Penurunan ini cukup mengembirakan dan menggambarkan keberhasilan Pemerintah Provinsi Jambi dalam menurunkan angka tersebut.

Tabel 3.12. Jumlah Kematian Bayi di Provinsi Jambi Tahun 2016-2021

| No. | KABUPATEN/KOTA | TAHUN | | | | | |
|-----------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Kerinci | 43 | 42 | 42 | 49 | 34 | 16 |
| 2. | Merangin | 25 | 35 | 35 | 32 | 25 | 46 |
| 3. | Sarolangun | 22 | 21 | 21 | 23 | 35 | 18 |
| 4. | Batang Hari | 19 | 25 | 25 | 29 | 36 | 17 |
| 5. | Bungo | 15 | 12 | 12 | 21 | 20 | 33 |
| 6. | Tebo | 16 | 11 | 11 | 13 | 29 | 23 |
| 7. | Muaro Jambi | 13 | 35 | 35 | 33 | 19 | 32 |
| 8. | Tanjab Barat | 44 | 38 | 38 | 52 | 31 | 40 |
| 9. | Tanjab Timur | 10 | 32 | 32 | 26 | 16 | 16 |
| 10. | Kota Jambi | 12 | 4 | 4 | 8 | 19 | 8 |
| 11. | Kota Sei Penuh | 20 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| Provinsi | | 273 | 239 | 261 | 290 | 264 | 251 |

Pada tabel diatas dapat di lihat pada tahun 2021 jumlah kematian bayi sebanyak 251 orang tertinggi terdapat terdapat pada kabupaten Merangin 46 orang dan kabupaten sarolangun Tanjung Jabung Barat 40 orang, kabupaten Bungo 33 orang. Sedangkan yang terendah pada kota Sungai Penuh 2 orang

Dilihat dari jumlah kematian neonatal 0-6 hari meninggal 221 bayi, bayi yang berumur 7-28 hari jumlah kematiannya sebanyak 35 bayi, sedangkan yang berumur 0-28 hari jumlah kematiannya sebanyak 256 bayi. Penyebab kematian terbanyak BBLR 77 bayi dan asfiksia sebesar 83 bayi, infeksi 3 bayi, kongenital 29 bayi, covid 2 bayi, lain-lain 59 bayi.

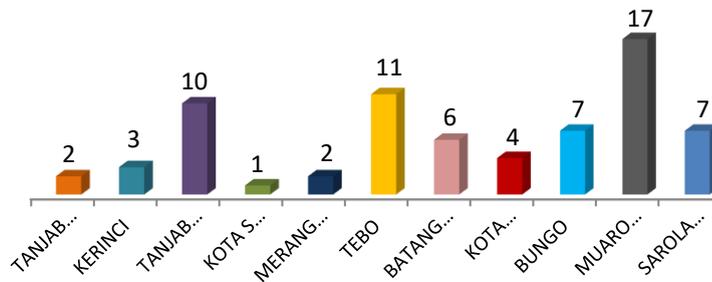
Upaya kesehatan yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi di Provinsi Jambi sudah cukup banyak, diantaranya adalah PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) di puskesmas-puskesmas yang ada di Provinsi Jambi dan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) 24 Jam pada rumah sakit milik pemerintah daerah (RSUD). Dari 13 RSUD yang ada di Provinsi Jambi, 11 diantaranya telah melaksanakan PONEK 24 jam. Faktor penyebab 2 RSUD yang belum melaksanakan PONEK 24 jam tersebut adalah tenaga dokter spesialis kandungan dan anak yang bekerja masih separuh waktu sehingga pelayanan PONEK belum optimal.

Selain itu dilakukan pula imunisasi yang merupakan kegiatan rutin dan terintegrasi dalam pelayanan dasar di Puskesmas, Rumah Sakit dan unit-unit pelayanan lainnya termasuk di pos pelayanan terpadu (Posyandu). Imunisasi juga telah memberikan kontribusi dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian pada bayi khususnya yang disebabkan oleh penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti difteri, pertusis, tetanus neonatorum, polio dan penyakit campak. Hal tersebut akan lebih cepat tercapai apabila cakupan imunisasi rutin dapat dipertahankan tetap tinggi setiap tahun dan merata sampai ketinggian desa/kelurahan (UCI Desa).

Dalam rangka perbaikan gizi masyarakat sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 bertujuan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Jambi antara lain melaksanakan perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi dan peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi dan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi.

Berdasarkan data hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesmas) tahun 2013, prevalensi pendek pada balita mencapai 37,9 persen. Setelah dilaksanakan upaya-upaya penurunan prevalensi tersebut, maka telah terjadi penurunan terhadap Prevalensi pendek pada anak balita menjadi 30,7 persen pada tahun 2018 (Riskesmas 2018). Hal ini membuktikan bahwa telah berhasil menurunkan prevalensi sebesar 19 persen dalam kurun 5 tahun tersebut.

Diagram 3.4. Jumlah Kasus Gizi buruk pada Balita di Provinsi Jambi



Sumber: Riskesmas 2013 dan 2018, Dinkes, 2021

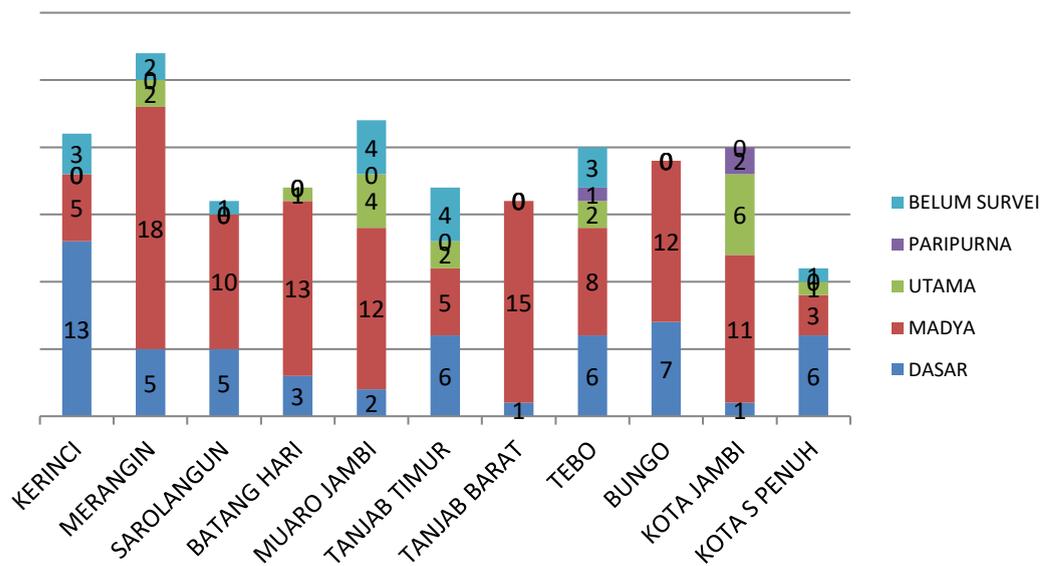
Pada diagram di atas dapat dilihat jumlah kasus gizi buruk di Provinsi Jambi berdasarkan by name by address, jumlah kasus gizi buruk di Provinsi Jambi sebanyak 70 kasus, kasus terbanyak di Kab. Muaro Jambi sebesar 17 kasus, Kab. Tebo sebesar 11 kasus dan Kab. Batanghari sebesar 6 kasus, kasus gizi buruk meninggal ada di Kab. Muaro Jambi 1 orang, kab. Sarolangun 1 orang dan kab. Tanjab Barat 1 orang.

Kab/Kota yang mengirimkan kasus gizi buruk lebih banyak hal ini disebabkan karena surveilans pelacakan kasus gizi buruk berjalan dengan baik, semakin banyak penemuan kasus harapan kita semakin banyak anak yang bisa di intervensi, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi memberikan bantuan makanan pangan lokus untuk anak gizi buruk sebanyak 5 kasus dengan hari makan sebanyak 90 hari @ Rp. 20.000,- sehari makan

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi untuk menurunkan angka ini melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik ditujukan kepada ibu hamil, ibu menyusui, serta bayi dan balita. Bentuk intervensi yang diberikan antara lain adalah pemberian suplemen kepada ibu hamil, pemberian asi eksklusif, pemanatauan pertumbuhan bayi dan balita serta pemberian suplemen vitamin A berwarna merah diberikan 2 kali dalam setahun. Khusus pada balita yang tergolong kurus, semua atau 100% telah mendapat makanan tambahan di provinsi Jambi pada tahun 2021.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan secara umum di Provinsi Jambi, maka Pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong kabupaten/ kota untuk memiliki puskesmas terakreditasi. Dari 206 puskesmas yang ada, sampai dengan tahun 2021 telah terakreditasi 188 puskesmas dengan sebagian besar klasifikasi akreditasinya adalah Madya sebanyak 112 puskesmas (59,5%), dan Dasar sebanyak 55 Puskesmas (29,2%). Selanjutnya klasifikasi utama sebanyak 18 puskesmas (9,5%), dan klasifikasi paripurna 3 puskesmas (1,5%). Puskesmas dengan klasifikasi Paripurna terdapat di Kota Jambi sebanyak 2 Puskesmas, Kabupaten Tebo sebanyak 1 Puskesmas.

Diagram 3.5. Persentase akreditasi puskesmas di Provinsi Jambi Tahun 2021



Dimensi Pendidikan

Setelah melihat dimensi pertama pembentuk IPM yaitu umur panjang dan hidup sehat, berikut akan dicermati tentang dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Definisi umum pendidikan dapat diartikan sebagai suatu metode untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan dan sikap-sikap yang diharapkan dapat membuat seseorang menjadi lebih baik. Pendidikan bisa dijadikan sebagai suatu langkah untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan keluar dari segala bentuk kebodohan dan kemiskinan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, diharapkan akan semakin cerdas, semakin kreatif dan dapat menikmati kehidupan yang lebih baik.

Dalam hal ini, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (RLS/Mean Years of Schooling) dan harapan lama sekolah (HLS/Expected Years of Schooling). Rata-rata lama sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.

Indikator Pendidikan Meningkat

Secara umum rata-rata lama sekolah penduduk di Provinsi Jambi, menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Lampiran 3). Pada tahun 2021, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Provinsi Jambi telah mencapai angka 8,60 tahun atau setara dengan kelas IX (kelas III SMP).

Selama dekade terakhir, pertumbuhan tertinggi rata-rata lama sekolah terjadi pada tahun 2019 sebesar 2,67 persen yaitu dari 8,23 tahun pada tahun 2018 menjadi 8,45 tahun pada tahun 2019. Pertumbuhan tinggi pada rata-rata lama sekolah mengindikasikan penduduk suatu daerah memiliki motivasi dalam menjalani pendidikan formal. Sementara itu, pertumbuhan rata-rata lama sekolah terendah dalam kurun waktu 2012-2021 terjadi pada tahun 2015, hanya sekitar 0,51 persen yaitu dari 7,92 tahun pada tahun 2014 menjadi 7,96 tahun pada tahun 2015. Terlihat bahwa rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas pada tahun 2012 masih 7,69 tahun atau setara dengan kelas VIII (kelas II SMP), naik menjadi 8,07 tahun atau setara kelas IX (kelas III SMP) pada tahun 2016.

Lompatan angka rata-rata lama sekolah ini menunjukkan kesadaran masyarakat Provinsi Jambi akan pentingnya pendidikan cukup tinggi. Sedangkan pertumbuhan rata-rata lama sekolah dari tahun 2020-2021 hanya mencapai 0,58 persen, melambat dibandingkan tahun 2020 yang mencapai pertumbuhan 1,18 persen. Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator output pendidikan yang cukup penting dan mempengaruhi kualitas pembangunan manusia.

Tabel 3.13. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota (Tahun), 2012-2021

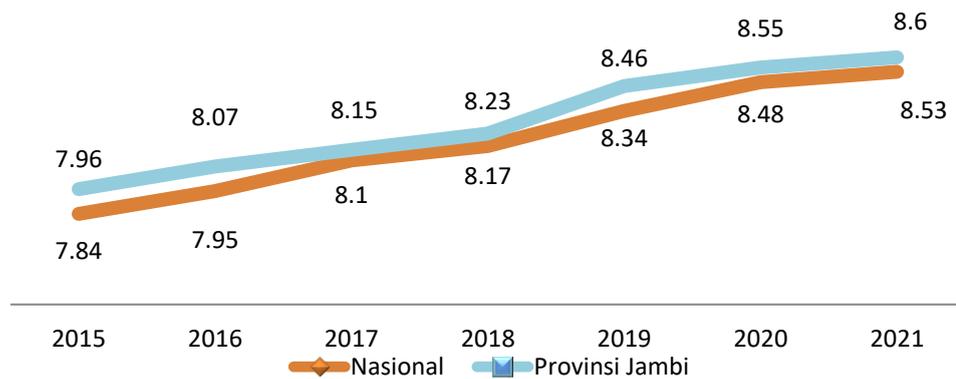
| No. | Kabupaten/Kota | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 01 | Kerinci | 7,36 | 7,71 | 7,77 | 7,78 | 8,06 | 8,19 | 8,20 | 8,21 | 8,55 | 8,56 |
| 02 | Merangin | 6,89 | 7,00 | 7,04 | 7,08 | 7,44 | 7,62 | 7,67 | 7,68 | 7,76 | 7,90 |
| 03 | Sarolangun | 6,93 | 7,12 | 7,23 | 7,24 | 7,34 | 7,47 | 7,63 | 7,76 | 7,87 | 8,04 |
| 04 | Batang Hari | 7,38 | 7,41 | 7,43 | 7,44 | 7,69 | 7,77 | 7,82 | 7,85 | 8,11 | 8,12 |
| 05 | Muaro Jambi | 7,50 | 7,56 | 7,68 | 8,01 | 8,02 | 8,08 | 8,09 | 8,33 | 8,57 | 8,58 |
| 06 | Tanjung Jabung Timur | 5,57 | 5,90 | 5,93 | 6,26 | 6,32 | 6,33 | 6,34 | 6,35 | 6,70 | 6,92 |
| 07 | Tanjung Jabung Barat | 7,00 | 7,24 | 7,28 | 7,37 | 7,43 | 7,44 | 7,56 | 7,70 | 7,71 | 8,00 |
| 08 | Tebo | 6,98 | 7,27 | 7,48 | 7,53 | 7,54 | 7,55 | 7,56 | 7,57 | 7,58 | 7,59 |
| 09 | Bungo | 7,82 | 7,85 | 7,86 | 7,87 | 7,99 | 8,08 | 8,09 | 8,15 | 8,27 | 8,28 |
| 71 | Kota Jambi | 10,30 | 10,55 | 10,62 | 10,63 | 10,65 | 10,66 | 10,67 | 10,91 | 10,92 | 11,20 |
| 72 | Kota Sungai Penuh | 8,90 | 8,97 | 9,05 | 9,17 | 9,33 | 9,55 | 9,84 | 10,08 | 10,32 | 10,33 |
| | Jambi | 7,69 | 7,80 | 7,92 | 7,96 | 8,07 | 8,15 | 8,23 | 8,45 | 8,55 | 8,60 |

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2021

Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Provinsi Jambi pada tahun 2012 mencapai 7,69 tahun. Kondisi tersebut hampir stabil hingga berturut-turut rata-rata lama sekolah dari tahun 2012 hingga tahun 2015 hanya berkisar antara angka 7,69 tahun sampai dengan 7,96 tahun (setara kelas VIII).

Pada tahun 2016 perubahan rata-rata lama sekolah meningkat hingga level setara kelas IX (kelas III SMP), karena rata-rata lama sekolah naik hingga 8,07 tahun. Peningkatan ini tentu akan berpengaruh baik terhadap kualitas manusia Jambi maupun kemakmuran masyarakatnya.

Grafik 3.6. Trend Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jambi dibanding nasional tahun 2015-2021



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2021, data diolah

Semakin tinggi pendidikan akan membuka peluang mendapatkan kerja dan penghidupan yang lebih layak serta keluar dari kemiskinan. Hal ini mengindikasikan mulai kondusifnya masyarakat Provinsi Jambi dari segi pendidikan. Masyarakat yang berpendidikan tinggi akan membawa pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik sehingga mempermudah pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan masalah sosial lainnya

Diagram 3.6. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pertumbuhan RLS di Provinsi Jambi, 2012-2021



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2021

Indikator yang mewakili dimensi pendidikan berikutnya adalah harapan lama sekolah. Seperti halnya dengan keadaan rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah penduduk berusia tujuh tahun ke atas di Provinsi Jambi juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2012, harapan lama sekolah penduduk Provinsi Jambi tercatat sekitar 11,73 tahun yang berarti bahwa anak usia 7 tahun ke atas yang memasuki dunia pendidikan diharapkan dapat bersekolah hingga kelas XII SMA. Perubahan di Provinsi Jambi terjadi tahun 2021, angka harapan lama sekolah (HLS) bisa mencapai lebih dari 12 tahun (13,04 tahun) dengan laju pertumbuhan sebesar 0,46 persen.

Pada tahun 2012, harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas di Provinsi Jambi pertama kali menyentuh angka 12 tahun. Dengan kata lain, penduduk usia 7 tahun ke atas yang memasuki jenjang persekolahan diharapkan dapat bersekolah selama 12 tahun atau dapat menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA dan bisa mencapai jenjang pendidikan tinggi Diploma I. Peningkatan ini merupakan hal yang bagus bagi peningkatan kualitas pendidikan di Provinsi Jambi. Pendidikan merupakan bentuk investasi individu. Apabila pendidikan semakin tinggi maka kesejahteraan suatu individu akan meningkat dan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi suatu negara.

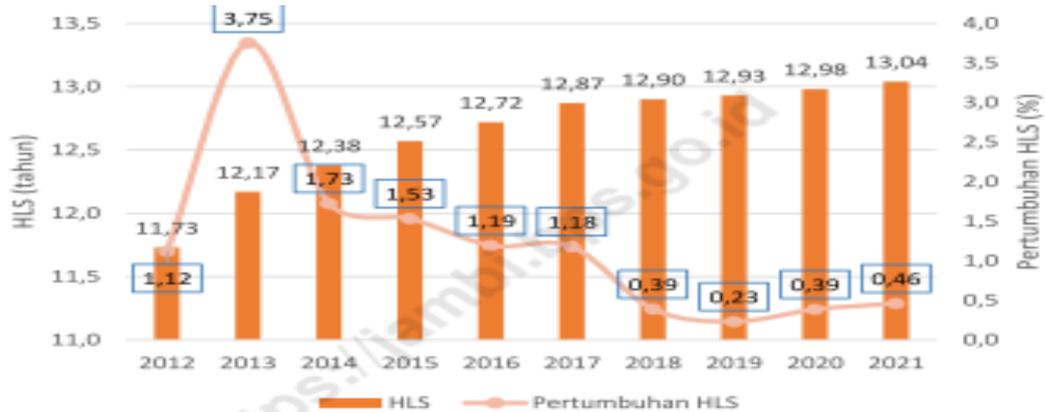
Tabel 3.14. Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota (Tahun), 2012-2021

| No. | Kabupaten/Kota | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 01 | Kerinci | 12,83 | 12,92 | 13,15 | 13,77 | 13,83 | 13,84 | 13,85 | 13,86 | 13,87 | 13,88 |
| 02 | Merangin | 10,91 | 11,14 | 11,38 | 11,83 | 11,87 | 11,95 | 11,97 | 11,98 | 11,99 | 12,04 |
| 03 | Sarolangun | 10,86 | 11,44 | 11,73 | 11,93 | 12,23 | 12,24 | 12,25 | 12,26 | 12,27 | 12,28 |
| 04 | Batang Hari | 12,22 | 12,40 | 12,69 | 12,69 | 12,88 | 12,89 | 12,90 | 12,91 | 12,92 | 12,93 |
| 05 | Muaro Jambi | 11,57 | 12,14 | 12,42 | 12,43 | 12,79 | 12,80 | 12,81 | 12,82 | 12,83 | 12,84 |
| 06 | Tanjung Jabung Timur | 10,57 | 10,65 | 10,73 | 11,28 | 11,48 | 11,80 | 11,85 | 12,01 | 12,16 | 12,17 |
| 07 | Tanjung Jabung Barat | 11,27 | 11,42 | 11,58 | 11,90 | 12,21 | 12,27 | 12,60 | 12,61 | 12,62 | 12,63 |
| 08 | Tebo | 11,36 | 11,44 | 11,70 | 11,97 | 12,36 | 12,37 | 12,38 | 12,39 | 12,60 | 12,64 |
| 09 | Bungo | 12,00 | 12,26 | 12,53 | 12,54 | 12,55 | 12,59 | 12,60 | 12,61 | 12,62 | 12,63 |
| 71 | Kota Jambi | 13,19 | 13,20 | 13,62 | 13,80 | 13,81 | 14,23 | 14,62 | 14,90 | 15,10 | 15,37 |
| 72 | Kota Sungai Penuh | 13,89 | 14,35 | 14,57 | 14,74 | 14,75 | 14,76 | 14,77 | 14,78 | 14,79 | 14,80 |
| | Jambi | 11,73 | 12,17 | 12,38 | 12,57 | 12,72 | 12,87 | 12,90 | 12,93 | 12,98 | 13,04 |

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2021

Tahun 2021, laju pertumbuhan harapan lama sekolah di Provinsi Jambi tidak mengalami perlambatan di tengah tekanan Pandemi Covid-19 meskipun hanya dapat tumbuh sebesar 0,46 persen dibandingkan dengan tahun 2020 (Gambar 5.2). Pada tahun 2019 laju pertumbuhan paling rendah selama 10 tahun terakhir (hanya mencapai 0,23 persen). Tingginya harapan lama sekolah merupakan salah satu indikator human capital (modal manusia) yang bagus untuk menggerakkan pembangunan. Modal manusia dapat dijadikan penentu utama daya saing dan pertumbuhan ekonomi.

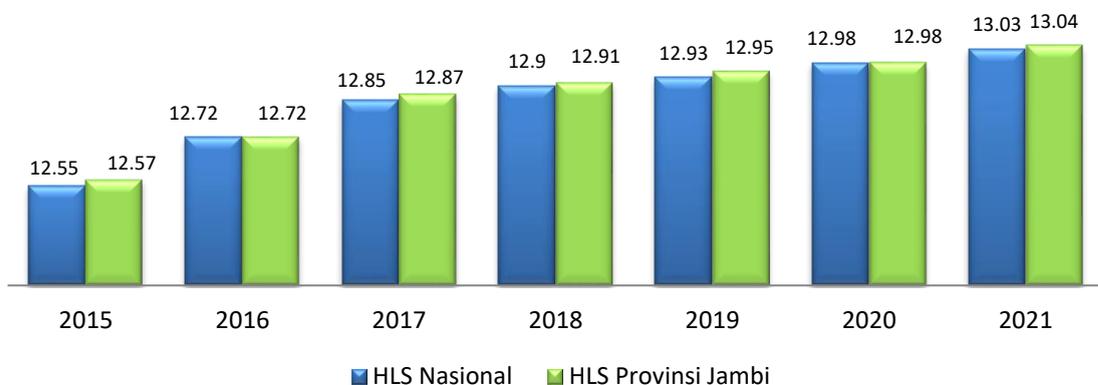
Diagram 3.7. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Pertumbuhan HLS di Provinsi Jambi, 2012-2021



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2021

Pada rentang 2015-2017 capaian HLS Provinsi Jambi selalu lebih tinggi dari nasional, namun dua tahun terakhir peningkatan HLS nasional lebih cepat dari Provinsi Jambi walaupun dengan selisih yang sangat kecil. Pada tahun 2019, anak-anak berusia 7 tahun di Provinsi Jambi memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,93 tahun atau hingga Diploma I, lebih lama 0,04 tahun dibandingkan tahun 2018 yang lalu.

Diagram 3.8. Harapan Lama Sekolah Provinsi Jambi dibanding Nasional tahun 2015-2021



Sumber : BPS, Data diolah, 2021

Indikator Pendidikan Kabupaten/Kota

Pada level kabupaten/kota kondisi dimensi pendidikan beragam, ada yang berada di atas Provinsi Jambi dan ada yang berada dibawahnya. Selama kurun waktu 2012-2021 seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan capaian rata-rata lama sekolah dengan angka yang bervariasi antar kabupaten/kota.

Dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi dapat diamati penduduk Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh merupakan kota dengan capaian rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas tertinggi. Pada tahun 2012 rata-rata lama sekolah Kota Jambi hanya mencapai 9,86 tahun, meningkat menjadi 10,30 pada tahun berikutnya.

Hingga tahun 2021, rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di Kota Jambi mencapai 11,20 tahun, artinya rata-rata lama sekolah penduduk 25 tahun ke atas di Kota Jambi mencapai 11,20 tahun atau setara dengan kelas XII (kelas III SMA). Sedangkan Kota Sungai Penuh pada tahun 2012 rata-rata lama sekolah masih berada pada angka 8,90 tahun. Setiap tahun Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan hingga pada tahun 2019 berhasil menembus angka rata-rata lama sekolah lebih dari 10 (tepatnya 10,08 tahun). Tahun 2021 rata-rata lama sekolah Kota Sungai Penuh 10,33 tahun, artinya penduduk 25 tahun ke atas di Kota Sungai Penuh mampu bersekolah hingga 10,92 tahun atau setara dengan kelas XI (kelas II SMA).

Fasilitas pendidikan yang lengkap, akses teknologi yang mudah, banyaknya guru yang mumpuni pada daerah perkotaan ditengarai menjadi penyebab rata-rata lama sekolah di Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh tinggi. Masyarakat Provinsi Jambi yang tinggal di wilayah perkotaan mempunyai pilihan untuk menentukan pendidikan mana yang akan ditempuh. Banyaknya sekolah, baik swasta atau negeri dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) berhasil menarik minat penduduk daerah perkotaan untuk melanjutkan pendidikan hingga level tertinggi. Sementara capaian rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas pada wilayah kabupaten di Provinsi Jambi belum sampai pada angka 9 tahun (Lampiran 3).

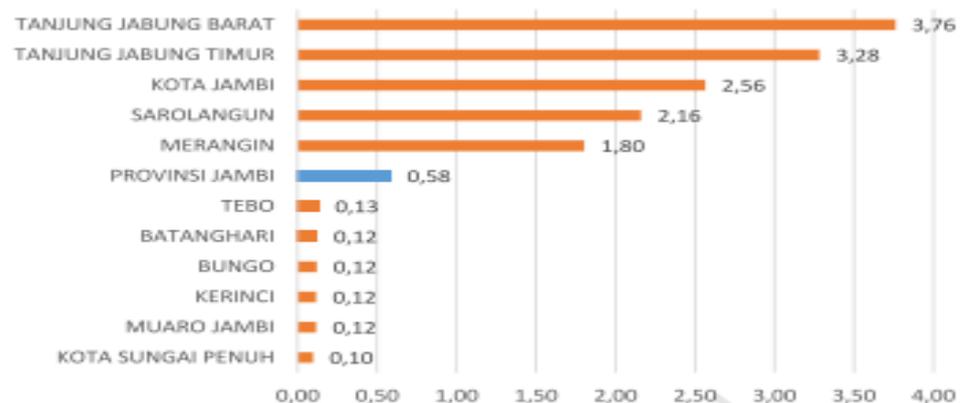
Dari sembilan kabupaten yang ada, rata-rata lama sekolah tertinggi pada tahun 2021 dicapai Kabupaten Muaro Jambi dengan angka sebesar 8,58 tahun atau setara dengan kelas IX (kelas III SMP). Kemudian pada posisi berikutnya adalah Kabupaten Kerinci dengan capaian rata-rata lama sekolah sebesar 8,56 tahun, disusul Kabupaten Bungo sebesar 8,28 tahun. Selanjutnya ada Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan rata-rata lama sekolah masing-masing sebesar 8,12 tahun, 8,04 tahun, dan 8,04 tahun. Sedangkan untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur, capaian rata-rata lama sekolah masih di bawah 7 tahun, yaitu 6,92 tahun.

Akses yang sulit dan sedikitnya pilihan sekolah di Tanjung Jabung Timur ditengarai menjadi penyebab rendahnya rata-rata lama sekolah disana. Hal tersebut pernah diangkat dalam penelitian di mana tempat tinggal dan jarak tempuh ke sekolah berpengaruh terhadap rata-rata lama sekolah (Ernawati, 2008). Dengan demikian pada tahun 2021 dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas tertinggi dicapai oleh Kota Jambi dan yang terendah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pertumbuhan rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas kabupaten/kota seluruh Provinsi Jambi juga terlihat beragam. Tahun 2021 pertumbuhan rata-rata lama sekolah tertinggi diraih oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu sebesar 3,76 persen.

Peningkatan rata-rata lama sekolah tertinggi kedua diraih oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan pertumbuhan sebesar 3,28 persen dari tahun 2020. Pada posisi ketiga dan keempat ada Kota Jambi dan Kabupaten Sarolangun yang pertumbuhan rata-rata lama sekolah penduduknya meningkat sebesar 2,56 persen dan 2,16 persen. Kabupaten Merangin menempati posisi kelima dengan pertumbuhan rata-rata lama sekolah sebesar 1,80 persen. Sementara untuk kabupaten/kota yang lain, pertumbuhan rata-rata lama sekolah pada tahun 2021 berada di bawah 0,2 persen.

Diagram 3.9. Pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2021 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2021

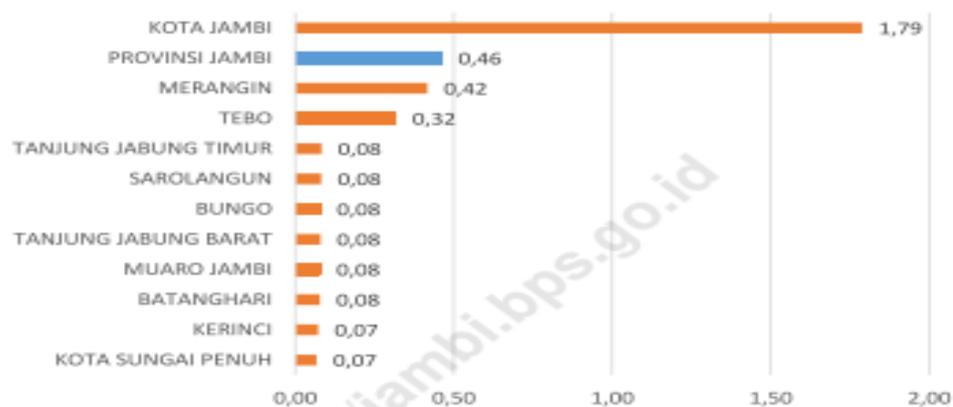
Selain rata-rata lama sekolah, indikator lain yang meningkat adalah harapan lama sekolah (HLS). Kabupaten/kota di Provinsi Jambi dengan capaian harapan lama sekolah (HLS) tertinggi pada tahun 2021 adalah Kota Jambi dengan angka harapan lama sekolah sebesar 15,37 tahun. Sedangkan angka harapan lama sekolah terendah tercatat di Kabupaten Merangin sebesar 12,04 tahun. Dari sebelas kabupaten/kota di Provinsi Jambi, ada dua kota dan satu kabupaten yang memiliki capaian harapan lama sekolah (HLS) lebih tinggi dari provinsi. Ketiga kabupaten/kota tersebut adalah Kota Jambi, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci.

Adanya perguruan tinggi negeri dan swasta pada ketiga wilayah tersebut mempengaruhi motivasi masyarakat Kota Jambi dan Kerinci untuk menyekolahkan anaknya hingga jenjang universitas. Kota Jambi mencapai harapan lama sekolah tertinggi (15,37 tahun), artinya anak yang berusia 7 tahun di Kota Jambi memiliki harapan untuk bersekolah hingga kelas 16 (setingkat Diploma IV/Strata 1). Pada posisi kedua ditempati Kota Sungai Penuh yang harapan lama sekolahnya mencapai 14,80 tahun. Selanjutnya Kabupaten Kerinci dengan harapan lama sekolah (HLS) hingga 13,88 tahun.

Adapun delapan kabupaten yang lain, capaian harapan lama sekolah pada tahun 2021 berada di bawah capaian provinsi. Harapan lama sekolah (HLS) pada tiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang melebihi angka 12 tahun menunjukkan peluang adanya perubahan peningkatan kualitas pendidikan masyarakatnya. Harapan lama sekolah juga dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan pada berbagai jenjang sekolah yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan akan dapat dicapai oleh setiap anak di suatu wilayah.

Untuk melihat kecepatan perkembangan harapan lama sekolah dapat diketahui dari pertumbuhan per tahun. Dari sebelas kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jambi, pada tahun 2021 Kota Jambi meraih pertumbuhan harapan lama sekolah tertinggi yakni sebesar 1,79 persen. Sedangkan Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci yang paling lambat laju pertumbuhannya (0,07 persen).

Diagram 3.10. Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2021 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2021

Rata-rata pertumbuhan harapan lama sekolah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada tahun 2021 mencapai 0,29 persen. Pada Tahun 2021 laju pertumbuhan harapan lama sekolah Kota Jambi tertinggi (1,79 persen) disusul oleh Kabupaten Merangin dan Kabupaten Tebo (0,42 persen dan 0,32 persen). Sementara itu, kabupaten lainnya tumbuh sekitar 0,07-0,08 persen. Pemerintah daerahnya banyak mendirikan fasilitas sekolah hingga level kecamatan. Sehingga memungkinkan masyarakatnya untuk memiliki peluang menyekolahkan anaknya hingga level kelas 13 (setara Diploma I).

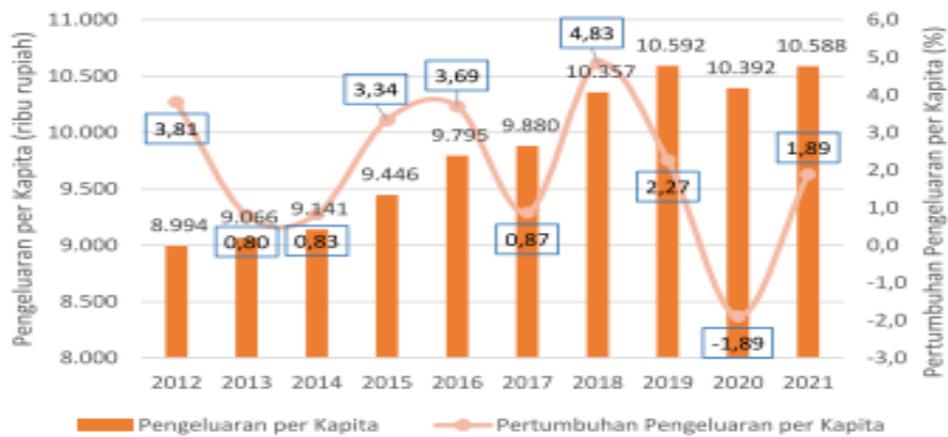
Dimensi Standar Hidup Layak

Kemajuan pembangunan ekonomi di suatu daerah akan berdampak pada tingkat kesejahteraan yang dinikmati masyarakat atau penduduknya. Semakin baik kinerja pembangunan ekonomi di suatu wilayah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan atau pengeluaran penduduknya. Dimensi standar hidup layak dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Standar Hidup Layak Terus Meningkat

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan di Provinsi Jambi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2012-2021, pengeluaran per kapita Provinsi Jambi mengalami peningkatan sekitar 1,64 juta rupiah (Lampiran 5). Jika pada tahun 2012 pengeluaran per kapita penduduk Jambi sekitar 8,94 juta rupiah per tahun, maka di tahun 2021 telah mencapai 10,59 juta per tahun atau sekitar 882 ribu rupiah per bulan.

Diagram 3.11. Pengeluaran per Kapita dan Pertumbuhannya di Provinsi Jambi (Ribu Rupiah/Kapita/Tahun), 2012-2021



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2021

Selama sepuluh tahun terakhir, pengeluaran per kapita per tahun penduduk Jambi terus tumbuh setiap tahunnya. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 4,83 persen atau bertambah sekitar 477 ribu rupiah, yaitu dari 9,88 juta pada tahun 2017 menjadi 10,36 juta pada tahun 2018. Sedangkan peningkatan terkecil dialami pada tahun 2013 dengan pertumbuhan sekitar 0,80 persen atau hanya bertambah sekitar 72 ribu rupiah selama tahun 2012-2013. Penurunan terjadi pada tahun 2020, dimana laju pertumbuhannya terkontraksi hingga 1,89 persen. Pengeluaran perkapita tahun 2020 hanya mencapai 10,39 juta atau berkurang 200 ribu rupiah dibanding tahun sebelumnya.

Grafik 3.5 Trend Pengeluaran per kapita Provinsi Jambi dibanding Nasional Tahun 2015-2021



Sumber: BPS, 2021, data diolah

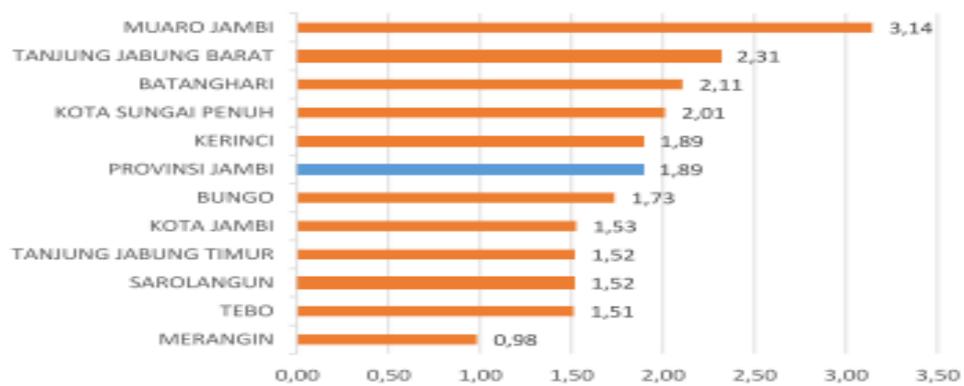
Keadaan Kabupaten/Kota Makin Membaik

Dari sebelas kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, Kota Jambi tercatat sebagai kota dengan pengeluaran per kapita tertinggi dan yang terendah adalah Kabupaten Muaro Jambi. Pada tahun 2012 pengeluaran per kapita per tahun Kota Jambi tercatat sekitar 10,08 juta rupiah, dan pada tahun 2021 bertambah sekitar 2,17 juta rupiah menjadi 12,24 juta rupiah. Pengeluaran per kapita perbulan penduduk Kota Jambi pada tahun 2012 sekitar 839 ribu rupiah, meningkat menjadi 1,02 juta rupiah di tahun 2021. Sementara itu, Kabupaten Muaro Jambi dengan pengeluaran per kapita per tahun terendah hanya mencapai pengeluaran per kapita sebesar 8,83 juta rupiah pada tahun 2021 atau sekitar 735,42 ribu rupiah per kapita per bulan.

Pengeluaran per kapita terbesar kedua pada tahun 2021 diraih Kabupaten Sarolangun dengan pengeluaran per kapita sebesar 11,79 juta rupiah per tahun atau sekitar 982,67 ribu rupiah per bulan. Selanjutnya pada posisi ketiga ditempati Kabupaten Bungo dengan pengeluaran per kapita per tahun

sebesar 11,67 juta rupiah atau sekitar 972,50 ribu rupiah per bulan. Untuk delapan kabupaten/kota yang lain, terlihat pengeluaran per kapita per tahun penduduknya berkisar antara 8,83 sampai dengan 10,55 juta rupiah. Bila dibandingkan dengan pengeluaran per kapita per tahun penduduk Jambi secara umum, ada 3 kabupaten/kota yang pengeluaran per kapita per tahunnya lebih tinggi dari pengeluaran per kapita Provinsi Jambi pada Tahun 2021. Kabupaten/kota dimaksud adalah Kota Jambi, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Bungo.

Diagram 3.12. Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2021 (Persen)



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2021

Laju pertumbuhan pengeluaran per kapita per tahun penduduk kabupaten/kota tahun 2021 rata-rata mengalami pertumbuhan sekitar 1,84 persen (Gambar 6.2). Pertumbuhan terendah di Kabupaten Merangin sebesar 0,98 persen. Sementara yang paling tinggi pertumbuhannya adalah Kabupaten Muaro Jambi (3,14 persen). Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Batang Hari, dan Kota Sungai Penuh juga tumbuh di atas dua persen. Sisanya (6 kabupaten) laju pertumbuhan pengeluaran per kapitanya berkisar pada 1,51 sampai 1,89 persen.

Capaian kinerja Indeks Pembangunan Manusia tidak terlepas dari upaya-upaya peningkatan ketiga dimensi di atas. Adapun program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung upaya tersebut pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Upaya Kesehatan Perorangan
3. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
4. Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan
5. Program Peningkatan Balai Kesehatan Provinsi Jambi
6. Program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan
7. Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
9. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
11. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
12. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
13. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
14. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
15. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga
16. Program peningkatan sarana dan Prasarana olahraga dan pemuda
17. Program Kesehatan Ibu dan Anak
18. Program kesehatan anak balita
19. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
20. Program Pendidikan SMA
21. Program Pendidikan SMK
22. Program BOS
23. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Permasalahan :

1. Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk di Provinsi Jambi berdasarkan indikator Indonesia Sehat telah memenuhi standar minimal namun belum tersebar merata sesuai kebutuhan pada masing-masing kabupaten/ kota se-Provinsi Jambi.
2. Pola pengasuhan (perawatan, pemberian makanan dan lain-lain) anak balita yang berkembang di masyarakat masih dilakukan sesuai dengan kebiasaan turun-temurun yang kadangkala belum sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan.
3. Kesenjangan kemampuan siswa yang cukup tinggi di seluruh Kabupaten/ kota se- Provinsi Jambi serta kepercayaan diri siswa untuk bersaing dengan siswa lainnya secara nasional masih harus terus didorong.
4. Kesenjangan kualitas sekolah menengah masih cukup tinggi

Solusi :

1. Standarisasi pelayanan kesehatan di Provinsi Jambi
2. Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan untuk memenuhi kekurangan tenaga kesehatan di wilayah terpencil.
3. Pemberdayaan posyandu dan puskesmas serta tenaga kesehatan untuk terus mengintensifkan penyuluhan kepada para orang tua agar menerapkan cara hidup sehat khusus balita seperti pemeriksaan kesehatan anak balita secara berkala, menjaga kebersihan anak, perawatan gigi, perbaikan gizi/ pola pemberian makan anak, kesehatan lingkungan, perawatan anak saat sakit, menjauhkan anak dari bahaya, menstimulasi perkembangan anak, imunisasi dan upaya pencegahan penyakit, pemberian vitamin A dan identifikasi tanda kelainan dan penyakit yang mungkin timbul pada bayi dan cara menanggulangnya.
4. Bimbingan teknis dan pendampingan secara berkelanjutan pada puskesmas dan jaringannya sehingga integrasi program gizi dan kesehatan ibu dan anak dapat berjalan optimal dan dilaporkan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang telah ditetapkan.
5. Perbaikan sarana-prasarana sekolah, peningkatan kapasitas guru sekolah menengah, uji coba kompetisi tingkat nasional dan internasional serta pemberian motivasi kepada siswa-siswa SMA dan SMK harus terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas lulusannya.
6. Pemberian beasiswa di seluruh jenjang pendidikan.



Sasaran 3

Meningkatnya Kapabilitas dan Partisipasi Perempuan di Berbagai Bidang Kehidupan

Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah secara resmi telah menganut dan menetapkan kesepakatan atas persamaan antara perempuan dan laki-laki sebagaimana termuat dalam UUD 1945 Pasal 27. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia perempuan dipandang sebagai penyebab kurang terbukanya akses perempuan dalam hal perbaikan sumber daya. Sehingga, kaum perempuan tidak dapat bersaing dengan kaum laki-laki di dalam pembangunan. Hal ini tentu saja menghambat kemajuan perempuan yang juga menghambat terwujudnya masyarakat adil dan sejahtera secara umum.

Dalam SDGs, isu gender masih menjadi salah satu agenda pembangunan. Adapun tujuan pembangunan gender yang ingin dicapai adalah kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan dengan target pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap individu khususnya perempuan dan anak; pengakhiran diskriminasi dan kesenjangan dalam pelayanan publik, penegakan hukum, akses terhadap keadilan dan partisipasi dalam kehidupan politik dan ekonomi berbasis gender; serta kesehatan seksual dan reproduksi dengan semua hak-haknya.

Dalam rangka mendukung target SDGs tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi menjadikan peningkatan kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan sebagai salah satu sasaran strategis yang ingin dicapai. Indikator yang digunakan untuk menunjukkan capaian sasaran strategis ini adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang capaiannya pada tahun 2021 adalah sebesar 67,01.

Tabel 3.15. Capaian Indeks Pemberdayaan Gender sebagai Indikator Sasaran Meningkatnya Kapabilitas dan Partisipasi Perempuan di Berbagai Bidang Kehidupan

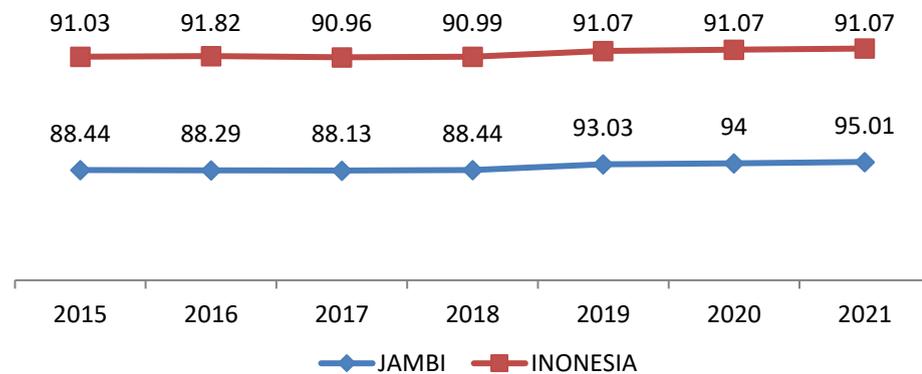
| Indikator Kinerja | Kondisi Awal (2015) | 2020 | 2021* | | | Realisasi Akhir RPJMD 2021 |
|----------------------------------|---------------------|-------|--------|-----------|-----------|----------------------------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | |
| Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 61,93 | 66,01 | 67,01 | 67,01 | 100 | 67,01 |

Sumber: BPS, DP3AP2, 2021

Gender dapat diartikan sebagai aspek hubungan sosial yang dikaitkan dengan diferensiasi seksual pada manusia. Pembangunan manusia berbasis gender merupakan salah satu indikator yang menjadi perhatian dunia karena perempuan seringkali mengalami diskriminasi seperti dijadikan objek eksploitasi, mengalami kekerasan, subordinasi, dan adanya upaya marginalisasi perempuan. Perempuan merupakan faktor penting dalam pembangunan. Hal ini mengingat dari sisi jumlah penduduk, perempuan menempati jumlah yang lebih besar dibanding laki-laki. Meski demikian, pembangunan yang dilaksanakan selama ini seringkali masih menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dan cenderung menguntungkan laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari nilai IPG yang lebih rendah dari IPM.

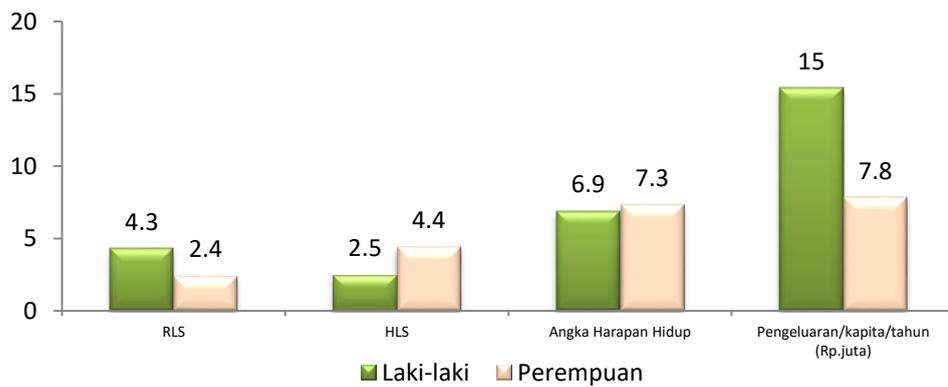
Indeks Pembangunan gender (IPG) yang merupakan turunan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), merupakan salah satu ukuran pencapaian pembangunan gender. Melalui angka IPG, kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan mampu dijelaskan dengan melihat rasio antara IPM perempuan dengan laki-laki. Semakin tinggi rasionya (mendekati 100) maka semakin rendah gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, demikian pula sebaliknya.

Grafik 3.8. Trend Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Provinsi Jambi dibanding nasional tahun 2015-2021



Sumber : DP3AP2, 2021

Diagram 3.13. Capaian Komponen IPG Provinsi Jambi Tahun 2021



Sumber: BPS, 2021

Di samping IPG, indikator kesetaraan gender lainnya yang bersifat makro dan menunjukkan capaian dalam upaya meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG merupakan indikator untuk melihat peranan perempuan dalam ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. IDG merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan partisipasi perempuan di parlemen, perempuan dalam angkatan kerja, perempuan pekerja profesional, pejabat tinggi, dan manajer, serta upah pekerja perempuan di sektor non-pertanian.

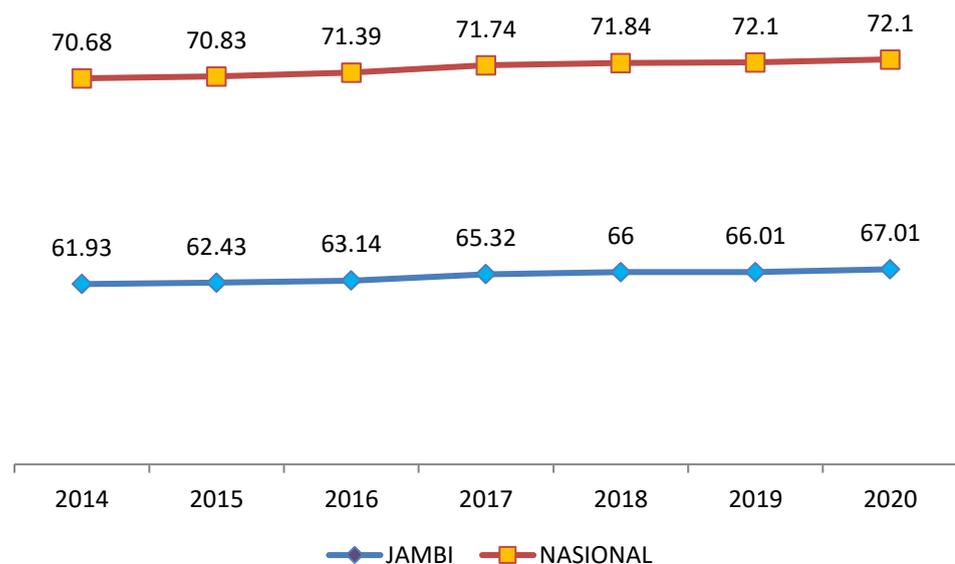


Sama halnya dengan IPG, penghitungan IDG juga dilakukan setiap tahun dan data yang dikeluarkan pada tahun bersangkutan menggambarkan kondisi tahun sebelumnya. IDG Provinsi Jambi yang dirilis pada tahun 2021 adalah 67,01 atau mencapai target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian sebesar 100% atau masuk dalam kategori **sangat tinggi**. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaian kinerja sampai dengan tahun 2021 juga masuk dalam kategori sangat tinggi dengan tingkat capaian 100%.

Capaian IDG Provinsi Jambi tersebut, masih berada di bawah capaian nasional dengan tren meningkat lebih cepat dari nasional. Bila digambarkan dalam diagram pengelompokan capaian IPM dan IDG, maka Provinsi Jambi masuk dalam kuadran 3 yaitu provinsi dengan IPM dan IDG di bawah rata-rata nasional. Dari 3 komponen pembentuk IDG, yaitu keterlibatan perempuan di Parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan; komponen dengan nilai terendah adalah keterlibatan perempuan di parlemen, disusul oleh komponen sumbangan pendapatan perempuan.

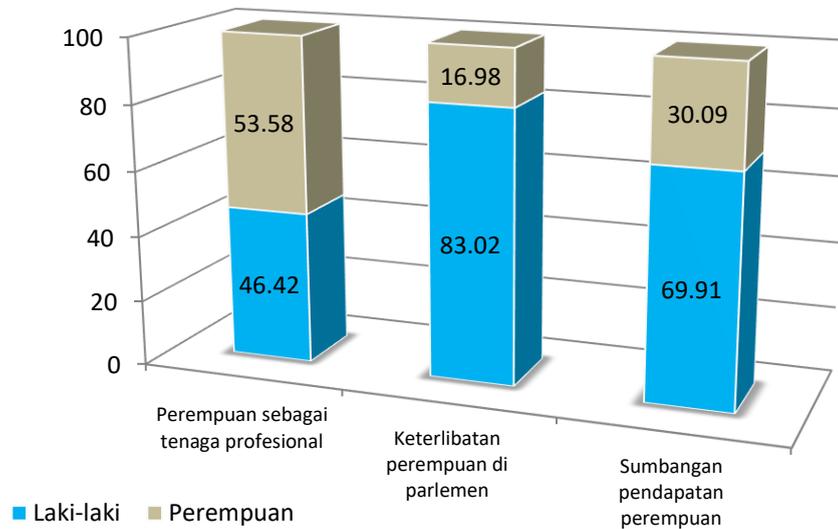
Hal ini mengindikasikan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen di Provinsi Jambi masih jauh dari harapan dan pendapatan perempuan masih jauh di bawah laki-laki. Namun pada komponen perempuan sebagai tenaga profesional terlihat bahwa persentase perempuan lebih besar daripada laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai perempuan di Provinsi Jambi sudah diperhitungkan dalam hal pekerjaan-pekerjaan yang menuntut profesionalitas.

Grafik 3.9. Trend Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Jambi Tahun 2014-2021



Sumber: DP3AP2, 2021

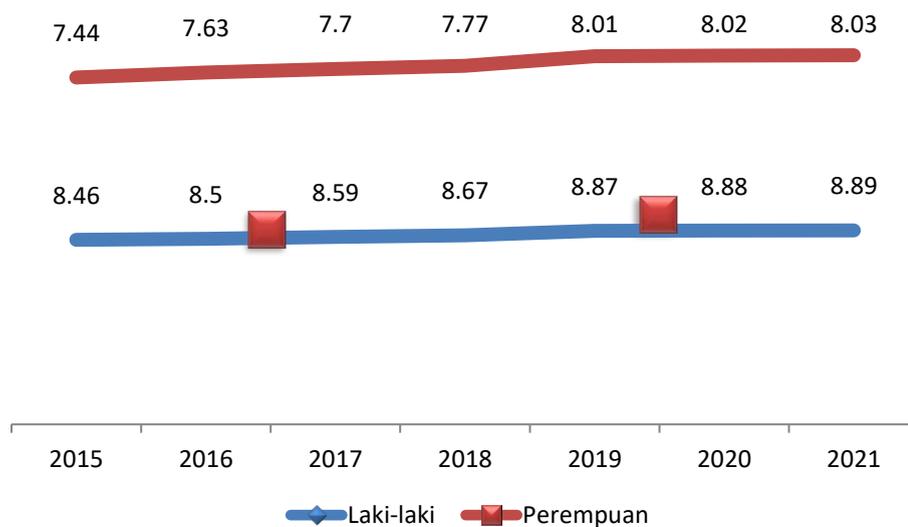
Diagram 3.14. Capaian Komponen Pembentuk IDG Provinsi Jambi Tahun 2021*



Sumber: BPS, 2021*

Keterlibatan perempuan sebagai tenaga profesional berhubungan erat dengan akses perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Berdasarkan Jambi Dalam Angka tahun 2021, akses perempuan dalam hal pendidikan di Provinsi Jambi menunjukkan perkembangan yang baik. Hal ini terlihat dari rata-rata lama sekolah perempuan yang terus meningkat, walaupun masih dibawah rata-rata lama sekolah laki-laki.

Grafik 3.10. Trend Rata-rata lama sekolah berdasarkan jenis kelamin di Provinsi Jambi



Sumber: BPS 2021

Sebagai upaya untuk meningkatkan IDG ini maka Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan melakukan beberapa kegiatan pendukung, yaitu Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A), pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan Keadilan Gender, Pembinaan Penilaian Perusahaan Pembina Terbaik Tenaga Kerja Perempuan dan Pembinaan Organisasi Perempuan. Program ini secara parsial didukung pula oleh beberapa program lain seperti program perwujudan demokrasi makin kokoh dan lain-lain.

Permasalahan :

Capaian IDG Provinsi Jambi masih dibawah rata-rata nasional akibat

1. Terbatasnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Provinsi Jambi sehingga menyebabkan rendahnya keterlibatan perempuan di parlemen.
2. Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan.
3. Blum optimalnya kerjasama dengan lembaga uang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan.
4. Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan percepatan pencapaian kinerja.

Solusi :

1. Perluasan akses pendidikan bagi perempuan
2. Perluasan akses bagi perempuan sebagaimana halnya laki-laki dengan pemberian hak dan kewajiban yang sama antar keduanya.



Sasaran 4

Terwujudnya Ketertiban Umum Daerah

Penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen).

Dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dilakukan beberapa langkah preventif dengan menjaga kerukunan umat beragama serta pemetaan potensi konflik dan pencegahan terjadinya konflik, dan lain-lain. Adapun indikator yang digunakan untuk menggambarkan capaian sasaran strategis ini adalah Indeks Demokrasi Indonesia, dengan capaian tahun 2020 sebagaimana tergambar di bawah ini.

Tabel 3.16. Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jambi sebagai Indikator Sasaran Terwujudnya Ketertiban Umum Daerah

| Indikator Kinerja | Kondisi Awal (2015) | 2020 | 2021 | | | Realisasi Akhir RPJMD 2021 |
|---|---------------------|-------|--------|-----------|-----------|----------------------------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | |
| Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jambi | 70,68 | 69,76 | 78 | 75,53 | 96,83 | 75,53 |

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dihitung dari 3 aspek, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi. Kebebasan sipil meliputi kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berkeyakinan serta kebebasan dari diskriminasi. Aspek hak-hak politik dilihat dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, sedangkan aspek lembaga demokrasi dilihat dari Pemilu, peran DPRD, peran Parpol, peran birokrasi dan peran peradilan yang independen.

IDI Provinsi Jambi tahun 2021 (capaian tahun 2020) mencapai angka 75,53 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan angka IDI 2019 yang sebesar 69,76. Capaian kinerja demokrasi Provinsi Jambi tersebut masih berada pada kategori “sedang”. Perubahan angka tersebut menunjukkan tingkat demokrasi Jambi masih termasuk dalam kategori “sedang”. Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60-80), dan “buruk” (indeks < 60).

IDI Provinsi Jambi dari 2019-2020 dipengaruhi oleh kenaikan aspek Kebebasan Sipil yang sebesar 6,04 poin (dari 76,67 menjadi 82,71), penurunan aspek Hak-Hak Politik sebesar 1,65 poin (dari 64,63 menjadi 62,98), dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 17,24 poin (dari 69,21 menjadi 86,45).

Tabel 3.17. Perkembangan Indeks Aspek IDI Jambi, 2019-2020

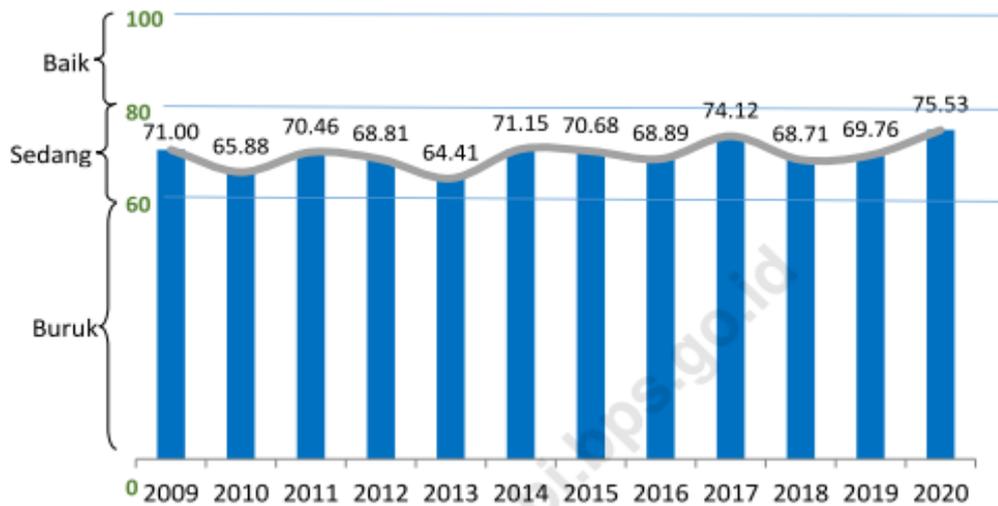
| No | Nama Variabel | 2019 | 2020 | Selisih |
|----|-------------------------|-------|-------|---------|
| 1 | Aspek Kebebasan Sipil | 76.67 | 82.71 | 6.04 |
| 2 | Aspek Hak-Hak Politik | 64.63 | 62.98 | -1.65 |
| 3 | Aspek Lembaga Demokrasi | 69.21 | 86.45 | 17.24 |

Sumber : BRS IDI Provinsi Jambi 2020, 2021

PERKEMBANGAN IDI

Capaian IDI dari tahun 2009 hingga 2020 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI hanya sebesar 71,00. Angka ini terus mengalami perubahan hingga mencapai momen terendahnya pada tahun 2013 sebesar 64,41; dan kembali berfluktuasi serta pada akhirnya mengalami perubahan tertinggi pada tahun 2020 sebesar 75,53. Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Provinsi Jambi. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (*evidence-based*) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.

Diagram 3.15. Perkembangan IDI Jambi, 2009-2020



Sumber : BRS IDI Provinsi Jambi 2020, 2021

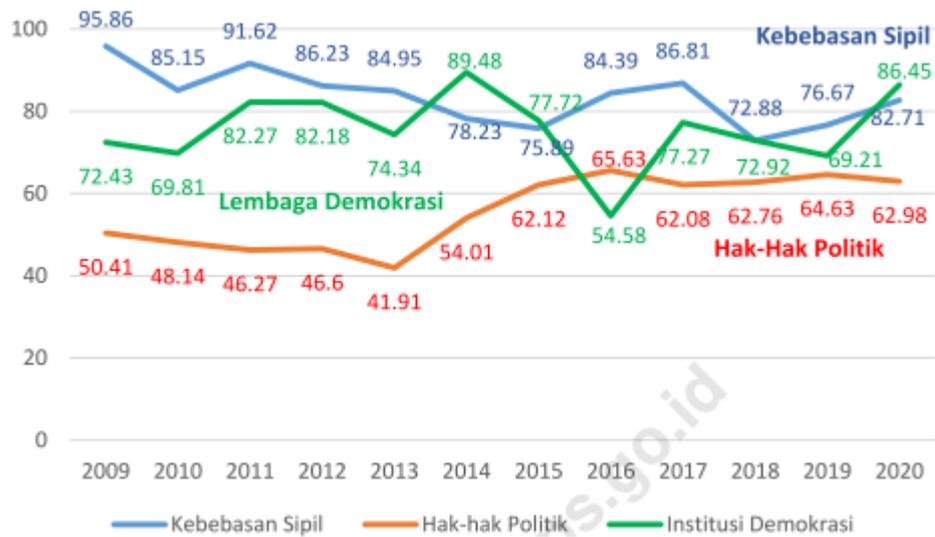
PERKEMBANGAN INDEKS ASPEK-ASPEK IDI

Angka IDI 2020 (2021) merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil yang bernilai 82,71; aspek Hak-Hak Politik yang bernilai 62,98; dan aspek Lembaga Demokrasi yang bernilai 86,45.

Pada tahun 2020, aspek Hak-Hak Politik menjadi satu-satunya aspek yang mengalami penurunan dan menunjukkan kecenderungan (trend) yang semakin menurun. Sementara itu, meskipun capaiannya masih menjadi yang terendah di antara aspek lainnya, aspek Kebebasan Sipil dan Lembaga Demokrasi mengalami kenaikan dan menunjukkan kecenderungan (trend) yang semakin meningkat.

Dalam tiga aspek demokrasi yang diukur pada tahun 2020, indeks aspek Kebebasan Sipil dan aspek Lembaga Demokrasi mengalami kenaikan masing-masing 6,04 poin dan 17,24 poin dibandingkan tahun 2019. Sementara itu nilai indeks aspek Hak-Hak Politik mengalami penurunan sebesar 1,65 poin. Meskipun mengalami penurunan, Aspek Hak-Hak Politik masih termasuk kategori “sedang”, lain halnya untuk kedua aspek lainnya, yaitu aspek Kebebasan Sipil dan Lembaga Demokrasi masuk dalam kategori “baik”.

Grafik 3.11. Perkembangan Indeks Aspek IDI Jambi, 2009-2020



Sumber : BPS IDI Provinsi Jambi 2020, 2021

PERKEMBANGAN INDEKS VARIABEL IDI

Pada tahun 2020 terdapat empat variabel yang mengalami penurunan indeks, empat variabel mengalami peningkatan, dan tiga variabel tidak mengalami perubahan. Dari empat variabel yang mengalami penurunan, satu diantaranya menurun cukup tajam. Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat menurun paling tajam yaitu sebesar 46,88 poin dari 90,63 pada 2019 menjadi 43,75 pada 2020. Penurunan terbesar kedua terjadi pada variabel Peran Peradilan yang Independen dari 100,00 pada 2019 menjadi 87,50 pada 2020 atau turun 12,50 poin. Selanjutnya variabel Peran DPRD dan Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan masing-masing turun sebesar 4,41 poin dan 3,30 poin.

Gambar 3.6. Perkembangan Indeks Variabel IDI Jambi, 2019-2020



Sumber : BRS IDI Provinsi Jambi 2020, 2021

Di sisi lain, variabel Peran partai politik meningkat secara bermakna sebesar 64,29 poin, dari 35,71 pada 2019 menjadi 100,00 pada 2020. Variabel lain yang juga meningkat adalah variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah meningkat sebesar 36,49 poin dari 46,96 pada 2019 menjadi 83,45 pada 2020, variabel Kebebasan Berkeyakinan meningkat 16,53 poin dari 71,16 pada 2019 menjadi 87,69 pada 2020, dan variabel Kebebasan berpendapat meningkat 3,47 poin dari 55,53 pada 2019 menjadi 59,00 pada 2020. Adapun variabel Kebebasan dari diskriminasi, hak memilih dan dipilih, serta pemilu yang bersih dan adil tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Angka perkembangan indeks variabel secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.18. Perkembangan Indeks Variabel IDI Jambi, 2019-2020

| No | Nama Variabel | 2019 | 2020 | Selisih |
|----|--|--------|--------|---------|
| 1 | Kebebasan Berkumpul dan Berserikat | 90,63 | 43,75 | -46,88 |
| 2 | Kebebasan Berpendapat | 55,53 | 59,00 | 3,47 |
| 3 | Kebebasan Berkeyakinan | 71,16 | 87,69 | 16,53 |
| 4 | Kebebasan dari Diskriminasi | 93,47 | 93,47 | 0,00 |
| 5 | Hak Memilih dan Dipilih | 79,26 | 79,26 | 0,00 |
| 6 | Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan | 50,00 | 46,70 | -3,30 |
| 7 | Pemilu yang Bebas dan Adil | 92,55 | 92,55 | 0,00 |
| 8 | Peran DPRD | 74,87 | 70,46 | -4,41 |
| 9 | Peran Partai Politik | 35,71 | 100,00 | 64,29 |
| 10 | Peran Birokrasi Pemerintah Daerah | 46,96 | 83,45 | 36,49 |
| 11 | Peran Peradilan yang Independen | 100,00 | 87,50 | -12,50 |

Sumber : BRS IDI Provinsi Jambi 2020, 2021

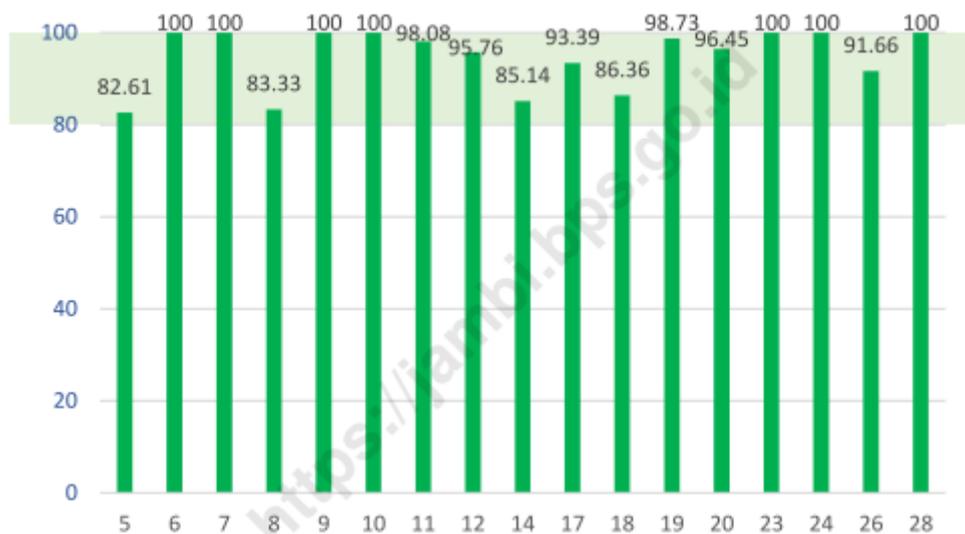
PERKEMBANGAN SKOR INDIKATOR IDI

Pada IDI 2020, dari 28 indikator terdapat 17 yang mencapai kinerja kategori “baik” (skor di atas 80), meliputi :

- a. Indikator 5, Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama,
- b. Indikator 6, Tindakan/pernyataan pejabat yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama,
- c. Indikator 7, Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama,
- d. Indikator 8, Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, dan kelompok,
- e. Indikator 9, Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, dan kelompok,
- f. Indikator 10, Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, dan kelompok,
- g. Indikator 11, Hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat,

- h. Indikator 12, Ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih,
- i. Indikator 14, Partisipasi penduduk dalam pemilu (voters turnout),
- j. Indikator 17, Jumlah pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan,
- k. Indikator 18, Netralitas penyelenggara pemilu,
- l. Indikator 19, Kecurangan dalam penghitungan suara,
- m. Indikator 20, Alokasi pendidikan dan kesehatan,
- n. Indikator 23, Kegiatan kaderisasi yang dilakukan peserta pemilu,
- o. Indikator 24, Persentase perempuan pengurus partai politik, dan
- p. Indikator 26, Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah,
- q. Indikator 28, Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi.

Diagram 3.16. Indikator IDI Jambi 2020 dengan Kategori Kategori “Baik”

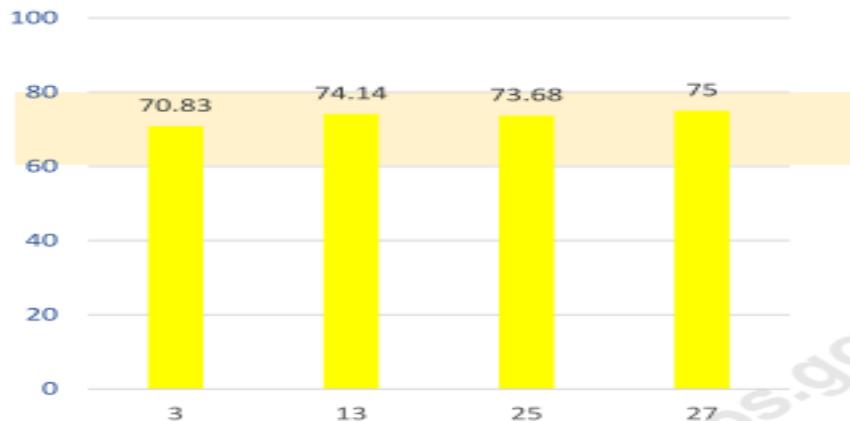


Sumber : BRS IDI Provinsi Jambi 2020, 2021

Terdapat empat kinerja indikator demokrasi yang berkategori “sedang” (skor 60-80) di tahun 2020. Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah :

- a. Indikator 3, Jumlah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat,
- b. Indikator 13, Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT),
- c. Indikator 25, Jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTU,
- d. Indikator 27, Keputusan hakim yang kontroversial.

Diagram 3.17. Indikator IDI Jambi 2020 Kategori “Sedang”



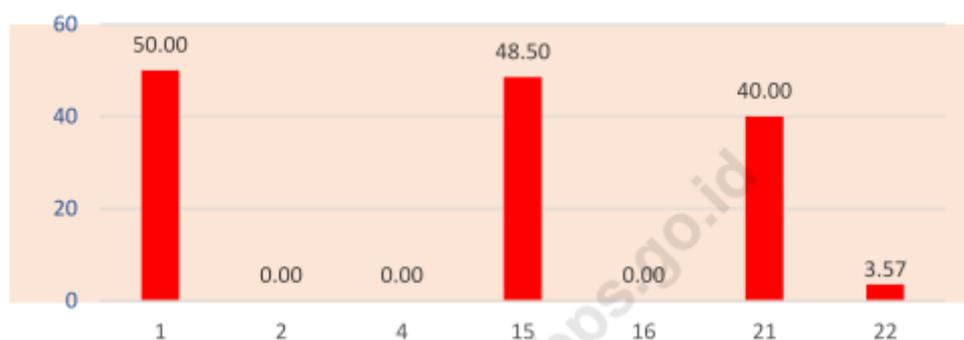
Sumber : BRS IDI Provinsi Jambi 2020, 2021

Meskipun demikian, masih terdapat tujuh kinerja indikator demokrasi yang berkategori “buruk” (skor di bawah 60) di tahun 2020. Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah :

- Indikator 1, Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat,
- Indikator 2, Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat,
- Indikator 4, Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat,
- Indikator 15, Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi,
- Indikator 16, Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan,
- Indikator 21, Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan,
- Indikator 22, Rekomendasi DPRD kepada eksekutif,

Indikator-indikator tersebut di atas memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar nilainya dapat membaik.

Diagram 3.18. Indikator IDI Jambi 2020 dengan Kategori Kategori “Buruk”



Sumber : BRS IDI Provinsi Jambi 2020, 2021

PERKEMBANGAN IDI PROVINSI

Pada IDI 2020, terdapat lima provinsi yang berkategori “baik” terdiri dari dua provinsi yang tetap bertahan “baik” yaitu DKI Jakarta dan DI Yogyakarta serta tiga provinsi yang bergerak dari “sedang” menuju “baik” yaitu Kalimantan Timur, Gorontalo, dan Kalimantan Barat. Pada tahun 2019 terdapat tujuh provinsi dalam kategori “baik”, hal ini menunjukkan adanya penurunan pada Provinsi Kalimantan Utara, Bali, NTT, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Tengah yang bergerak menjadi kategori “sedang”.

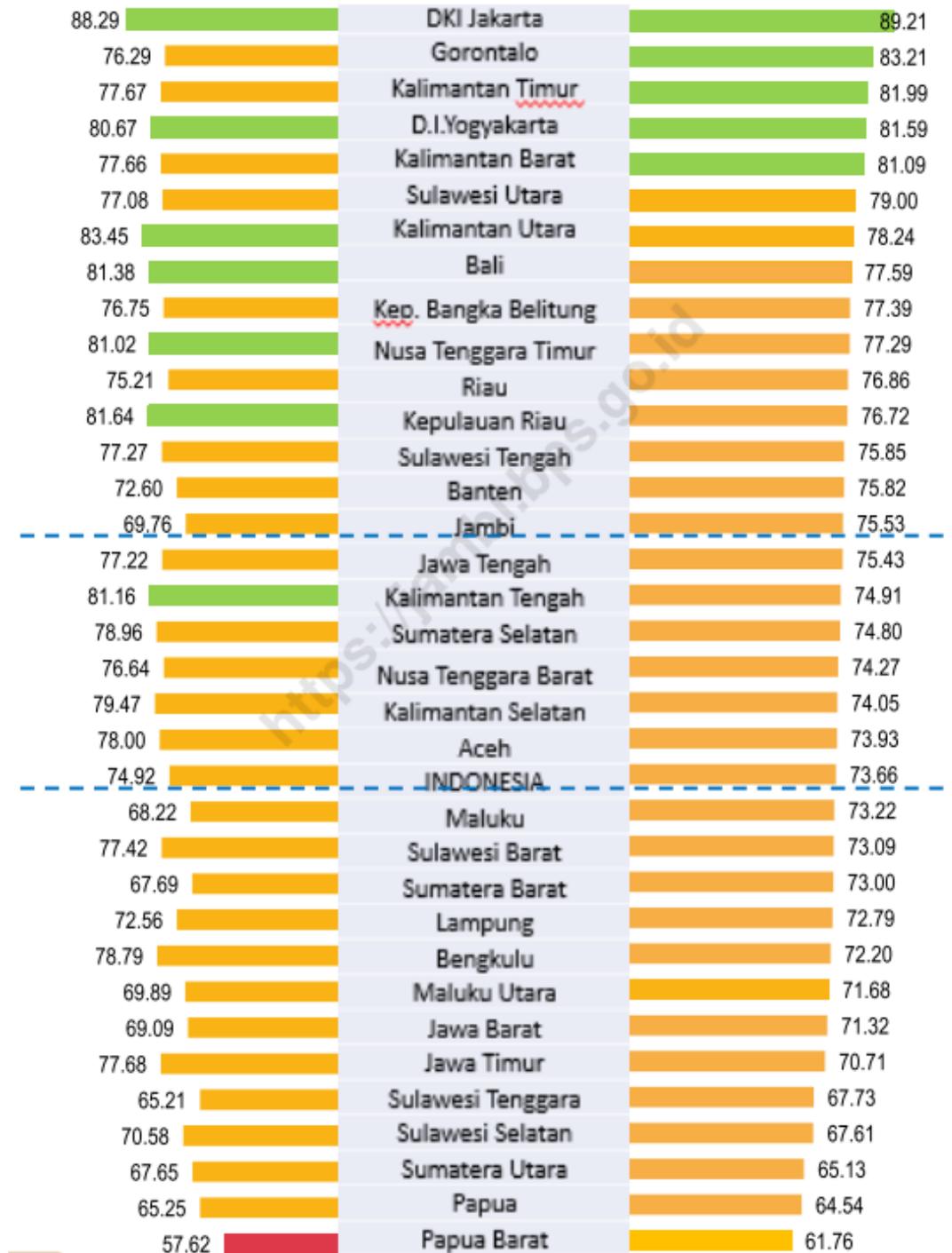
Tabel berikut menunjukkan ada 23 provinsi yang tetap berada di posisi sedang dalam dua tahun terakhir ini. Sementara yang bergerak dari sedang pada tahun 2019 menjadi baik pada tahun 2020 hanya tiga provinsi, yaitu Kalimantan Timur, Gorontalo dan Kalimantan Barat. Provinsi Papua Barat yang pada tahun sebelumnya masuk kategori “buruk” menjadi kategori “sedang”; sementara yang tetap bertahan “baik” ada dua provinsi, yaitu DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Tabel tersebut mengukuhkan kesimpulan statistik bahwa demokrasi Indonesia berada kedalam kualitas “sedang”. Dalam hal ini capaian kategori “sedang” tidak boleh disimpulkan sebagai kondisi demokrasi provinsi-provinsi di Indonesia homogen, namun kualitas “sedang” didefinisikan sebagai capaian yang ≥ 60 dan ≤ 80 . Artinya ada rentang sebesar 20 poin dalam kategori ini; suatu rentang yang sesungguhnya cukup besar dan mengindikasikan perbedaan kualitas antara capaian “sedang bawah” dan capaian “sedang atas” yang cukup signifikan.

Tabel 3.19. Pergerakan Kualitas Capaian IDI Provinsi 2019-2020

| Kualitas Capaian IDI | | 2020 | | |
|----------------------|--------|---|---|-------|
| | | Baik | Sedang | Buruk |
| 2019 | Baik | DKI Jakarta DI Yogyakarta | Kalimantan Utara, Bali, NTT, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah | |
| | Sedang | Kalimantan Timur, Gorontalo, Kalimantan Barat | Sulawesi Utara, Kep Bangka Belitung, Riau, Sulawesi Tengah, Banten, Jambi, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, NTB, Kalimantan Selatan, Aceh, Maluku, Sulawesi Barat, Sumatera Barat, Lampung, Bengkulu, Maluku Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Papua | |
| | Buruk | | Papua Barat | |

Sumber : BRS IDI Provinsi Jambi 2020, 2021

Diagram 3.19. Perkembangan IDI Provinsi 2019-2020



Gambar di atas menunjukkan adanya disparitas capaian yang sangat lebar dari provinsi tertinggi dan terendah, yaitu sebesar 27.45. Disparitas capaian yang lebar ini mencerminkan kesenjangan kualitas demokrasi yang cukup besar dari provinsi dengan kategori “baik” dan kategori “sedang”. Hal ini mengindikasikan pengalaman kehidupan sosial-politik (khususnya dalam hal kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga-lembaga demokrasi) yang berbeda bagi warga negara tergantung di mana mereka berdomisili.

Hal lain yang segera perlu diperhatikan adalah bahwa jarak antara capaian yang tertinggi kategori “baik” dan “sedang” cukup lebar dimana jarak capaian antara DKI Jakarta (89.21 dengan kategori “baik”) dengan Sulawesi Utara (79.00 dengan kategori “sedang”) mencapai 10.21 poin; Sedangkan capaian pada kategori “sedang” terdapat selisih skor relatif kecil antar provinsi, ini menunjukkan capaian provinsi yang cukup beragam. Selain rentang capaian provinsi yang cukup besar, juga kita temukan fluktuasi capaian setiap provinsi dari tahun 2019 ke 2020.

Gambar di atas menunjukkan naik-turunnya capaian setiap provinsi, dapat kita lihat bahwa terjadi peningkatan atau penurunan cukup tajam. Provinsi Gorontalo, Jambi, dan Sumatera Barat naik masing-masing sebesar 6,92 poin, 5,77 poin, dan 5,31 poin. Sementara Provinsi Jawa Timur, Bengkulu, dan Kalimantan Tengah pada tahun 2020 turun masing-masing sebesar 6,97 poin, 6,59 poin dan 6,25 poin dari tahun 2019. Sekilas fluktuasi ini bukan persoalan karena masih berada dalam kategori capaian yang sama. Namun fluktuasi yang sangat besar bisa mengindikasikan kerentanan kondisi sosial-politik di provinsi tersebut.

TANTANGAN IDI JAMBI

Meskipun angka IDI Jambi 2020 mengalami kenaikan sebesar 5,77 poin dibandingkan dengan tahun 2019 ternyata masih ada tujuh indikator berkategori “buruk” untuk didorong supaya menjadi lebih baik dengan rincian sebagai berikut :

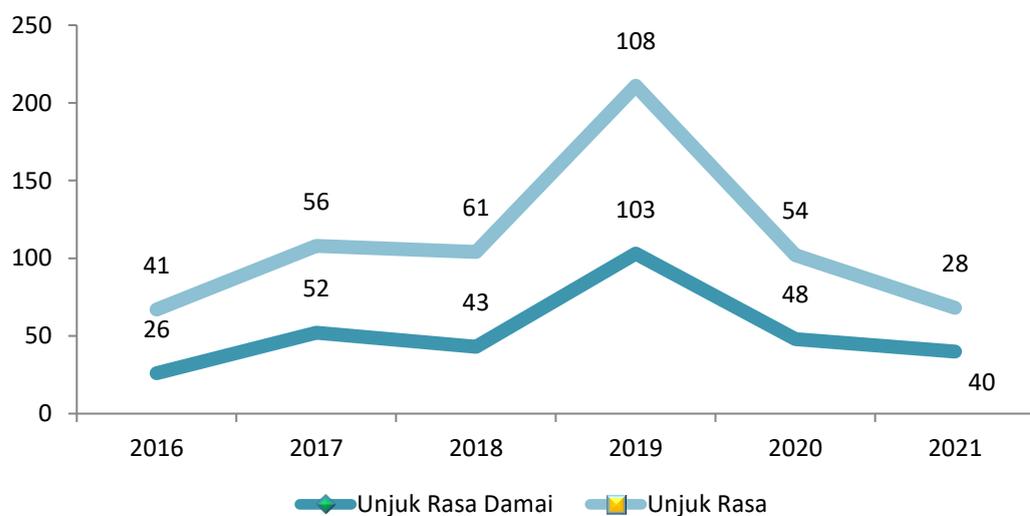
1. Indikator 1 (Ancaman/penggunaan kekerasan oleh pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat) sebesar 50,00. Angka ini turun sebesar 50,00 poin pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 100,00. Penurunan ini disebabkan masih ditemukan adanya kasus ancaman oleh pemerintah dalam penanganan ketertiban kebebasan berkumpul.
2. Indikator 2 (Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat) sebesar 0,00. Angka ini turun sebesar 25,00 poin pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 25,00. Penurunan ini disebabkan masih ditemukan adanya kasus ancaman oleh masyarakat dalam kebebasan berkumpul.
3. Indikator 4 (Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat) sebesar 0,00. Angka ini kondisinya sama dengan tahun 2019 yang sebesar 0,00. Tidak adanya perubahan membaik pada indikator ini disebabkan masih ditemukan kasus ancaman oleh masyarakat yang melakukan intimidasi maupun kekerasan dalam kebebasan berpendapat.
4. Indikator 15 (Persentase anggota perempuan DPRD provinsi) sebesar 48,50. Angka ini kondisinya juga sama dengan tahun 2019 yang sebesar 48,50 dimana jumlah anggota perempuan DPRD masih sama dengan tahun sebelumnya.

5. Indikator 16 (Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan) sebesar 40,00. Angka ini kondisinya sama dengan tahun 2019 yang sebesar 0,00. Penyebabnya adalah bertambahnya kasus demonstrasi yang bersifat kekerasan.
6. Indikator 21 (Persentase anggota perempuan DPRD provinsi) sebesar 40,00. Angka ini turun sebesar 36,20 poin pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 76,20. Adanya penurunan jumlah perda inisiatif menjadi penyebab utamanya.
7. Indikator 22 (Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif) sebesar 3,57. Angka ini kondisinya sama dengan tahun 2019 yang sebesar 3,57. Tidak adanya rekomendasi selain rekomendasi LKPJ menjadi penyebabnya.

Disamping itu Tim Pokja IDI Provinsi Jambi juga perlu melakukan kajian bersama para pihak terkait adanya beberapa hambatan peraturan tertulis diantaranya indikator 5 (aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama) dan indikator 8 (aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok rentan lainnya). Serta menjaga ketersediaan data indikator 26 (Peran birokrasi pemerintah daerah) untuk diupload melalui website Pemerintah Provinsi Jambi.

Aspek kebebasan sipil ditunjang oleh aksi demonstrasi yang damai dan tidak anarkis. Berdasarkan data Satpol PP dan Damkar Provinsi Jambi, Bila melihat tren jumlah aksi unjuk rasa pada Pemerintah Provinsi Jambi, terlihat bahwa jumlah unjuk rasa mengalami penurunan dan pada tahun 2020 terjadi 54 kali unjuk rasa dengan 6 kali unjuk rasa berujung anarkis atau 11,1 persen. Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan indeks kebebasan sipil, diantaranya dengan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat serta optimalisasi forum Pembauran Kebangsaan.

Grafik 3.12. Trend Kejadian Demonstrasi yang terjadi tahun s.d. 2021



Sumber: Satpol PP dan Damkar Prov. Jambi, 2021

Adapun program pendukung pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut :

1. Program pengembangan wawasan kebangsaan.
2. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjadi ketertiban dan keamanan
3. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
4. Pemeliharaan kantantibmas dan pencegahan tindak kriminal
5. Program advokasi hukum dan HAM
6. Program dokumentasi dan informasi produk hukum
7. Program pendidikan politik masyarakat
8. Program perwujudan demokrasi makin kokoh
9. Program peningkatan kapasitas lembaga DPRD

Permasalahan :

Aksi unjuk rasa yang tidak tertib dan cenderung menggunakan kekerasan akan berdampak buruk bagi kehidupan demokrasi di Provinsi Jambi. Pada akhirnya hal ini juga akan berdampak pada situasi ekonomi dan sosial di Provinsi Jambi.

Bila dilihat realisasi capaian kinerja tersebut, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya aksi demonstrasi antara lain : faktor ideology, faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor sosian budaya.

Beberapa permasalahan yang seringkali dialami dalam pengelolaan aksi demonstrasi diantaranya :

- a. Kemampuan manajerial
- b. Pengalaman aparaturnya dalam mengelola aksi
- c. Kemampuan deteksi dini yang minim
- d. Kelengkapan sarana prasarana yang dimiliki
- e. Ada tidaknya dukungan dari instansi terkait seperti Kepolisian dan TNI
- f. Kondisi fisik para pendemo termasuk banyaknya jumlah serta lamanya aksi yang dilakukan
- g. cepat atau lambatnya penerimaan aspirasi oleh pejabat yang berwenang.

Solusi :

Tindak kekerasan dalam hal apapun sudah tidak layak dilakukan pada era demokrasi, untuk itu pendekatan persuasif dan optimalisasi peran Forum komunikasi dan Forum kebangsaan yang ada di Provinsi Jambi harus terus dilakukan.

Selain itu perlu dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- a. Peningkatan profesionalitas aparaturnya dalam menangani aksi demonstrasi
- b. Pengembangan sistem antisipasi dini
- c. Menerapkan manajemen konflik dengan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat yang melakukan aksi demo, serta
- d. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait seperti Polri dan TNI.

Sasaran 5

**Meningkatnya
Total factor Productivity (TFP)**



Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi seringkali menjadi penentu kemajuan suatu daerah. Teknologi bukan hanya sebagai alat, tetapi juga digunakan sebagai daya saing suatu daerah. Daya saing bukan lagi ditentukan oleh sumber daya alam dimiliki tetapi lebih ditentukan oleh cara suatu daerah berinovasi teknologi untuk mengelola sumber daya alam tersebut.

Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur sejauhmana sentuhan IPTEK dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah *Total Factor Productivity* (TFP). Penggunaan *Total Factor Productivity* (TFP) sebagai sebuah metode untuk mengukur peranan teknologi di dalam pertumbuhan ekonomi cukup beralasan karena TFP dinilai oleh para penggunanya sebagai sebuah ukuran produktivitas menyeluruh yang telah mendapat pengakuan dan diterima tidak hanya dalam pembuktian teoretis, melainkan juga dalam praktik pengambilan kebijakan dan analisis ekonomi. Capaian sasaran meningkatnya TFP dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 3.20. Capaian Total Factor Productivity sebagai Indikator sasaran Meningkatkan Total Factor Productivity

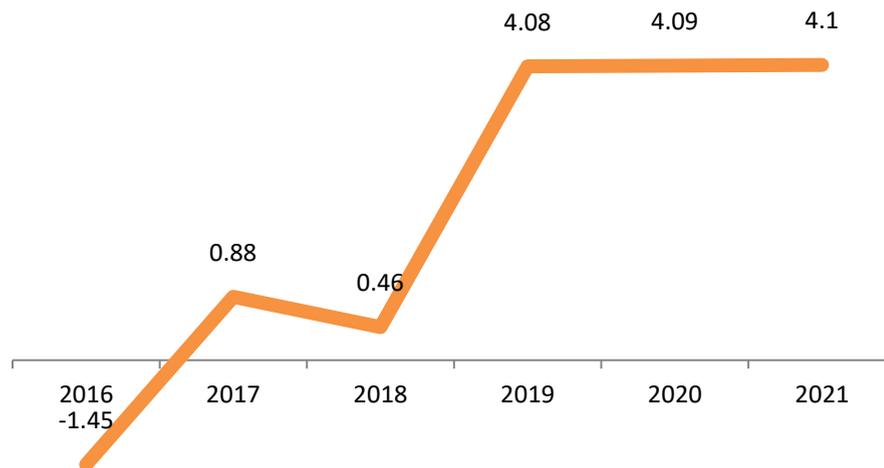
| Indikator Kinerja | Kondisi Awal (2016) | 2020 | 2021 | | | Realisasi Akhir RPJMD 2021 |
|---------------------------------|---------------------|------|--------|-----------|---------------|----------------------------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | |
| Total Factor Productivity (TFP) | NA | 4,09 | 1,5 | 4,10 | 273,33 | 1,5 |

Dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik yang dikembangkan oleh Solow, faktor input tenaga kerja dan modal adalah determinan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di luar tenaga kerja dan modal, ada faktor yang sering disebut dengan Total Factor Productivity (TFP) yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain total TFP menjelaskan peranan faktor lain diluar faktor tenaga kerja dan modal. Capaian TFP 2021 kenaikan sedikit seiring maraknya pengaruh COVID 19 sehingga unit usaha memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan usaha sehingga hanya berdampak sedikit pada perkembangan TFP.

Di balik konsep TFP ini, sebenarnya yang mau diketahui adalah pengaruh *technological progress* (perkembangan teknologi) seperti penguasaan teknologi produksi, tingkat pendidikan dan keahlian tenaga kerja, kemampuan penguasaan teknologi dan lain sebagainya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Secara empiris jelas tidak mudah untuk mengetahui pengaruh dan peran teknologi ini karena sifatnya yang *embodied* kedalam peran modal dan tenaga kerja itu sendiri. Akan tetapi ”pesan” penting berkaitan dengan upaya mendekomposisi peran teknologi dalam proses ini sesungguhnya adalah untuk mengetahui peran *managerial* dalam setiap proses produksi. Dengan demikian, perumusan kebijakan untuk meningkatkan produktivitas akan lebih mudah.

Grafik 3.13. Trend Total Factor Productivity (TFP) Provinsi Jambi



Sumber : BPS Provinsi Jambi, hasil analisis 2021

Realisasi indikator TFP Provinsi Jambi pada tahun 2021 adalah sebesar 4,10 atau terealisasi 273,33% dari target yang telah ditetapkan sebesar 1,5 di akhir periode RPJMD 2021 dan termasuk dalam kategori **sangat tinggi**. Salah satu kontributor pertumbuhan TFP adalah teknologi yang digunakan dalam pengolahan sumber daya alam baik pertambangan, migas maupun sumber daya perkebunan. Selain itu pertumbuhan pengguna telepon selular dan dampak industri 4.0 turut memberikan andil dalam pertumbuhan TFP ini terutama dalam masa pandemic Covid 19. Adapun program yang dilaksanakan untuk meningkatkan TFP adalah :

1. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
2. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
3. Program Peningkatan Kualitas SDM Pertanian
4. Program Peningkatan Daya Saing KUKM
5. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan
6. Program Peningkatan Penguatan Usaha Koperasi
7. Program Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah
8. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
9. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Permasalahan :

TFP yang tinggi harus diiringi dengan kemampuan penguasaan teknologi oleh tenaga kerja yang lebih baik, jika tidak maka akan menambah pengangguran di Provinsi Jambi.

Solusi :

Upaya-upaya peningkatan kapasitas kemampuan angkatan kerja khususnya dalam penguasaan teknologi harus terus dilakukan, agar mereka dapat tertampung di dunia kerja.



Sasaran 6

Perubahan Struktur Ekonomi yang Mampu Memberikan Nilai Tambah

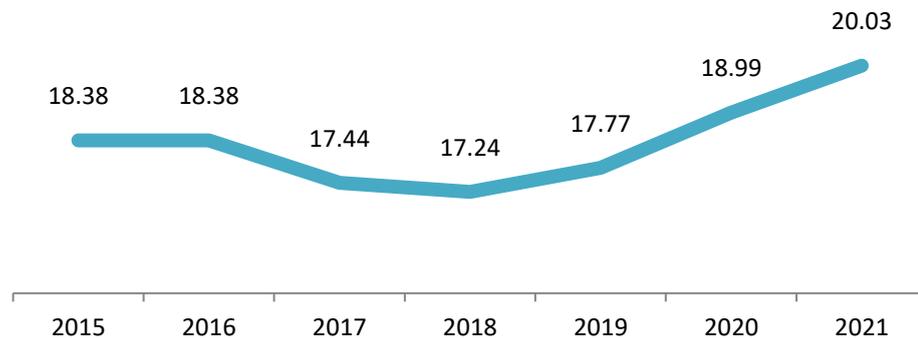
Perubahan struktur ekonomi disebut juga transformasi struktural, yang berarti rangkaian perubahan ekonomi dari pertanian tradisional ke sektor industri sebagai mesin utama penggerak pertumbuhan ekonomi. Capaian sasaran strategis perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah ditandai dengan indikator persentase share sektor sekunder terhadap PDRB, yang capaiannya pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21. Capaian Indikator Persentase Share Sektor Sekunder terhadap PDRB sebagai Indikator pada Sasaran Perubahan Struktur Ekonomi yang Mampu Memberikan Nilai Tambah

| Indikator Kinerja | Kondisi Awal (2016) | 2020 | 2021 | | | Realisasi Akhir RPJMD 2021 |
|--|---------------------|-------|--------|-----------|-----------|----------------------------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | |
| Persentase Share Sektor Sekunder terhadap PDRB | 18,38 | 18,99 | 22 | 20,03 | 91,04 | 22 |

Struktur ekonomi Provinsi Jambi masih ditopang oleh sektor primer. Hal ini bisa dilihat dari share sektor primer terhadap PDRB Provinsi Jambi yang masih merupakan share tertinggi. Bila ingin mewujudkan perubahan struktur ekonomi atau mengurangi share sektor primer dan mengalihkannya pada sektor sekunder maka indikator yang bisa dijadikan alat ukur adalah besarnya presentase share sektor sekunder terhadap PDRB.

Grafik 3.14. Trend Share sektor sekunder terhadap PDRB Provinsi Jambi



Sumber: BPS, data diolah, 2021

Bila dilihat dari persentase capaian kinerja tahun 2021, persentase realisasi indikator ini masih dalam kategori **sangat tinggi** karena mencapai 91,04%. Demikian pula bila dibandingkan dengan target akhir pada tahun 2020, masuk dalam kategori tinggi. Berdasarkan data capaian indikator ini, sebagaimana terlihat pada grafik di atas, dapat terlihat bahwa share sektor sekunder terhadap PDRB Provinsi Jambi terus mengalami penurunan dari tahun sampai dengan tahun 2018, namun meningkat kembali pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

Pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Jambi lebih memfokuskan sektor pertanian untuk menjaga ketahanan pangan yaitu dari ketersediaan beras, jagung dan kedelai serta kestabilan harga untuk komoditas yang mempunyai pengaruh besar terhadap inflasi seperti cabai dan bawang merah. Usaha ini dapat dikatakan berhasil jika melihat tren inflasi yang tetap terjaga hingga triwulan III tahun 2021 ini bahkan masih sangat aman dari tingkat inflasi yang ditargetkan 3%.

Tabel 3.22. Proporsi PDRB per-Sektor

| Periode | 2021 | 2020 | Y-to-Y | Q-to-Q | Porsi |
|---|-----------|-----------|--------|--------|-------|
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 19.771,08 | 16.069,37 | 1,37 | 6,72 | 33% |
| Pertambangan dan Penggalian | 9.167,06 | 5.713,77 | 11,67 | 9,58 | 15% |
| Industri Pengolahan | 6.415,66 | 5.613,58 | 0,82 | 3,79 | 11% |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 42,27 | 39,48 | 3,40 | 6,08 | 0% |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 83,66 | 77,50 | 0,94 | 6,60 | 0% |
| Konstruksi | 4.440,37 | 4.035,12 | 1,60 | 6,16 | 7% |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 7.375,31 | 6.440,83 | 1,79 | 9,42 | 12% |

Selain itu, jika dilihat arah dan prioritas Pemerintah saat RKPd untuk tahun 2021 Pemerintah Provinsi Jambi masih belum menjadikan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebagai prioritas utama untuk digenjot pertumbuhannya pada tahun ini. Jika dibandingkan sektor-sektor lain, terlihat bahwa sektor ini meskipun menjadi perhatian Pemerintah Daerah namun bukan menjadi sektor yang menjadi prioritas. Pada tahun 2021 ini, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ini hanya diharapkan tumbuh 2,3% agar mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 4,77%.

Meskipun begitu, melihat geliat sektor pertanian yang terus membaik serta ketahanannya yang sangat tinggi bahkan ditengah kondisi pandemi, Pemerintah Provinsi Jambi telah membuat kebijakan di tahun 2022 untuk menjadikan sektor Pertanian ini sebagai sektor prioritas.

Salah satu Program yang akan dilaksanakan adalah Pengembangan Food Estate dan Program Kampung Pangan Terpadu dengan tujuan untuk memandirikan petani secara makro. Perhatian khusus dari Pemerintah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani ke depan disamping mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro dengan meningkatnya kontribusi sektor ini terhadap PDRB Provinsi Jambi.

Pada dasarnya upaya untuk menggeser share tertinggi pada PDRB Provinsi Jambi dari sektor primer ke sektor sekunder telah dilakukan setiap tahun. Hal ini sejalan dengan upaya menumbuhkan sektor industri di Provinsi Jambi dalam jangka panjang, melalui penyediaan kawasan di Ujung Jabung, penyiapan sarana prasarana pendukung seperti jalan, pelabuhan, air dan energi. Namun karena upaya ini adalah upaya jangka panjang, maka belum bisa dirasakan dampaknya karena masih dalam tahap pembangunan.

Gambar 3.7. Pelatihan Kewirausahaan



Upaya jangka pendek yang telah dilakukan pada tahun 2021 adalah mendorong hilirisasi melalui pemanfaatan IPTEKIN dan memberikan kemudahan bagi investor industri hilir pengolahan. Upaya-upaya lainnya antara lain :

1. Penyediaan informasi Pengolahan komoditi dan pasar terutama industri pengolahan yang berbasis bahan baku lokal, sumberdaya setempat dengan cara penguatan struktur industri berbasis kawasan, sumber daya lokal yang berkelanjutan.
2. Mendukung industri yang memberi nilai tambah komoditi utama yang potensi daerah melalui pendekatan kewilayaan. Dengan cara mendorong sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan lainnya dalam mendukung pembangunan industri daerah dan nasional.
3. Menginisiasi pemanfaatan produk karet alam untuk komponen infrastruktur strategis.

Guna mendukung pencapaian indikator kinerja ini program yang dilaksanakan adalah :

1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
2. Program Pembinaan Pembangunan Ekonomi di bidang Penanaman Modal, BUMN/BUMD dan Pendapatan Keuangan
3. Program perencanaan dan penyelenggaraan pengembangan infrastruktur wilayah dan kawasan
4. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
5. Program Pengembangan Industri Agro dan Kimia
6. Program Peningkatan Produksi dan teknologi budidaya perkebunan
7. Program Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan :

Kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB belum sesuai dengan harapan, karena sektor primer belum bergeser dan masih menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Jambi. Hal ini terkait dengan belum berkembangnya teknologi dan kurangnya sarana prasarana penunjang pengembangan industri.

Solusi :

1. Penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh industri sedang serta mendorong penguasaan teknologi di Provinsi Jambi.
2. Dalam hal peningkatan usaha industri kecil, menengah dan besar maka perlu penumbuhan iklim usaha yang kondusif, Pengembangan sistem pendukung usaha, Pengembangan wirausaha dan keunggulan kompetitif, Pemberdayaan usaha skala.

Sasaran 7

Meningkatnya Ketahanan Pangan



Ketahanan pangan merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian dunia mengingat pengaruhnya terhadap pembentukan iklim makroekonomi yang kondusif. Permasalahan dan tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan bersifat multidimensi, mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan.

Untuk Indonesia, ketahanan Pangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 mengenai pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan juga disebutkan dalam Undang-Undang tersebut sebagai tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Indikator kinerja yang digunakan untuk menggambarkan capaian sasaran strategis meningkatnya ketahanan pangan adalah ketersediaan energi, dengan capaian pada tahun 2021 adalah sebesar 3.008 kkal/kap/hari.

Tabel 3.23. Capaian Indikator Ketersediaan Energi sebagai Indikator pada Sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan

| Indikator Kinerja | Kondisi Awal (2016) | 2020 | 2021 | | | Target Akhir RPJMD 2021 |
|-------------------------------------|---------------------|-------|--------|-----------|-----------|-------------------------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | |
| Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari) | 3.204 | 3.005 | 3.217 | 3.008 | 93,50 | 3.217 |

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Ketahanan Pangan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah Provinsi Jambi telah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan. Khusus mengenai cadangan pangan pemerintah daerah, juga telah diatur sedemikian rupa dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur nomor 12 Tahun 2013.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2013 tersebut, selama kurun waktu 2013 – 2021 cadangan pangan Pemerintah Provinsi Jambi yang tersedia sebesar 112,785 Ton beras, dan selama kurun waktu tersebut telah digunakan sebanyak 226.538 Kg beras untuk membantu masyarakat korban pasca bencana banjir yang mengalami kerawanan pangan di Kota Sungai Penuh, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan total pendistribusian sebanyak 37.560 Kg sehingga stok cadangan pangan Pemerintah Provinsi di gudang Perum Bulog pada akhir bulan Desember 2021 berjumlah 117.445 Kg Beras.

Kemandirian pangan dalam konteks daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam memproduksi pangan beraneka ragam yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat. Dampak dari upaya perwujudan kemandirian pangan ini dapat dilihat dari ketersediaan energi untuk konsumsi perkapita.

Tabel 3.24. Cadangan pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi

| No. | Tahun | Pengadaan CPPD (Kg) | Penggunaan CPPD (Kg) | Saldo/Stok (Kg) |
|---------------|-------|---------------------|----------------------|-----------------|
| 1. | 2013 | 70.000 | - | 70.000 |
| 2. | 2014 | 20.000 | 3.449 | 86.551 |
| 3. | 2015 | - | 9.349 | 77.203 |
| 4. | 2016 | - | 22.839 | 54.364 |
| 5. | 2017 | 7.000 | 6.102 | 55.262 |
| 6. | 2018 | 12.000 | 5.400 | 61.862 |
| 7. | 2019 | 3.805 | 24.396 | 41.271 |
| 8. | 2020 | 948 | - | 42.219 |
| 9. | 2021 | 112.785 | 37.560 | 117.444 |
| Jumlah | | 226.538 | 109.094 | 117.444 |

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, 2021

Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Provinsi Jambi, ketersediaan energi untuk konsumsi perkapita sebesar 3.008 Kkal/Kap/Hari, hal ini telah melebihi kecukupan gizi untuk energi ditingkat ketersediaan sebesar 2.400 Kkal/Kap/Hari. Tabel di atas memperlihatkan bahwa ketersediaan Energi sudah melebihi ketersediaan energi ideal sebesar 2.400 kkal/kap/hari, namun dari komposisi ketersediaan kelompok bahan pangan belum berimbang.

Komposisi ketersediaan bahan pangan masih didominasi oleh kelompok sumber bahan pangan penghasil karbohidrat, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, gula, serta sayur dan buah sementara ketersediaan bahan pangan hewani dan kacang-kacangan masih lebih rendah dari ketersediaan ideal berdasarkan pola pangan harapan (PPH).

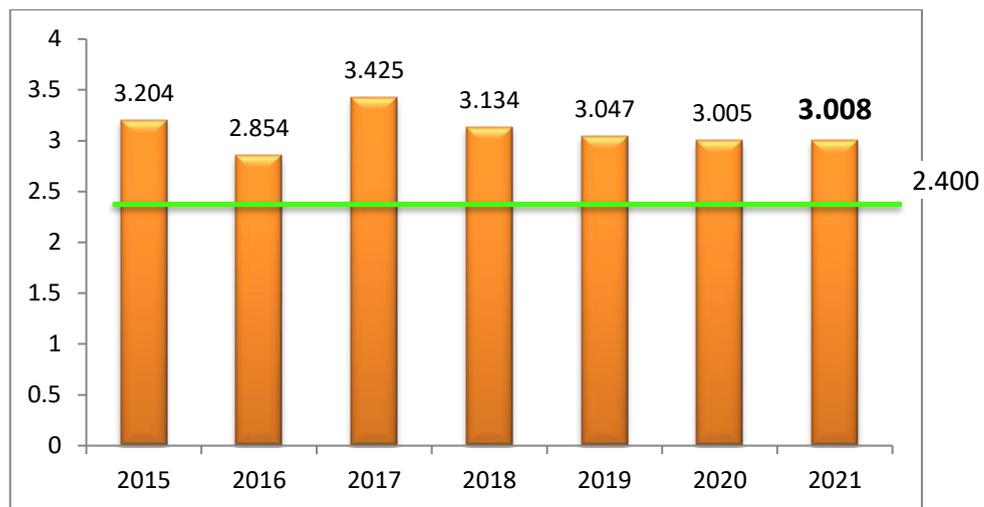
Tabel 3.25. Kondisi Ketersediaan Energi Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Provinsi Jambi Tahun 2021

| No. | Kelompok Bahan Pangan | Ketersediaan Energi (Kkal/Kap/Hari) | Ketersediaan Ideal (Kkal/Kap/Hari) |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | Padi-Padian | 1.520 | 1.200 |
| 2. | Umbi-Umbian | 98 | 144 |
| 3. | Pangan Hewani | 183 | 288 |
| 4. | Minyak Dan Lemak | 712 | 240 |
| 5. | Buah Biji/ Berminyak | 208 | 72 |
| 6. | Kacang-Kacangan | 56 | 120 |
| 7. | Gula | 141 | 120 |
| 8. | Sayuran dan Buah | 128 | 144 |
| 9. | Lain-Lain | - | 72 |
| Jumlah | | 3.005 | 2.400 |

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, data diolah, 2021

Berdasarkan neraca bahan makanan Provinsi Jambi tahun 2021, ketersediaan energi untuk konsumsi perkapita adalah sebesar sebesar 3.008 Kkal/Kap/Hari dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ditingkat ketersediaan sebesar 87,3. Hal ini telah melebihi kecukupan gizi untuk energi ditingkat ketersediaan sebesar 2.400 Kkal/Kap/Hari (hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke X tahun 2012), walaupun belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 3.217 kkal/ kapita/hari atau terealisasi sebesar 93,50% dan masuk dalam kategori sangat tinggi.

Diagram 3.20. Ketersediaan Energi (Kkal/kap/hari) Provinsi Jambi Tahun 2015-2021



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2021

Grafik 3.15. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi Provinsi Jambi Tahun 2015-2020



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Prov. Jambi, 2021

Dalam hal konsumsi pangan, permasalahan yang dihadapi tidak hanya mencakup keseimbangan komposisi, namun juga masih belum terpenuhinya kecukupan gizi. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, untuk mengukur keberhasilan upaya diversifikasi baik di bidang produksi, penyediaan dan konsumsi pangan penduduk diperlukan suatu parameter. Salah satu parameter yang dapat digunakan untuk menilai tingkat keanekaragaman pangan adalah Pola Pangan Harapan atau disingkat dengan PPH.

Skor PPH diketahui tidak hanya pemenuhan kecukupan gizi tetapi sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi yang didukung oleh cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kuantitas dan kemampuan daya beli. Penilaian terhadap pengembangan pola konsumsi pangan tingkat nasional dan Regional dilaksanakan dengan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH), menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya dapat dilihat pada gambar di atas.

Provinsi Jambi yang memiliki keragaman geografis yang tinggi memiliki berbagai macam potensial disektor pertanian, perkebunan hingga perikanan. Jika kita melihat data PDRB selama beberapa 5 tahun terakhir, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan selalu menjadi penopang dari sisi produksi dengan rata-rata kontribusi sebesar 29,34% dari PDRB. Melihat peran yang sangat penting tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi selalu berupaya membuat berbagai program agar sektor ini terus maju dan berkembang sehingga mampu memajukan perekonomian Provinsi Jambi secara umum.

Salah satu kegiatan nasional untuk sektor pangan adalah Jaminan Usaha serta Korporasi Petani, dan untuk bidang ketahanan pangan salah satunya yaitu kegiatan Pertanian Keluarga (Family Farming). Pertanian keluarga atau family farming (FAO,2014) merupakan cara pengorganisasian produksi pertanian, kehutanan, perikanan, penggembalaan dan akuakultur (perikanan darat) yang dikelola dan dikerjakan oleh keluarga.

Kegiatan lain yang juga merupakan salah satu upaya pemantapan ketahanan pangan keluarga yaitu kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L), dengan menjadikan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga. Pada tahun 2021 ini, melalui dana Dekonsentrasi, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah dialokasikan Banper untuk 97 kelompok penerima manfaat di 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Kegiatan ini sangat strategis apalagi dalam masa Pandemi COVID-19, yang mampu untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dalam berusaha untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Di tahun 2021 ini, terdapat tiga strategi Pemerintah Provinsi Jambi untuk memajukan sektor pertanian. Tiga strategi tersebut yaitu :

- (1) Peningkatan produktivitas komoditas unggulan
- (2) Pemantapan dan Pengembangan Jalan ke Kawasan dan Jalan Produksi
- (3) Pemantapan Irigasi dan JITUT (Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani).

Ketiga strategi tersebut diwujudkan dalam berbagai kegiatan baik yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi, APBN, serta DAK Fisik. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 47 Miliar untuk kegiatan dan program pengembangan sektor pertanian dengan total realisasi sudah mencapai 39,43 Miliar (84%). Dengan dana yang sudah dibelanjakan tersebut, capaian output yang sudah dihasilkan sudah sangat banyak sekali dengan capaian diatas 70% bahkan beberapa sudah mencapai 100%.

Optimalnya pelaksanaan belanja di pada sektor penguatan Pertanian ini tentunya sangat mengurangi beban para petani baik beban dari sisi produksi maupun beban dalam distribusi. Beberapa capaian yang perlu menjadi sorotan dan perhatian adalah tingginya capaian untuk area penyaluran benih padi, benih jagung serta kawasan padi yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten di Provinsi Jambi. Pengembangan Kawasan Kedelai berupa bantuan benih dan pupuk kepada kelompok-kelompok tani di Kab. Merangin, Sarolangun, Batanghari, Tanjabtim, Tebo, Bungo dan Muaro Jambi. Luasnya area penyaluran benih padi yang mencapai 84,77ribu hektar akan meningkatkan kapasitas produksi sehingga untuk jangka panjangnya akan sangat mempengaruhi kontribusi sektor ini terhadap perekonomian.

Gambar 3.8. Aktivitas Panen Padi Petani



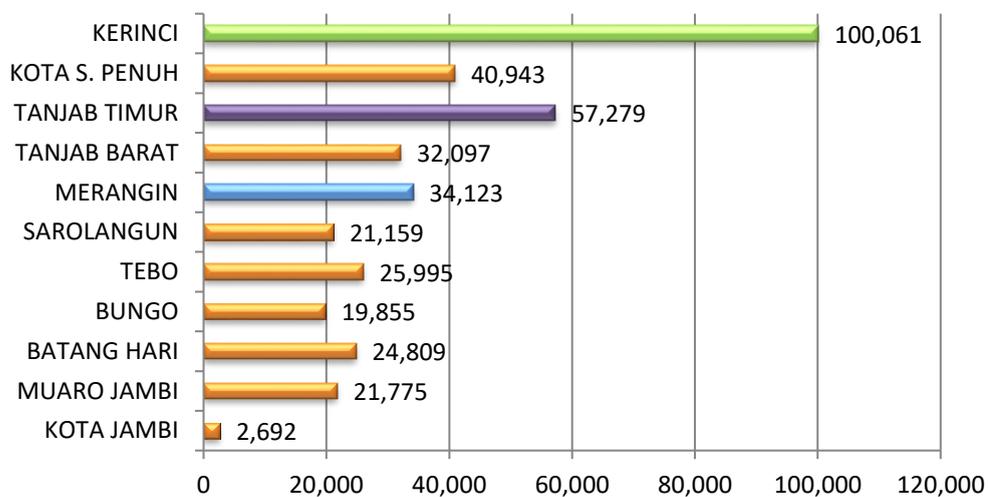
Tidak hanya itu, tingginya capaian khususnya untuk kawasan bawang merah dan kawasan aneka cabai juga memberikan angin segar terhadap hasil cabai dan bawang dimana untuk Provinsi Jambi kedua komoditas memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap inflasi. Dengan lahan produksi yang meningkat serta pengelolaan yang baik tentunya akan menjaga ketersediaan pasokan cabai dan bawang ke depan sehingga tingkat inflasi kedua komoditas tersebut dapat lebih dikendalikan.

Output lainnya adalah output-output yang sifatnya penunjang fisik juga telah dialokasikan secara khusus oleh Pemerintah sebagai bagian dari Program PEN untuk mendorong sektor pertanian. Contohnya adalah pembangunan Irigasi, embung serta perpompaan besar yang sangat bermanfaat untuk menjaga pengairan lahan khususnya pada musim kemarau akan sangat membantu petani untuk menjaga hasil produksinya. Program-program tersebut juga telah terealisasi dengan baik dengan rata-rata capaian sudah melebihi 90% kecuali untuk optimalisasi lahan yang masih dalam pengerjaan.

Sebagai bentuk dukungan terhadap infrastruktur pertanian, Pemerintah juga telah menyiapkan dana sebesar 239,71 Miliar yang digunakan untuk pembangunan irigasi Batang Asai. Pembangunan dilaksanakan di Kabupaten Sarolangun yang sudah berjalan sejak tahun 2017 yang lalu dan ditargetkan selesai pada tahun 2022 mendatang.

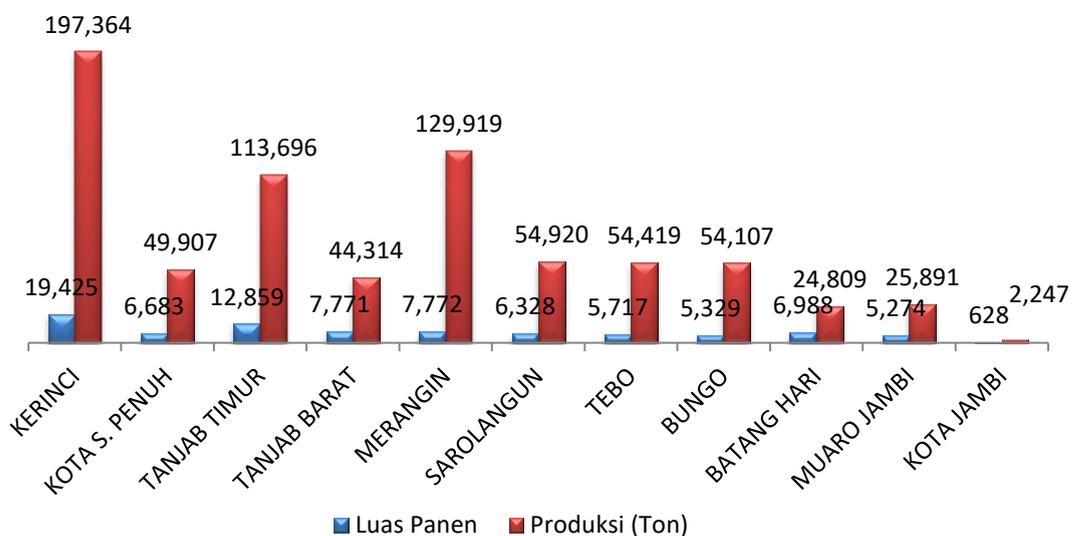
Pembangunan irigasi batang asai ini dilakukan dengan harapan agar Kabupaten Sarolangun dapat menjadi salah satu lumbung padi bagi Provinsi Jambi. Daerah Irigasi Batang Asai sendiri merupakan salah satu daerah irigasi yang masuk dalam program pengembangan yang dilakukan Ditjen SDA melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI. Daerah irigasi ini untuk mendukung ketahanan pangan nasional melalui pembangunan jaringan irigasi sawah. Pembangunan irigasi ini juga nantinya pada tahun 2022 diharapkan mampu mendongkrak produksi padi di Kabupaten Sarolangun yang pada saat ini memiliki tingkat produksi per hektar paling rendah di Provinsi Jambi dengan kapasitas hanya 33 ton/ha.

Diagram 3.21. Produksi padi Provinsi Jambi menurut Kabupaten-kota Tahun 2020 (ton GKG)



Sumber : BRS BPS, 2021

Diagram 3.22. Luas panen dan produksi padi menurut Kabupaten/ kota di Provinsi Jambi, Tahun 2021



Sumber: BRS BPS, 2021

Meningkatnya produksi maupun produktivitas pertanian setidaknya berpengaruh terhadap capaian kesejahteraan petani maupun nelayan. Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan Indikator Proxi Kesejahteraan Petani dan Nelayan. Jika NTP atau NTN lebih dari 100, artinya petani atau nelayan mengalami surplus. Dengan kata lain, pendapatan yang diterima lebih besar daripada pengeluaran sehingga hasil dari pertanian atau perikanan tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Perkembangan NTP dan NTN dapat dilihat pada grafik berikut :

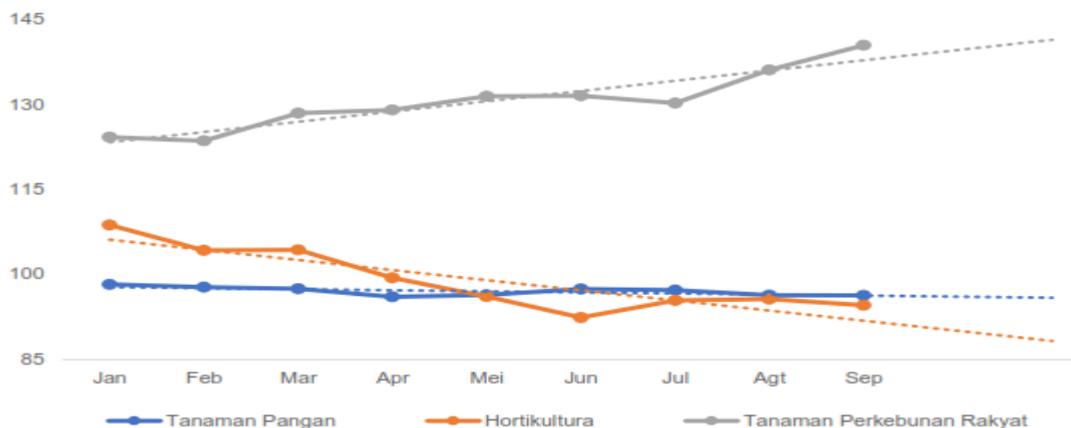
Grafik 3.16. NTP dan NTN Provinsi Jambi



Sumber : BPS 2021

Jika kita lihat perkembangan NTP dan NTN di Provinsi Jambi dari tahun lalu, NTP menunjukkan pertumbuhan yang positif. Bahkan dapat dikatakan bahwa untuk tahun 2021 ini memiliki capaian yang sangat menggembirakan mampu melebihi tingkat NTP Nasional. Namun sayangnya jika lihat NTP ini per subsektor masih banyak yang harus menjadi perhatian. Berikut adalah grafik tren nilai tukar per subsektor sepanjang tahun 2021.

Grafik 3.17. Perkembangan NTP per Subsektor dan Analisis Tren hingga Akhir Tahun 2021



Sumber : BPS 2021

Sampai dengan bulan September 2021, hanya subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat dan Perikanan yang secara konsisten memiliki nilai tukar diatas 100. Pemerintah Provinsi Jambi mempunyai komoditas unggulan perkebunan yakni kelapa sawit, karet, kelapa dalam, pinang, kopi dan kayu manis. Data Kementan tahun 2020 menyebutkan bahwa jumlah petani perkebunan rakyat kelapa sawit mencapai 285.297 KK dengan jumlah produksi sebesar 1.469.619 ton dan luas area ketiga terbesar di wilayah Sumatera yaitu sebesar 651.712 Ha. Harga komoditi sawit yang sempat anjlok di periode Juli 2021 membuat NTP sempat turun dibawah tren pada bulan Juli 2021. Namun, harga yang kembali merangkak naik di bulan September 2021 kembali membuat NTP tumbuh diatas tren dimana kondisi harga CPO mencapai 12.000 per kilogram dan harga TBS 2.604,43 per kilogram (InfoSAWIT), mendorong kenaikan indeks petani di subsector tanaman perkebunan rakyat ini.

Sementara untuk sektor tanaman pangan hingga triwulan III ini masih menunjukkan nilai tukar yang defisit atau dibawah 100 dengan tren yang cenderung menurun dari bulan ke bulan. Meskipun tren penurunan ini tidak terlalu tajam, namun sektor tanaman pangan ini menjadi perhatian khusus Pemerintah karena berdampak langsung terhadap ketahanan pangan. Tren yang terus menurun ini juga menunjukkan bahwa kesejahteraan petani terus menurun sementara biaya produksi dan biaya hidup cenderung terus meningkat.

Tidak hanya tanaman pangan, Hortikultura juga mulai terancam untuk kembali mengalami penurunan nilai tukar setelah sebelumnya mengalami perbaikan di awal tahun. Tren penurunan nilai tukar untuk tanaman pangan dan Hortikultura ini salah satunya dipengaruhi oleh menumpuknya hasil panen yang tidak terserap oleh pasar. Berdasarkan hasil penelusuran oleh Dinas terkait pemicunya adalah adanya bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah atau Lembaga Sosial. Bantuan sosial terutama dari Program PEN yang diberikan oleh Pemerintah memang membantu masyarakat untuk bertahan di masa pandemi. Namun disisi lain mengakibatkan para petani tidak memiliki pasar yang cukup untuk menjual hasil panennya karena masyarakat sudah memiliki beras yang berasal dari bantuan pemerintah. Akibatnya padi yang sudah dipanen menumpuk digudang dan tidak mampu dijual. Kalau pun ada yang terjual sudah dalam kondisi yang kurang baik atau dengan harga yang jauh dari harga yang diharapkan.

Program-program yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya ketahanan pangan adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan yang dipadukan dengan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan dan Program peningkatan produksi ternak.

Permasalahan :**1. Terjadi Penurunan Kapasitas Sumberdaya Alam**

Kapasitas Sumber Daya Alam yang potensial untuk lahan pertanian pangan dan hortikultura cenderung menurun baik luas maupun kualitasnya. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian terus berlanjut dengan laju yang cenderung meningkat (terutama di daerah Kabupaten Tanjung jabung Timur), begitu pula di daerah kabupaten lain terjadi pengurangan luas lahan pertanian akibat peruntukan bangunan, sementara upaya perluasan areal baru melalui cetak sawah yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat belum seimbang karena sangat kecil dan pembangunannya memerlukan investasi yang cukup besar disamping kualitasnya yang belum sebaik lahan sebelumnya. Menurunnya penggunaan lahan sawah setiap tahunnya rata-rata sebesar 4.900 Ha (2,94%) dan ini terjadi penggunaan lahan irigasi rata-rata pertahun sebesar 102 Ha (0,24%), lahan non irigasi rata-rata pertahun sebesar 4.801 Ha (3,83%). Alih fungsi tersebut banyak beralih kepengusahaan lahan pertanian bukan sawah sebagian besar untuk sektor perkebunan (sawit dan karet) dan baru-baru ini alih fungsi lahan menjadi lebih besar terhadap aktivitas tambang ilegal (*Illegal Mining*).

Disamping jumlahnya yang menyusut, juga terjadi kemerosotan tingkat kesuburan lahan akibat penggunaan lahan yang terus menerus yang tidak diikuti dengan pengembalian kesuburan lahan melalui penambahan pupuk organik. Sumber air Irigasi di Jambi umumnya juga sangat terbatas, dan hanya ada di beberapa Kabupaten (Kerinci, Merangin, Sarolangun, Bungo, Tebo Tanjung Jabung Timur & Tanjab Barat) dengan cakupan yang terbatas untuk melaksanakan intensifikasi pertanian melalui peningkatan Indeks pertanaman dan Penerapan System Rice Intensification (SRI), sehingga sering kesulitan. Begitu pula yang terjadi di Balai Benih Induk (BBI), sumber air yang ada hanyalah waduk buatan dengan skala kecil, sehingga seringkali terjadi kekeringan pada saat kemarau mulai tiba.

2. Produksi tanaman pangan masih rendah

Perkembangan inovasi teknologi terus berjalan dengan cepat dan cenderung mengalami perubahan setiap saat, begitu pula di sub sektor tanaman pangan. Sekarang sudah ada berbagai jenis varietas benih padi yang dihasilkan oleh Balitpa. Namun demikian, di daerah masih belum dikembangkan, karena memerlukan uji adaptasi. Hal ini karena relatif masih lemahnya kelembagaan yang ada di tingkat lapangan, disamping itu untuk penerapan teknologi tersebut membutuhkan saprodi yang sesuai dengan anjuran. Lambatnya inovasi dan penerapan teknologi baru mengakibatkan produktivitas usaha tani belum maksimal.

3. Sistem Alih Teknologi Masih Lemah dan belum Tepat Sasaran.

Sistem adopsi atau alih teknologi dinilai masih terlihat lemah karena diseminasi teknologi baru (*invention*) dan pengembangan teknologi yang sudah ada (*innovation*) hanya terbatas dan belum menyebar pada semua tingkatan petani.

Masih Rendahnya diseminasi teknologi disebabkan oleh beberapa hal antara lain penerapan teknologi pra panen sampai dengan pasca panen hanya terlaksana pada daerah yang terdani, sedangkan yang lain belum. Pada daerah – daerah tertentu, jumlah penggunaan benih masih terlalu besar dari semestinya dan dilain pihak kegiatan penanganan pasca panen belum dilaksanakan secara baik dan benar menurut GHP (*Good Handling Procedure*) yang menyebabkan kehilangan hasil masih cukup tinggi. Selain itu, keterlambatan penyaluran benih ke lapangan masih sering terjadi sehingga petani tidak dapat menggunakan bantuan benih tersebut.

4. Sarana dan prasarana masih sangat terbatas

Sarana dan prasarana dalam pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura belum sepenuhnya mendukung dan sangat terbatas, hal ini disebabkan oleh:

- a. Balai Benih Induk (BBI) Padi , BBI palawija dan BBI kentang sebagai Lembaga penyediaan benih sumber belum sepenuhnya dapat menyediakan benih
- b. Penggunaan Sarana produksi belum memenuhi kreteria 5 tepat : tepat jenis, tepat waktu dan tepat jumlah, tepat mutu dan harga yang terjangkau.
- c. Prasarana pertanian yang ada di tingkat petani sudah banyak yang rusak, dan petani belum sanggup membiayai untuk perbaikan.
- d. Petani belum mempunyai kesadaran dalam memelihara sarana yang ada misalnya jaringan irigasi, jaringan jalan usahatani dan bantuan alat dan mesin pertanian.
- e. Masih lemahnya infrastruktur pasca panen dan kelembagaan pemasaran yang belum efektif.

6. Kelembagaan Pertanian belum berkembang dengan baik

Sejalan dengan semangat reformasi maka fungsi kelembagaan menjadi lebih penting terutama lembaga pelayanan sehingga petani mampu melaksanakan usahanya secara maksimal. Jumlah Kelompok tani yang pasti saat ini sulit diketahui. Jumlah penyuluh pertanian yang pindah tugas ke struktural, pensiun atau meninggal sudah mulai teratasi melalui penambahan tenaga PPL melalui THL-TB PPL, THL – TB POPT.

7. Rantai Tataniaga yang Panjang dan Sistem Pemasaran Belum Optimal

Rantai pemasaran yang panjang berakar dari kondisi infrastruktur perdesaan yang kurang mendukung seperti ketersediaan informasi pasar, sarana transportasi dan jalan desa. Disamping itu, kemampuan petani terbatas dalam menyimpan produknya, sehingga sering kali hasil panen harus segera dijual sesaat sesudah panen. Disamping masih lemahnya infrastruktur pasca panen, kelembagaan pemasaran juga belum efektif.

Dalam hal ini perlu dilakukan upaya dan kebijakan kemitraan, dana talangan, pasar petani, temu usaha/bisnis dan pemberdayaan petugas informasi pasar dimana sebagai program mengatasi kekurangan pasokan pada musim tertentu atau over produksi pada musim panen raya.

Upaya untuk meningkatkan efisiensi rantai pemasaran telah dilakukan dengan memfasilitasi pembangunan jalan usaha tani, membangun pola kemitraan, Sub Terminal Agribisnis (STA) di Kabupaten Kerinci, yang umumnya belum memberikan hasil maksimal. Upaya pemerintah memberikan jaminan harga terkendala oleh dana dan kemampuan yang optimal. Kebijakan promosi yang telah diterapkan selama ini perlu terus ditingkatkan melalui kegiatan yang lebih konkrit.

Solusi :

1. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Peningkatan Produksi dan Ketahanan Pangan
2. Meningkatkan Keanekaragaman Konsumsi Pangan Masyarakat dan Menurunnya Ketergantungan pada Pangan Pokok Beras melalui Pengalihan Konsumsi Beras ke Non Beras.
3. Penyediaan benih yang bermutu dari varietas unggul dengan harga yang terjangkau oleh petani dan sesuai dengan kebutuhan
4. Penggunaan/Penanaman Benih bermutu Varietas Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura.
5. Menumbuhkembangkan Balai Benih, Penangkar Benih serta Produksi Benih Produsen benih yang tangguh, yang mampu menyediakan benih bermutu.
6. Mengembangkan dan menerapkan teknologi maju komoditi tanaman pangan dan hortikultura
7. Pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya lahan secara selektif
8. Mendorong peningkatan produktivitas, produksi dan mutu melalui inovasi teknologi baru (terutama penggunaan benih unggul)
9. Mendorong sinergitas antar subsistem agribisnis
10. Mendorong peningkatan produktivitas, produksi dan mutu melalui inovasi teknologi baru.
11. Mendorong peningkatan nilai tambah produk dan diversifikasi produksi tanaman pangan dan hortikultura.
12. Mempercepat transfer teknologi dan tepat sasaran
13. Mendorong pola partisipasi aktif seluruh stakeholder
14. Pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia
15. Pemberdayaan petani dan masyarakat.
16. Meningkatkan efisiensi usahatani, pengolahan dan pemasaran hasil

Sasaran 8

Terciptanya Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi yang Menyentuh terhadap Akses dan Sentra Perekonomian



Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pendukung daya saing. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diyakini sebagai motor pembangunan suatu daerah. Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Infrastruktur juga memegang peranan penting dalam peningkatan produktivitas sektor produksi.

Infrastruktur transportasi dalam fungsinya sebagai fasilitas publik memberikan pelayanan publik bagi masyarakat yaitu: (1) mendorong pemerataan pembangunan, (2) melayani kebutuhan pergerakan masyarakat dengan harga yang terjangkau, (3) memperlancar mobilitas distribusi barang dan jasa; dan (4) mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Dalam kaitannya dengan sektor antara, infrastruktur transportasi menghubungkan berbagai macam aktivitas ekonomi, merupakan prasarana penghubung antar daerah dan memudahkan mobilitas penduduk serta memperlancar lalu lintas barang antar daerah.

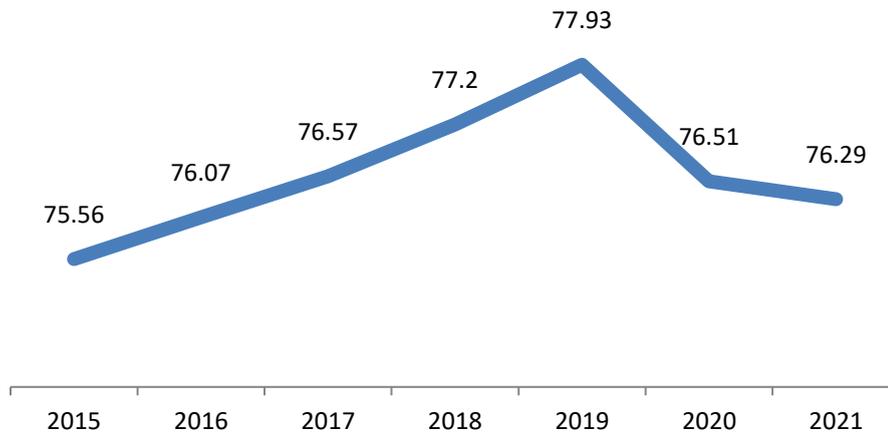
Capaian sasaran akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian ditunjukkan oleh indikator persentase jalan Provinsi dalam Kondisi mantap dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 3.26. Capaian Indikator Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi mantap sebagai Indikator Sasaran Terciptanya Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi yang Menyentuh terhadap Akses dan Sentra Perekonomian

| Indikator Kinerja | Kondisi Awal (2015) | 2020 | 2020 | | | Realisasi Akhir RPJMD 2021 |
|-------------------------------------|---------------------|-------|--------|-----------|-----------|----------------------------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | |
| Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap | 75,56 | 76,51 | 79,54 | 76,29 | 95,91 | 79,54 |

Penanganan jalan dan jembatan menjadi sangat sentral., karena jika tidak mampu dilaksanakan akan berakibat terhambatnya aktifitas perpindahan barang dan orang. Total panjang jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Jambi berdasarkan SK.Gub.No.567/Kep.Gub/DPU/2012 tanggal 04 Oktober 2012 adalah 1.504,93 Km. Kemudian, dengan adanya peningkatan status jalan dari jalan provinsi menjadi jalan nasional berdasarkan Ketetapan Menteri PUPR pada tanggal 23 April 2015, maka total panjang jalan provinsi sampai dengan Tahun 2015 adalah 1129,906 km. Beberapa ruas Jalan provinsi yang telah ditetapkan tersebut merupakan jalan menuju sentra produksi dengan total sepanjang 855,589 km.

Grafik 3.15. Capaian indikator jalan dalam kondisi mantap Provinsi Jambi Tahun 2015-2021



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan PR, 2021

Tingkat kemantapan jalan ditentukan oleh dua kriteria yakni mantap secara konstruksi dan mantap dalam layanan lalu lintas. Berdasarkan Keputusan Menkimpraswil No.534/KPTS/M/2001 maka Jalan dengan kondisi mantap adalah akumulasi jalan kondisi baik dan sedang. Dalam rangka

Gambar 3.9. Ruas Jalan Provinsi Jambi

mewujudkan jalan dalam kondisi mantap, maka penanganan jalan di Provinsi Jambi pada tahun 2020 difokuskan pada pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan serta pemenuhan kebutuhan drainase di jalan tersebut. Capaian indikator persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap pada tahun 2021 adalah sebesar 76,29%. Bila dibandingkan dengan target pada



tahun 2021 sebesar 79,54%, maka persentase capaian ini mencapai 95,91% atau masuk dalam kategori sangat tinggi.

Guna mewujudkan capaian di atas, Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan Program Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan dengan kegiatan – kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan berikut :

- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah I (Kab. Tanjab Barat)
- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah II (Kab. Tanjab Timur)
- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah III (Kab. Muaro Jambi)
- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IV (Kab. Bungo)
- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah V (Kab. Batanghari dan Muaro Jambi)

- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah VI (Kab. Merangin)
- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah VII (Kab. Kerinci)
- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah VIII (Kab Sarolangun)
- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah IX (Kab. Tebo)
- Kegiatan Peningkatan Jalan di Wilayah Kota Jambi
- Kegiatan Rehab/pemeliharaan Jembatan di Jalan Provinsi
- Perencanaan dan pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi Jambi (P2 TProv)
- Kegiatan Peningkatan jalan dengan Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK)



Gambar 3.10. Aktifitas Perbaikan Jalan di Provinsi Jambi Ruas Kabupaten Bungo

Terjadinya penurunan jalan provinsi dalam kondisi mantap mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan infrastruktur. Di awal periode 2021 ini tidak hanya dari segi jalan mantap provinsi saja, tapi juga indikator pendukung lainnya seperti jalan menuju akses sentra produksi yang mendukung program-program prioritas terwujudnya Jambi Tuntas 2021. Adapun faktor yang

mempengaruhi perkembangan jalan provinsi dalam kondisi mantap ini yaitu terdiri atas 3 faktor yaitu faktor yakni : a) Kemampuan teknis, b) Pengawasan yang baik, c) Matangnya perencanaan

Permasalahan :

1. Permasalahan yang umumnya terjadi adalah kerusakan jalan yang terjadi tidak serta merta bisa langsung ditangani, namun harus menunggu perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya, sehingga kondisi jalan yang rusak akan semakin parah.
2. Peningkatan kondisi jalan baru mampu sedikit mengurangi jalan dalam kondisi rusak berat dan rusak ringan menjadi kondisi sedang dan belum mampu menambah panjang jalan dalam kondisi baik secara signifikan karena laju kerusakan lebih cepat daripada kemampuan Pemerintah Daerah dalam membangun.
3. Rasionalisasi anggaran tahun 2021 yang digunakan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya memutus mata rantai virus covid-19 pada Provinsi Jambi menyebabkan beberapa paket kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan tidak bisa dilaksanakan sehingga berdampak pada tidak tercapainya target kinerja tahun 2021.

Solusi :

1. Pemerintah Provinsi Jambi menyediakan alat berat sebagai alat tanggap darurat untuk penanganan awal sehingga kerusakan tidak semakin parah menjelang perbaikan dilakukan pada tahun berikutnya.
2. Meningkatkan kemampuan teknis jalan yang seiring dengan pengawasan yang baik dan perencanaan yang matang.
3. Selain melakukan perbaikan secara fisik, juga dilakukan pengawasan terhadap kendaraan yang menggunakan jalan, sehingga tidak dilewati oleh kendaraan yang melebihi kemampuan jalan.

Sasaran 9

Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Listrik



Pembangunan infrastruktur kelistrikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap energi listrik. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Provinsi Jambi maka kebutuhan akan energi listrik juga turut meningkat. Tenaga listrik juga menjadi kebutuhan pokok dalam hal industrialisasi, sehingga suatu wilayah yang



energi listriknya tidak bisa bersaing sudah dapat dipastikan industrinya juga tidak dapat bersaing.

Sebagai suatu daerah yang sedang mengarahkan perubahan sektor unggulan dari sektor primer ke sektor sekunder, Provinsi Jambi menjadikan sasaran meningkatnya pemenuhan

kebutuhan listrik menjadi salah satu sasaran yang harus dicapai dalam lima tahun kedepan. Adapun indikator yang menggambarkan capaian sasaran ini adalah Rasio Elektrifikasi, dimana capaian pada tahun 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 3.27. Capaian Rasio Elektrifikasi Pemenuhan Kebutuhan Listrik sebagai Indikator Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Listrik

| Indikator Kinerja | Kondisi Awal (2016) | 2020 | 2021 | | | Realisasi Akhir RPJMD 2021 |
|---------------------|---------------------|-------|--------|-----------|-----------|----------------------------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | |
| Rasio elektrifikasi | 81,5 | 99,90 | 96 | 99,99 | 104,15 | 96 |

Pada tahun 2021, capaian indikator rasio elektrifikasi terealisasi sebesar 99,90. Capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 96% atau terealisasi sebesar 104,15% dengan kriteria **sangat tinggi**. Capaian ini sekaligus melewati target RPJMD 2021 atau terealisasi mencapai 104,15% dengan kategori sangat tinggi.

Tabel 3.28. Potensi Geothermal Provinsi Jambi

| No. | Lokasi | Resources (Mwe) | | | Reserves (Mwe) | |
|-----|-------------------------|-----------------|-----------|-----------|----------------|--------|
| | | Speculative | Hypotetic | Predicted | Possible | Proven |
| 1. | Gunung Kapur, Kerinci | 25 | - | - | - | - |
| 2. | Gunung Kaca, Kerinci | 25 | - | - | - | - |
| 3. | Sungai Betung, Kerinci | 100 | - | - | - | - |
| 4. | Semurup, Kerinci | - | - | 208 | - | - |
| 5. | Lempur, Kerinci | - | - | 150 | 15 | 40 |
| 6. | Air Dikit, | 25 | - | - | - | - |
| 7. | Graha Nyabu, Merangin | - | 185 | - | - | - |
| 8. | Sungai Tenang, Merangin | - | 74 | - | - | - |

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2021

Provinsi Jambi memiliki cukup banyak potensi energi baru dan terbarukan yang dapat dikembangkan untuk menutupi kekurangan energi di Provinsi Jambi. Untuk Sumber energi, salah satu sumber energi terbarukan (*renewable resources*) yang terdapat di Provinsi Jambi adalah panas bumi (geothermal). Data-data lokasi potensi

geothermal di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel di atas. Potensi sumber energi lainnya adalah air terjun, yang berlokasi di beberapa kabupaten yang berada di bagian Barat Provinsi Jambi. Adapun lokasi potensi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah.

Gambar. 3.11. Sumber Energi Panas Bumi Kab. Kerinci



Tabel 3.29. Lokasi Potensi Air terjun di Provinsi Jambi

| NO. | KABUPATEN | LOKASI | KET |
|-----|------------|--|---------|
| 1. | MERANGIN | Air Terjun Telun Tujuh Desa Rantau Suli Kec. Sungai Tenang | 3,8 MW |
| | | Desa Renah Pelaan Kec. Jangkat | 200 KW |
| | | Desa Tiaro Kec. Muara Siau | 50 KW |
| 2. | TEBO | Desa Semambu Kec. Sumay | |
| 3. | KERINCI | Desa Air Bahan I Kec. Gunung Kerinci | 13 KW |
| | | Desa Air Bahan II Kec. Gunung Kerinci | 180 KW |
| | | Desa Kuning Kec. Siulak Deras | 70 KW |
| 4. | SAROLANGUN | Desa Simpang Narso Kec. Batang Asai | 7,8 KW |
| 5. | BUNGO | Dusun Tanjung Bungo Kec. Limbur Lubuk Mengkuang | 10 KW |
| | | Dusun Laman Panjang Dusun Aur Cino Kec. Bathin III | 19 KW |
| | | Desa Sungai Talang Kec. Bathin III Ulu | 12 KW |
| | | Air Terjun Telun Tirau Dusun Baru Pelepat Dusun Batu Kerbau Kec. Pelepat | 32,6 KW |

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2021

Selain panas bumi dan air terjun, Provinsi Jambi juga memiliki potensi air yang bisa dikembangkan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Adapun lokasi potensi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

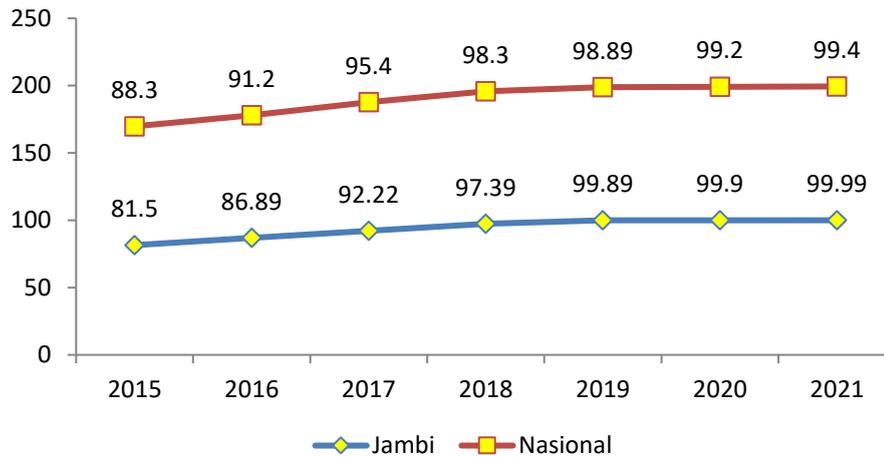
Tabel 3.30. Data Potensi Energi Potensial Air Terjun di Kabupaten Kerinci

| NO. | NAMA AIR TERJUN | KETINGGIAN AIR TERJUN | ENERGI YANG DIHASILKAN | LEBAR AIR TERJUN | LEBAR SUNGAI | KETINGGIAN DPL | JARAK DARI KOTA |
|-----|------------------|-----------------------|------------------------|------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1. | BATU NAMORA | 50 M | 5 – 6,2 MW | 6 – 7 M | 6 – 7 M | 1200 – 2000 | 50 KM |
| 2. | BEDENG IV | 25 M | 1,6 – 2 MW | 4 – 5 M | 5 – 6 M | 700 – 1000 | 45 KM |
| 3. | SELUANG BERSISIK | 50 M | 2 – 3,2 MW | 7 – 8 M | 7 – 7,6 M | 1000 – 1200 | 40 KM |
| 4. | TALANG KEMULUN | 23 M | 1,5 – 2 MW | 5 – 6 M | 5 – 7 M | 600 – 1000 | 18 KM |
| 5. | PANCURAN ARO | 75 M | 6 – 8,3 MW | 8 – 9,5 M | 6 – 9 M | 800 – 2000 | 15 KM |
| 6. | SUNGAI MEDANG | 25 M | 2 – 3 MW | 5 – 6,5 M | 6 – 9 M | 500 – 870 | 10 KM |
| 7. | PANCURAN TUJUH | 30 M | 4,5 – 6,3 MW | 7 M | 6 – 7 M | 800 – 1700 | 30 KM |
| 8. | TELUN BERASAP | 75-90 M | 7 – 8,3 MW | 5 – 7 M | 6 – 7 M | 1200 – 2000 | 60 KM |
| 9. | BUKIT TAPAN | 60 M | 3,5 MW | 5 – 7 M | 5 – 7 M | 1200 – 2000 | 18 KM |
| 10. | GUNUNG TUJUH | 80 M | 15 MW | 6 – 7 M | 6 – 7 M | 1200 – 2000 | 65 KM |

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2021

Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Rasio elektrifikasi adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang berlistrik dengan jumlah keseluruhan rumah tangga. Rasio elektrifikasi di Provinsi Jambi terus meningkat setiap tahun. Adapun perkembangan capaian indikator rasio elektrifikasi dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3.19. Rasio Elektrifikasi Provinsi Jambi dibandingkan dengan Nasional



Sumber: Kementerian ESDM & Dinas ESDM Provinsi Jambi, 2021

Capaian rasio elektrifikasi Provinsi Jambi sejak tahun 2020 berada di atas level nasional dengan gap 0.7 poin, bahkan pada tahun 2021 capaiannya selisih 0,5 poin dibanding nasional. Program yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 dalam rangka peningkatan rasio elektrifikasi tersebut adalah Program Pengembangan Energi.

Permasalahan :

Beberapa potensi energi alternatif seperti kotoran sapi, POME, Biji jarak, tenaga surya, angin, panas bumi dan potensi air terjun belum termanfaatkan secara maksimal

Solusi :

Memanfaatkan potensi energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif di Provinsi Jambi untuk listrik perdesaan dan sebagai upaya meningkatkan rasio elektrifikasi Provinsi Jambi

Sasaran 10

Meningkatnya Akses terhadap Air Bersih dan Pemenuhan Kebutuhan Jaringan irigasi



Air bersih adalah kebutuhan dasar manusia. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goal/SDGs*) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih. Sekjen PBB menetapkan 27 panel tingkat tinggi pada bulan Juli 2012. Panel tingkat tinggi merupakan kemitraan global yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan mengubah perekonomian melalui pembangunan berkelanjutan.

Fokus utama ada pada ketersediaan pangan, air bersih dan energi yang merupakan dasar dari kehidupan. Perubahan yang paling penting dalam konsumsi berkelanjutan dan produksi akan didorong oleh teknologi, inovasi, desain produk, pedoman kebijakan yang terperinci, pendidikan dan perubahan perilaku. Panel mengusulkan dua belas *universal goals* serta target nasional dan akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau pada tahun 2030.

Dalam rangka mendukung target nasional ini, Provinsi Jambi menjadikannya sebagai salah satu sasaran jangka menengah daerah. Sementara untuk mendukung fokus ketersediaan pangan, salah satu prasarana pendukungnya adalah irigasi yang baik. Adapun capaian sasaran meningkatnya akses terhadap air bersih ditunjukkan oleh indikator Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, perkotaan dan pedesaan, sedangkan capaian pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi ditunjukkan oleh indikator persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik.

1. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan

Air minum merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan makhluk hidup. Air minum berperan agar makhluk hidup khususnya manusia dapat bertahan hidup. Kualitas air minum merupakan faktor yang sangat menentukan bagi kesehatan. Pasokan air yang memadai sangat penting untuk mengurangi risiko penyakit dan untuk menjamin hak atas pangan, kesehatan dan perumahan. Keamanan dan aksesibilitas terhadap air bersih menjadi perhatian besar di seluruh dunia. Mudahnya akses terhadap air bersih dan sanitasi dapat meningkatkan kesehatan individu, sehingga dapat meningkatkan kehadiran di sekolah dan meningkatkan produktifitas. Oleh karena itu sumber daya air perlu dikelola dengan baik untuk pemenuhan hak asasi manusia mendapatkan air minum dan sanitasi yang aman dan bersih.

Gambar 3.12. Ilustrasi Ketersediaan Air Minum Layak



Tabel 3.31. Capaian Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2021 sebagai Indikator Sasaran Meningkatnya Akses terhadap Air Bersih

| Indikator Kinerja | Kondisi Awal (2016) | 2020 | 2021 | | | Realisasi Akhir RPJMD 2021 |
|---|---------------------|-------|--------|-----------|-----------|----------------------------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | |
| Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan | 62,75 | 70,71 | 80 | 79,70 | 99,62 | 79,70 |

Pada tahun 2021, capaian indikator Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan terealisasi sebesar 79,70 persen. Capaian ini sangat tipis dalam mencapai target akhir RPJMD yang telah ditetapkan sebesar 80 persen serta terealisasi sebesar 99,62% dengan kriteria **sangat tinggi**.

Grafik 3.20. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan



Sumber : Dinas PUPR Prov. Jambi, 2021

Berdasarkan data di atas, terlihat perkembangan proporsi air minum layak Provinsi Jambi yang terus menunjukkan peningkatan walaupun belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Realisasi indikator proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan Provinsi Jambi pada tahun 2021 adalah sebesar 79,7%. Capaian ini belum mencapai target akhir RPJMD 2021 yang telah ditetapkan sebesar 80% dengan capaian realisasi sebesar 99,62% dan termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Pada dasarnya Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan banyak hal dalam rangka pemenuhan target indikator ini, seperti perluasan/pemasangan jaringan pipa distribusi pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun bila dibandingkan dengan nasional, terlihat bahwa capaian Provinsi Jambi atas indikator ini selalu berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa percepatan yang dilakukan oleh Provinsi Jambi belum mampu mengimbangi laju pemenuhan kebutuhan air bersih secara nasional.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator ini adalah Program Penyediaan dan pengelolaan air baku.

Permasalahan :

Upaya peningkatan proporsi akses rumah tangga terhadap air minum layak masih menemukan kendala yang berhubungan dengan target cakupan pembangunan yang besar sementara sumber pendanaan terbatas, kemampuan pelayanan operator air minum serta permasalahan kemiskinan yang membatasi kemampuan masyarakat dalam mengakses air minum layak.

Gambar 3.13. Potret kebutuhan air bersih dan sanitasi layak



Solusi :

Terus melakukan perluasan/ pemasangan jaringan pipa distribusi pada masyarakat berpenghasilan rendah dan terus bekerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/ kota dalam pemenuhan sarana prasarana air bersih sesuai dengan kewenangan masing-masing

2. Persentase jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik

Luas areal layanan Irigasi di Provinsi Jambi adalah sebesar 33.248 Ha mencakup 92 Daerah Irigasi (DI) yang terdiri atas 2 DI Kewenangan Pusat, 4 DI Kewenangan Provinsi dan 86 DI Kewenangan Kab/Kota. Adapun DI Kewenangan Provinsi hingga tahun 2021 adalah DI Suban, DI Batang Ule, DI Tanduk, dan DI Limun Singkut dengan luas keseluruhan yang 6.029 Ha.

Pada tahun 2021, capaian indikator persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik terealisasi sebesar 77,02 persen. Capaian ini belum mencapai target yang telah ditetapkan pada periode akhir RPJMD 2021 sebesar 91% atau terealisasi sebesar 84,63% dengan kriteria **tinggi**. Capaian tahun 2021 tersebut mengalami peningkatan dibanding capaian tahun 2020, dimana pada tahun 2020 persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik mencapai 70,71 persen.

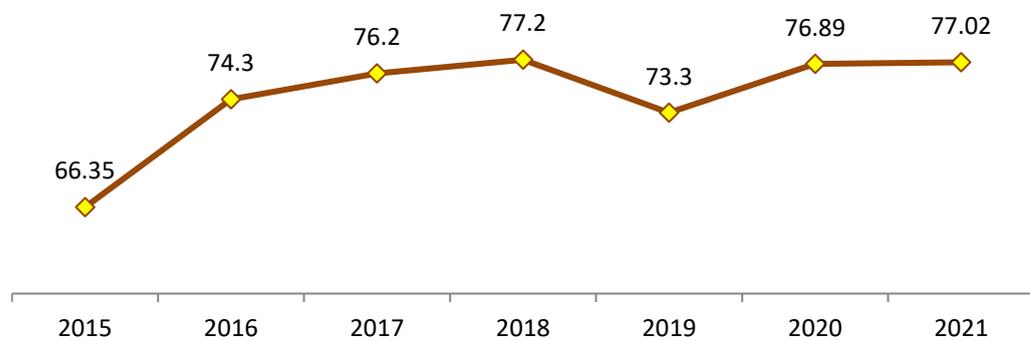


Gambar 3.14. Daerah irigasi di Kab. Kerinci

Tabel 3.32. Capaian persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik sebagai Indikator pada Sasaran Meningkatnya Akses Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Jaringan Irigasi

| Indikator Kinerja | Kondisi Awal (2016) | 2020 | 2021 | | | Realisasi Akhir RPJMD 2021 |
|--|---------------------|-------|--------|-----------|-----------|----------------------------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | |
| Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik | 66,36 | 76,89 | 91 | 77,02 | 84,63 | 77,02 |

Grafik 3.17 Capaian Indikator persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik di Provinsi Jambi Tahun 2015-2021



Sumber : BPS, Dinas PUPR Prov. Jambi, data diolah, 2021

Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik atau fungsional memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama pada Provinsi Jambi yang mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian. Persentase fungsionalisasi daerah irigasi sama artinya dengan meningkatkan fungsional lahan pertanian. Peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional ditandai dengan Pertumbuhan Ekonomi dan meningkatnya lahan pertanian.

Adapun faktor yang mempengaruhi Peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional yaitu terdiri atas 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang mempengaruhinya yaitu kemampuan teknis, pengawasan yang baik, matangnya perencanaan. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional yaitu dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah dan kerjasama antar instansi yang terkait, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Langkah yang perlu diperhatikan dalam Peningkatan luas daerah irigasi yang fungsional yaitu aksesibilitas dan kondisi lahan pertanian.

Selain faktor tersebut diatas, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 guna mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran tidak dapat diabaikan begitu saja karena program dan kegiatan dimaksud memberikan andil yang besar terutama pada peningkatan dibidang irigasi. Sepanjang tahun 2021 Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan air lainnya ini dilaksanakan kegiatan pendukungnya yaitu Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi. Adapun fokus kegiatan adalah penanganan rehabilitasi saluran primer; saluran sekunder; jalan inspeksi; bangunan pelengkap; bendung; dan lantai saluran; serta pintu air.

Permasalahan :

Capaian persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik tidak merata pada seluruh Daerah Irigasi kewenangan Provinsi karena beberapa faktor, salah satunya faktor alam seperti longsor yang penanganannya tidak bisa langsung pada tahun anggaran tersebut.

Solusi :

Percepatan rehabilitasi jaringan pada Tahun Anggaran 2021.



Sasaran 11

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan

Sumber daya alam merupakan semua komponen yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar dapat bertahan hidup dan lebih sejahtera. Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya alam merupakan salah satu modal besar yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dibalik dampak ekonomi yang positif, bila tidak dilakukan pengelolaan yang benar maka dampak yang ditimbulkan terutama yang berhubungan dengan lingkungan dan sosial akan buruk bagi generasi mendatang.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jambi merasa berkewajiban untuk mengelola sumber daya alam di Provinsi Jambi dengan baik dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi dan mengurangi seminimal mungkin dampak lingkungan yang akan diakibatkan.

Keinginan luhur tersebut dijawantahkan dalam salah satu sasaran strategis daerah, yaitu “meningkatkan kualitas pengelolaan SDA yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan”. Capaian sasaran tersebut ditunjukkan oleh indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan capaian pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.33. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai Indikator pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan

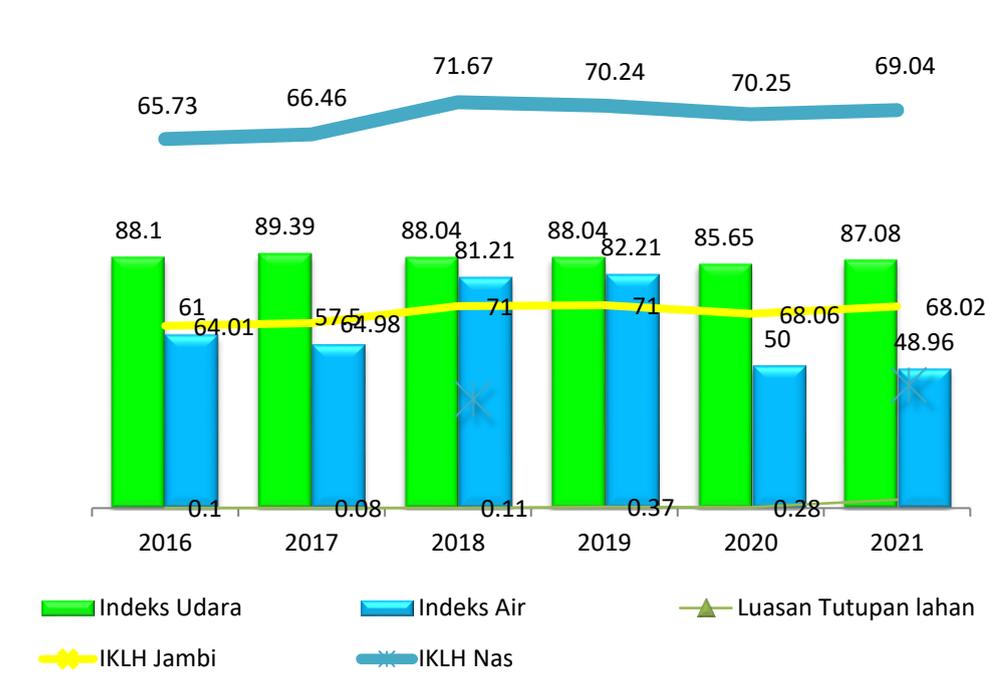
| Indikator Kinerja | Kondisi Awal (2016) | 2020 | 2020 | | | Realisasi Akhir RPJMD 2021 |
|----------------------------------|---------------------|-------|--------|-----------|-----------|----------------------------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | |
| Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 52,72 | 68,06 | 66 | 68,02 | 103,06 | 68,02 |

Kualitas Lingkungan Hidup di Indonesia saat ini dinilai secara kuantitatif dengan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diadopsi dari beberapa sumber diantaranya *Environmental Performance Index* (EPI) yang dikembangkan oleh sebuah pusat studi di Universitas Yale, Amerika Serikat. Tiga indikator yang menjadi dasar penilaian IKLH di Indonesia mencakup kualitas air sungai, dan kualitas udara ambien. IKLH merupakan sebuah kebijakan yang diambil untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah dan menjadi salah satu cara untuk mereduksi banyaknya data dan informasi mengenai kualitas lingkungan hidup sehingga dapat dijadikan sebagai sebuah parameter untuk membandingkan kualitas lingkungan hidup di wilayah tersebut dengan wilayah lainnya atau membandingkan kualitas lingkungan hidup pada tahun sekarang dengan tahun sebelumnya.

Dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Lebih lanjut dalam Pasal 262 ayat (1) disebutkan bahwa Rencana pembangunan Daerah tersebut dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Karena dalam perumusan rencana pembangunan daerah harus berwawasan lingkungan, maka IKLH dapat menjadi masukan bagi para pengambil keputusan baik tingkat pusat maupun daerah dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan lingkungan dan mengukur keberhasilan program-program pengelolaan lingkungan.

Data realisasi IKLH tahun 2021 yang disampaikan pada laporan ini merupakan hasil rata-rata perhitungan terhadap Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Tutupan Lahan (penurunan lahan kritis). Berdasarkan data tersebut, realisasi IKLH Provinsi Jambi sejak tahun 2019 telah melebihi target yang ditetapkan dan masuk dalam kategori **sangat tinggi** dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 68,02. Target ini Bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2021 ini, maka realisasi ini telah mencapai 103,06% dari target akhir IKLH yang ditetapkan sebesar 66%.

Diagram 3.23. Perkembangan komponen IKLH di Provinsi Jambi dan Perbandingan dengan IKLH Nasional

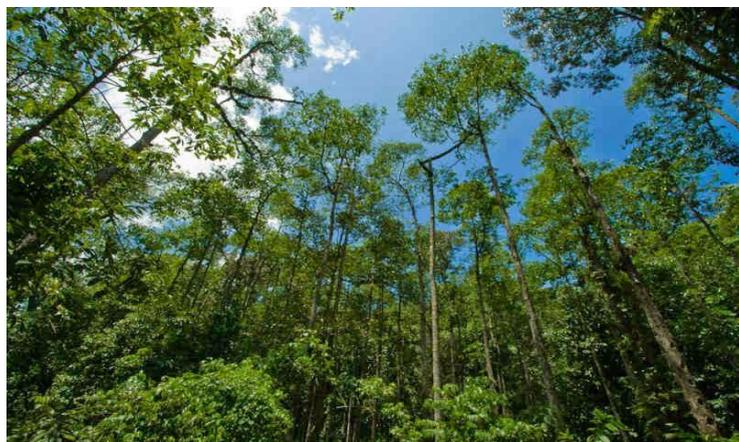


Sumber: Kemen LH (diolah), 2021

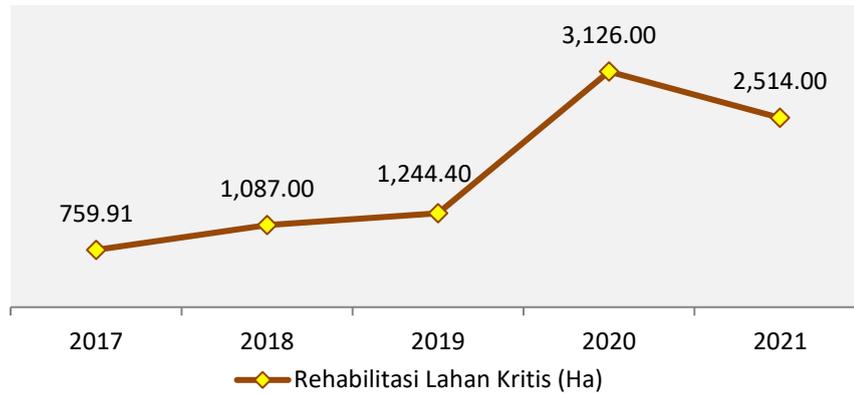
Gambar di atas memperlihatkan bahwa IKLH Provinsi Jambi berada dibawah IKLH Nasional, terlihat penurunan yang pada level nasional dan provinsi dengan selisih antara IKLH Nasional dan Provinsi Jambi terpaut 1,01. Namun demikian, upaya-upaya perbaikan kualitas lingkungan harus tetap dilakukan secara masif. Perbaikan indeks tutupan lahan akan membutuhkan waktu beberapa tahun walaupun rehabilitasi hutan dan lahan terus dilakukan baik oleh Pemerintah Provinsi Jambi maupun pihak-pihak lainnya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tutupan lahan tersebut, pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan rehabilitasi terhadap lahan-lahan kritis seluas 2.514 hektar yang bersumber dari dana DBH-DR, NGO dan kompensasi pinjam pakai kawasan hutan, sehingga secara agregasi dari tahun 2016 s.d. 2021 telah terjadi penurunan luas lahan kritis sebesar 1,03% persen.

Gambar 3.15. Ilustrasi Luas Kawasan Tertutup Pohon



Grafik 3.22. Rehabilitasi lahan dan hutan yang dilakukan tahun 2016-2021



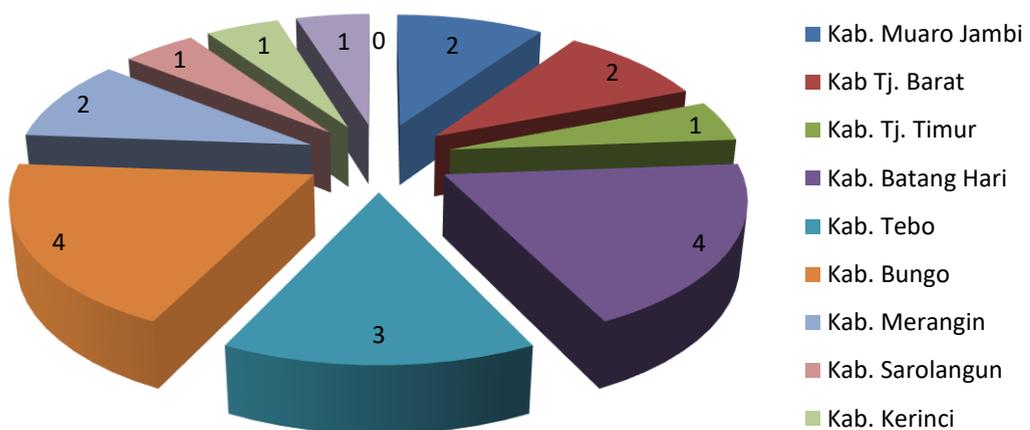
Luas Lahan Kritis Awal Periode RPJMD : 844.647 Ha

Sumber: Dinas Kehutanan Prov. Jambi, 2021

Pemerintah Provinsi Jambi juga terus melakukan upaya-upaya perbaikan-perbaikan kualitas udara yang sangat dipengaruhi oleh kasus kebakaran lahan dan hutan yang terjadi pada musim kemarau. Tim terpadu kebakaran Hutan dan Lahan terus melakukan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan terus melakukan pemantauan hot spot, pemantauan langsung ke lapangan dan melakukan pemadaman secara cepat pada lahan yang terbakar. Tugas tim terpadu kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2021 tidak terlalu berat berat karena pemahaman penduduk/perusahaan terhadap tata kelola lahan sudah semakin baik.

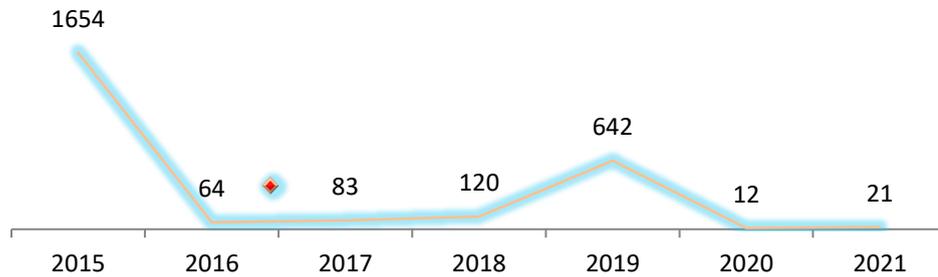
Berdasarkan data pemantauan hot spot, terdapat 12 hot spot dengan kategori high conf rate >80% di Provinsi Jambi yang tersebar di wilayah Kabupaten/kota dan terbanyak berada di Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin.

Gambar 3.16. Sebaran Hotspot Kategori High (conf.rate >80%) di Provinsi Jambi pada Bulan Agustus Tahun 2021



Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2021

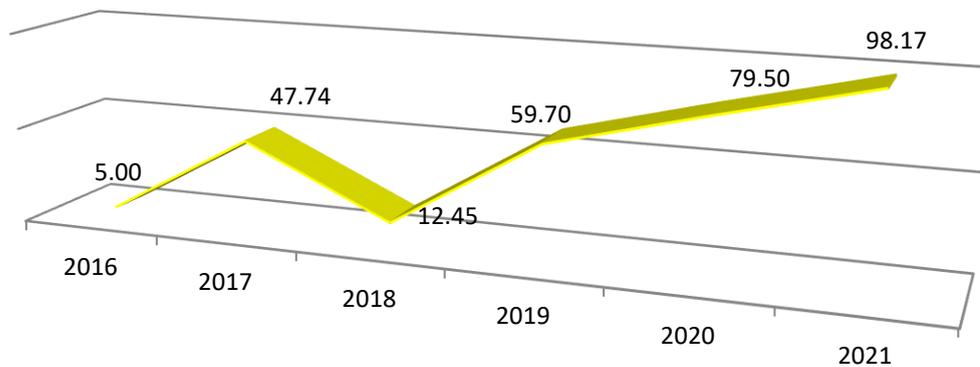
Grafik 3.23. Perkembangan Jumlah Hot spot Kategori High (conf.rate >80%) pada Bulan Agustus 2021 di Provinsi Jambi



Sumber: BMKG Jambi, 2021

Perkembangan luas lahan dan hutan terbakar dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.24. Persentase Luas Lahan dan Hutan terbakar di Provinsi Jambi Tahun 2016-2021



Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2021

Sumber daya alam bukan hanya hutan, namun semua komponen yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar dapat bertahan hidup dan lebih sejahtera. Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya alam merupakan salah satu modal besar yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dibalik dampak ekonomi yang positif, bila tidak dilakukan pengelolaan yang benar maka dampak yang ditimbulkan terutama yang berhubungan dengan lingkungan dan sosial akan buruk bagi generasi mendatang.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan IKLH, Pemerintah Provinsi Jambi juga berkewajiban untuk mengelola sumber daya alam di provinsi Jambi dengan baik dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi dan mengurangi seminimal mungkin dampak lingkungan yang akan diakibatkan. Salah satunya adalah pelaksanaan aktivitas pertambangan secara baik dan benar (*good mining practice*). Hal ini dianggap penting karena permasalahan umum tambang di Indonesia adalah kerusakan lingkungan akibat pengelola tambang meninggalkan lahan tambang begitu saja setelah tidak produktif lagi.



Good mining practice adalah suatu kegiatan pertambangan yang mentaati aturan, terencana dengan baik, menerapkan teknologi yang sesuai dan berlandaskan pada efektivitas dan efisiensi, mengendalikan dan memelihara fungsi lingkungan, menjamin keselamatan kerja, mengakomodir keinginan dan partisipasi masyarakat, menghasilkan nilai

tambah, meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat sekitar serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa ciri *good mining practice* antara lain :

1. Penerapan prinsip konservasi dan nilai lindung lingkungan
2. Kepedulian terhadap K3 (kesehatan dan keselamatan kerja) terutama bagi pekerjanya
3. Menciptakan nilai tambah bagi pengembangan wilayah dan masyarakat sekitar
4. Kepatuhan terhadap hukum dan perundangan yang berlaku
5. Menggunakan standarisasi keteknikan dan teknologi pertambangan yang tepat dalam aktifitasnya
6. Pengembangan potensi dan kesejahteraan masyarakat setempat terutama dari optimalisasi dan konversi pemanfaatan mineral
7. Menjamin keberlanjutan kegiatan pembangunan setelah periode pasca tambang
8. Memberikan benefit yang memadai bagi investor

Provinsi Jambi merupakan Provinsi yang memiliki cukup banyak kekayaan sumberdaya alam ESDM. Pengusahaan pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Jambi berkembang dengan pesat, hal ini ditandai dengan banyaknya izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batubara yang telah diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Sebagian besar pengusahaan pertambangan yang ada merupakan pertambangan batubara, sedangkan sebagian lagi mengusahakan bijih besi, emas dan kuarsa.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa salah satu ciri *good mining practice* adalah Kepatuhan terhadap hukum dan perundangan yang berlaku. Salah satu peraturan perundangan yang harus dipatuhi oleh perusahaan minerba adalah pembayaran *landrent* dan *royalti*.

Ketentuan mengenai pembayaran *landrent* dan *royalti* diatur di dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. *Landrent* dan *royalti* dibayar ke Pemerintah Pusat melalui KPPN dalam bentuk Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yang selanjutnya dikembalikan ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil, yang disalurkan sesuai dengan bagiannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang dana perimbangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Program-program yang dilakukan pada tahun 2021 untuk mencapai sasaran strategis ini adalah :

1. Program Pembinaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara
2. Program Penyelidikan, Pembinaan, Mitigasi dan Pelayanan Geologi
3. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
4. Program Perlindungan dan Konservasi SDA
5. Program Pemanfaatn Potensi Sumber Daya Hutan
6. Program Perencanaan dan Pengembangan hutan
7. Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
8. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Permasalahan :

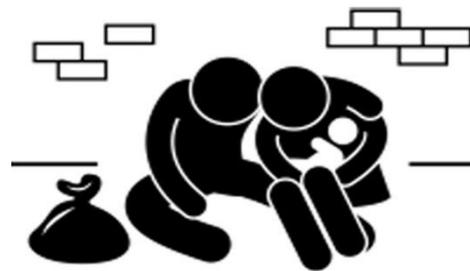
1. Pengaruh iklim masih sangat berpengaruh dengan jumlah kejadian Kebakaran hutan dan lahan, dimana pada saat terjadi kemarau yang panjang maka kebakaran hutan dan lahan akan meningkat
2. Kesadaran masyarakat dan korporasi untuk tidak melakukan pembakaran pada saat pembukaan lahan mulai tumbuh namun belum optimal.
3. Pembinaan dan pengawasan belum menyentuh seluruh Izin Usaha Pertambangan mineral dan batubara

Solusi :

1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara
2. Insentif bagi perusahaan yang taat dan disinsentif bagi perusahaan yang melanggar aturan perundang-undangan harus diterapkan dengan jelas, dan bila memungkinkan pencabutan izin sementara bagi perusahaan yang telah melanggar berkali-kali.
3. Penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan.
4. Pengelolaan lingkungan secara baik dan benar bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun merupakan tanggung jawab seluruh stake holder. Oleh sebab itu upaya-upaya peningkatan kesadaran masyarakat sebagai upaya preventif harus terus dilakukan seiring dengan upaya-upaya perbaikan kualitas lingkungan.

Sasaran 12

Menurunnya Angka Kemiskinan



Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang telah lama menjadi isu sentral. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi antara lain kelebihan penduduk, tidak meratanya distribusi sumberdaya ekonomi, ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup dan standar hidup yang tinggi, pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak memadai, dan degradasi lingkungan.

Pada banyak kasus, penyebab dan dampak kemiskinan saling berinteraksi, jadi apa yang membuat penduduk miskin juga menciptakan kondisi yang membuat mereka tetap miskin. Kemiskinan bisa menjadi penghambat pembangunan di masa mendatang yang akan berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Capaian sasaran

Gambar 3.17. Ilustrasi Kondisi Kemiskinan



strategis menurunnya angka kemiskinan ditunjukkan oleh indikator angka kemiskinan, dan capaian tahun 2020 terhadap indikator tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Tabel 3.34. Capaian Angka Kemiskinan sebagai Indikator pada Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan

| Indikator Kinerja | Kondisi Awal (2015) | 2020 | 2021 | | | Realisasi Akhir RPJMD 2021 |
|-------------------|---------------------|------|--------|------------------|-----------|----------------------------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | |
| Angka Kemiskinan | 9,12 | 7,58 | 7,4 | 7,67 (Sept 2021) | 96,47 | 7,67 |

Berdasarkan Berita Resmi yang diekspos BPS, Angka kemiskinan Provinsi Jambi tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020, sebagaimana terlihat pada gambar di atas. Tingkat capaian indikator ini adalah sebesar 7,67% pada periode September 2021, atau masuk **kategori sangat tinggi** dan bila dibandingkan dengan target akhir maka capaiannya telah mencapai 96,47% dan termasuk kategori sangat tinggi.

Gambar 3.18. Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Kota Jambi

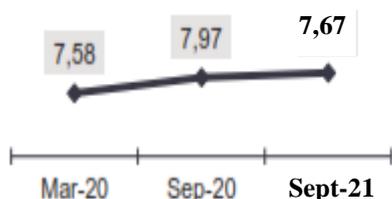


Ditinjau dari sisi penyebab kemiskinan, sumbangan penyebab garis kemiskinan sangat dipengaruhi dari faktor makanan. Untuk periode September 2021 ini, faktor makanan berperan 76,10% terhadap kemiskinan, sementara sisanya 23,90% dari non makanan. Pada periode ini, harga beras mengalami sedikit penurunan namun sayangnya barang makanan lainnya seperti cabai, bawang dan gula pasir mengalami peningkatan sehingga membuat tingkat kemiskinan pada periode ini mengalami peningkatan.

Jika dibandingkan tingkat kemiskinan regional Sumatera, Provinsi Jambi masih menempati peringkat 5 dari 10 Provinsi di Sumatera dimana rata-rata tingkat kemiskinan Regional Sumatera adalah 9,82%. Dengan kata lain, tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi masih cukup rendah dan berada di bawah rata-rata Regional Sumatera. Sedangkan jika dibandingkan secara Nasional, Provinsi Jambi juga masih cukup baik dengan tingkat kemiskinan di bawah rata-rata Nasional yang memiliki tingkat kemiskinan sebesar 9,71%.

Dalam 10 tahun terakhir, tingkat kemiskinan Provinsi Jambi selalu berada pada rentang 7% - 9%. Stagnasi tingkat kemiskinan ini disebabkan masih kurangnya edukasi bisnis dan inklusi keuangan masyarakat sehingga program-program yang dijalankan Pemerintah juga belum banyak membuahkan hasil. Selain itu, rendahnya tingkat edukasi bisnis dan tata niaga juga turut mempengaruhi stagnasi ini sehingga kondisi usaha ataupun produksi hanya tergantung bagaimana harga dipasaran tanpa adanya kemampuan untuk melakukan intervensi ataupun strategi mitigasi mengenai apa yang harus dilakukan ketika kondisi pasar berubah.

Tabel 3.35. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Tahun 2020-2021



| | Mar-20 | Sep-20 | Sept-21 |
|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Kemiskinan | 7,58 | 7,97 | 7,67 |
| Jumlah Penduduk Miskin | 277,80rb Orang | 288,10rb Orang | 279,86 Orang |

Sumber: BPS Prov. Jambi (data diolah)

Pandemi Covid-19 menyebabkan angka kemiskinan di Provinsi Jambi meningkat. Per September 2021, jumlah penduduk miskin di provinsi tersebut mencapai 279,86 ribu jiwa atau 7,6% dari total penduduk. Angka kemiskinan tersebut menurun sekitar 14 ribu jiwa dibandingkan periode Maret 2021 jumlah penduduk miskin di Jambi sebanyak 293,86 ribu jiwa atau 8,07%.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki angka kemiskinan tertinggi di Provinsi Jambi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di kabupaten tersebut mencapai 11,09% pada Sept 2021. Angka tersebut lebih tinggi dibanding posisi Sept 2020 yang hanya 10,35%. Kabupaten/kota dengan angka kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yakni sebesar 10,25%. Diikuti Kabupaten Batang Hari dengan persentase penduduk miskin sebesar 10,05%. Sementara kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin terendah adalah Kota Sungai Penuh, yakni hanya 3,41%. Setelahnya ada Kabupaten Muaro Jambi dengan angka kemiskinan sebesar 4,53% dan Kabupaten Bungo sebesar 6,23%.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mencatat jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Jambi pada bulan September 2021 mencapai 279,86 ribu orang (7,6 persen) atau berkurang sebanyak 14 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2021 yang sebesar 293,860 ribu orang (8,07 persen). Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2021, maka selama enam bulan tersebut terjadi pengurangan jumlah penduduk miskin sebanyak 14 ribu orang.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2020-Maret 2021, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami penambahan sebanyak 4,6 ribu orang dan daerah pedesaan bertambah sebanyak 1,1 ribu orang. Persentase penduduk miskin di perkotaan naik dari 11,22 persen menjadi 11,52 persen. Sedangkan di pedesaan naik dari 6,40 persen menjadi 6,42 persen pada Maret 2021 sedang persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2020 sebesar 11,22 persen naik menjadi 11,52 persen pada Maret 2021 sedang persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2020 sebesar 6,40 persen naik menjadi 6,42 persen pada Maret 2021.

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan, baik untuk di perkotaan maupun pedesaan. Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan di perkotaan pada Maret 2021 tercatat 74,9 persen, sementara di pedesaan jauh lebih tinggi yang mencapai 76,94 persen.

Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan di pedesaan, diantaranya adalah beras, rokok kretek filter, cabe merah, daging ayam ras, telur ayam ras, mie instan, gula pasir, dan bawang merah Sedangkan, untuk komoditi bukan makanan diantaranya adalah biaya perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Untuk diketahui, Pada periode September 2020-Maret 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan peningkatan. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyebar.

Diagram 3.24. Garis Kemiskinan per Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

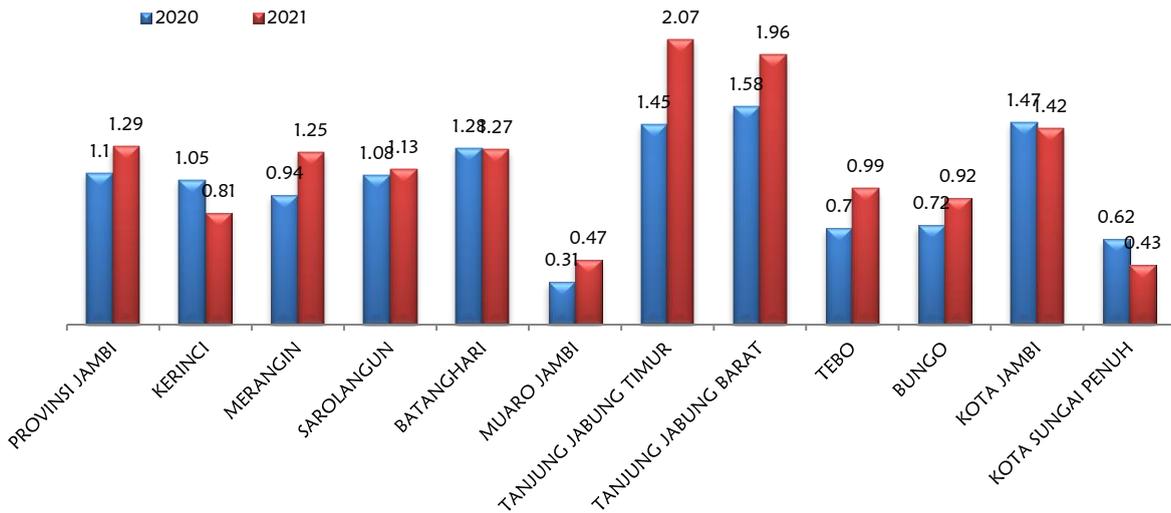
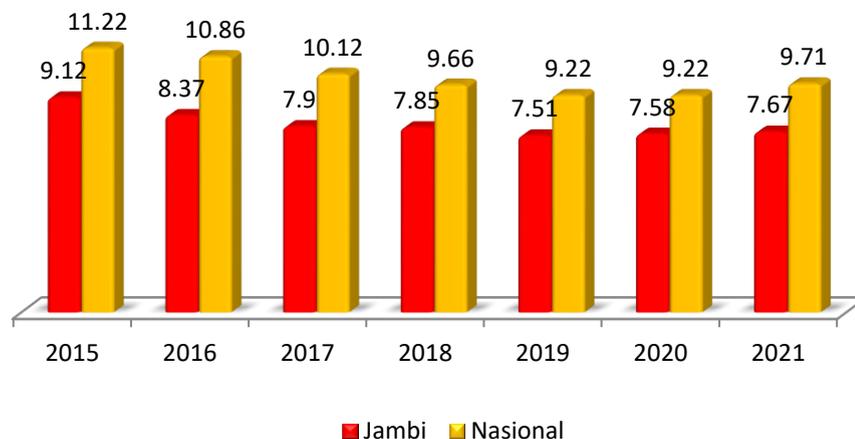


Diagram 3.25. Angka kemiskinan Provinsi Jambi dibandingkan nasional



Sumber: BPS, 2021

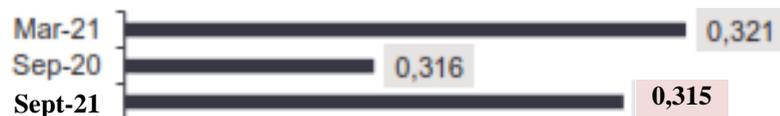
Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari tingkat kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kedalaman dan kaparahannya kemiskinan adalah indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Pada periode maret-september 2021, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan mengalami peningkatan. Indeks kedalaman kemiskinan meningkat dari 1,1 pada Maret 2020 menjadi 1,29 pada September 2021. Demikian pula indeks keparahan kemiskinan, naik dari 0,251 menjadi 0,264 pada periode yang sama. Penurunan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin mengecil.

Ketimpangan Pendapatan

Pada Maret 2021, Gini Ratio tercatat sebesar 0,321 dan pada September sebesar 0,315. Angka ini meningkat 0,005 poin jika dibandingkan dengan September 2020 sebesar 0,316. Sama seperti mengukur tingkat kemiskinan, Gini Ratio juga dapat dihitung berdasarkan tempat tinggal yaitu perkotaan dan pedesaan. Daerah perkotaan pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,354 naik dibanding September 2020 yang sebesar 0,346. Sedangkan di pedesaan pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,288 turun dibandingkan dengan September 2020 yang sebesar 0,289.

Diagram 3.26. Pergerakan Gini Ratio Jambi Tahun 2020-2021



Tabel 3.36. Gini Ratio Jambi Tahun 2020-2021

| | Mar-20 | Sep-20 | Sept-21 | Nasional |
|------------|--------|--------|---------|----------|
| Gini Ratio | 0,32 | 0,316 | 0,315 | 0,384 |

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2021

Jika dibandingkan dengan Nasional, gini ratio Provinsi Jambi masih berada dibawah rata-rata. Sementara di Regional Sumatera, hanya lebih baik dibandingkan Sumut, Sumbar dan Babel. Tingkat ketimpangan yang cenderung masih cukup tinggi ini perlu menjadi perhatian pemerintah khususnya pemerintah daerah agar pemerataan kesejahteraan dapat dilakukan.

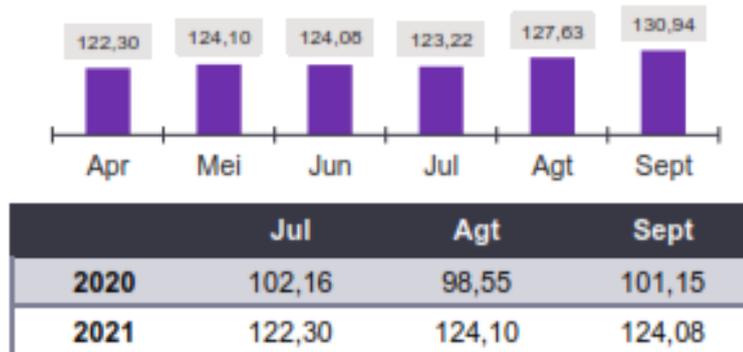
Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2021 untuk menurunkan angka kemiskinan adalah mengurangi tingkat kemiskinan pada masyarakat petani, Pemerintah Provinsi Jambi juga melakukan beberapa hal yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas, stabilitas harga di tingkat petani dan pemberian jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin.

Peningkatan produktivitas dilakukan dengan meningkatkan layanan irigasi, pemberian pupuk bersubsidi, pemberian penyuluhan, pemberian saprodi, dan lain-lain. Sedangkan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat petani, salah satunya dengan meningkatkan kondisi jalan yang menuju ke sentra produksi karena kondisi jalan yang buruk mempengaruhi biaya produksi dan transportasi yang harus ditanggung petani.

Nilai Tukar Petani

Sektor yang menarik pada periode ini adalah peternakan yang sebelumnya rendah kini telah melebihi 100 poin. Hal ini dipicu perayaan hari raya Idul Adha dimana permintaan atas hewan ternak seperti kambing dan sapi yang akan dijadikan hewan Qurban mengalami peningkatan. Beberapa sektor lain masih belum mampu menembus angka di atas 100. Sektor-sektor tersebut antara lain tanaman pangan dengan NTP 97,44 dan Holtikultura dengan NTP 97,32. Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya harga jual yang tidak bersaing sehingga membuat sektor ini cukup lemah. Selain itu sulitnya akses dan distribusi serta lemahnya pasar yang dipengaruhi oleh rendahnya edukasi bisnis dan tata niaga juga semakin membuat sektor ini semakin lemah.

Diagram 3.27. Pergerakan NTP Jambi Tahun 2020-2021



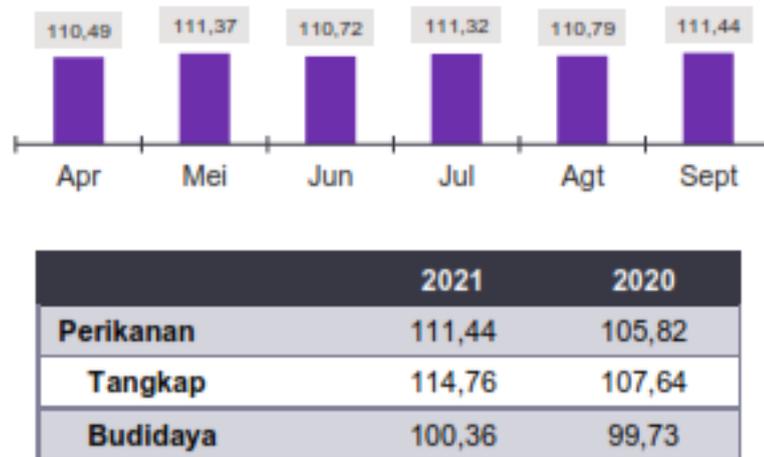
Sumber : BPS Provinsi Jambi 2021

NTP selama 2 tahun terakhir terus menunjukkan tren perbaikan dan peningkatan. Kenaikan NTP ini salah satunya disebabkan perbaikan harga pada komoditas unggulan khususnya pada sektor Tanaman Perkebunan Rakyat baik pada sawit, pinang dan kopi sejak Agustus tahun 2020. Sayangnya peningkatan pada sektor ini belum diikuti dengan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk sehingga hasil yang diberikan belum maksimal. Selain itu, rendahnya tingkat edukasi dan tata niaga bisnis disektor ini akan membuat tingkat NTP akan sangat ditentukan oleh harga pasaran komoditas sehingga membuat tingkat kesejahteraan petani sangat labil.

Nilai Tukar Nelayan (NTN)

NTN terus menunjukkan tren perbaikan dan peningkatan. Peningkatan tersebut terjadi baik untuk perikanan tangkap maupun budidaya. Hal yang cukup menggembirakan adalah bahwa pada Triwulan III tahun ini terlihat bahwa perikanan budidaya mulai menunjukkan perkembangan yang baik dimana para pelaku usaha perikanan mulai dapat menikmati hasil budidaya ikannya.

Diagram 3.28. Pergerakan NTN Jambi Bulan September Tahun 2020-2021



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2021

Salah satu isu utama diperikanan adalah masih tingginya biaya produksi karena terjadinya pasar oligopoli khususnya untuk pakan. Jumlah penyedia yang terbatas mengakibatkan harga pakan diatur secara bebas dan dapat meningkat tajam ketika kondisi tertentu. Rendahnya intervensi pemerintah dalam hal ini juga memicu para pengusaha di sektor ini juga sulit untuk meningkatkan kesejahteraan karena hasil produksi hanya cukup untuk sekedar menutupi biaya namun belum dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi pelaku usahanya.

Pada dasarnya hampir seluruh program yang bersentuhan dengan masyarakat merupakan upaya pengurangan kemiskinan di Provinsi Jambi. Beberapa program yang dilaksanakan pada tahun 2021 untuk mendukung indikator ini adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, pemasaran hasil dan investasi pertanian
2. Program pengembangan usaha peternakan
3. Program pengembangan perikanan budidaya
4. Program pengembangan perikanan tangkap
5. Program lingkungan sehat perumahan dan permukiman
6. Program pemberdayaan masyarakat perdesaan
7. Program pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya

8. Program perlindungan, pelayanan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
9. Program pembinaan, perlindungan, pemberdayaan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS
10. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

Permasalahan:

Kondisi perekonomian yang tidak menentu yang dapat menyebabkan inflasi tinggi merupakan salah satu faktor kerawanan peningkatan angka kemiskinan, karena masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan sangat mudah kembali menjadi miskin akibat keadaan ini.

Solusi :

1. Menjaga stabilitas harga yang mampu diintervensi oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengurangi inflasi.
2. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian.



Sasaran 13

Menurunnya Angka Pengangguran

Permasalahan pengangguran merupakan masalah yang dihadapi oleh setiap daerah di negara berkembang. Permasalahan ini timbul akibat jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja, ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan dengan kebutuhan kualifikasi tenaga kerja yang tersedia serta penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang.

Capaian sasaran menurunnya angka pengangguran ditunjukkan oleh indikator tingkat pengangguran terbuka dan capaian pada tahun 2021 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

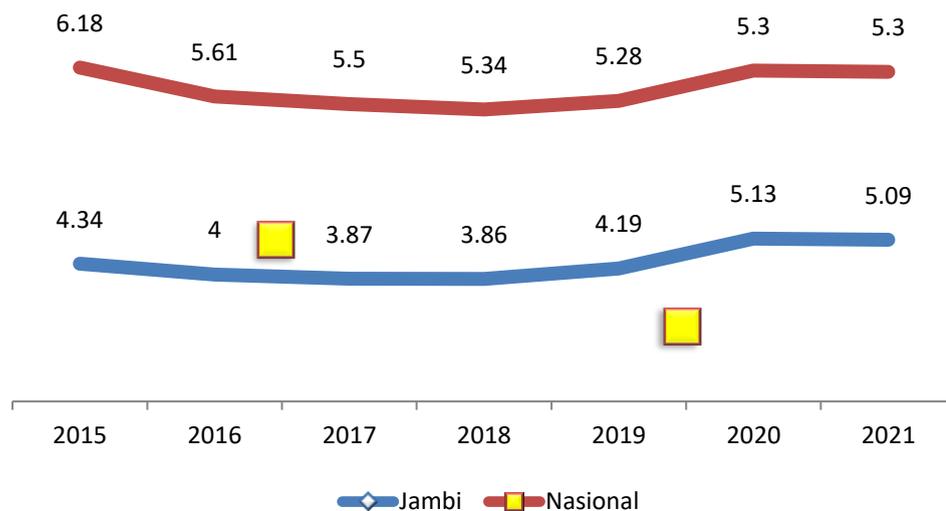
Tabel 3.37. Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai Indikator pada Sasaran Menurunnya Angka Pengangguran

| Indikator Kinerja | Kondisi Awal (2016) | 2020 | 2021 | | | Realisasi Akhir RPJMD 2021 |
|------------------------------|---------------------|-------|--------|-----------|-----------|----------------------------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | |
| Tingkat Pengangguran Terbuka | 4,20% | 5,13% | 2,8 | 5,09% | 55,01 | 5,09% |

Capaian indikator TPT diatas memperlihatkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Jambi pada tahun 2021 terganggu seiring dengan ekonomi global yang mengalami tekanan dikarenakan pandemi covid-19. TPT Tahun 2021 sebesar 5,09 % atau menurun 0,06% dibandingkan kondisi tahun 2020 dan terealisasi sebesar 55,01%.

Bila dibandingkan dengan target akhir pada tahun 2021, maka capaian ini masih dalam kategori rendah karena baru mencapai 55,01% dari target sebesar 2,8%. Namun demikian, TPT Provinsi Jambi dalam 5 tahun terakhir selalu berada di bawah TPT nasional yang artinya capaian indikator TPT di Provinsi Jambi masih lebih baik dibandingkan nasional dan beberapa daerah lainnya.

Grafik 3... Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jambi dibanding nasional (Agustus)



Sumber: BPS, 2021

Jumlah angkatan kerja di Jambi Agustus 2021 sebanyak 1,84 juta orang, bertambah 7,6 ribu orang dibanding Agustus 2020 dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 67,17 persen atau turun 0,62 poin. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2021 sebesar 5,09 persen turun 0,03 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020.

Penduduk bekerja sebanyak 1,747 juta orang, meningkat sebanyak 7,8 ribu orang dari Agustus 2020. Jika dibandingkan dengan Agustus 2020, sektor yang mengalami penurunan terbesar adalah pertanian (turun 1,48 persen poin), sedangkan sektor yang mengalami kenaikan terbesar adalah sektor perdagangan besar. Sebanyak 1,08 juta orang (62 persen) penduduk bekerja pada kegiatan informal. Selama setahun terakhir, pekerja informal turun sebesar 0,72 persen poin dibanding Agustus 2020.

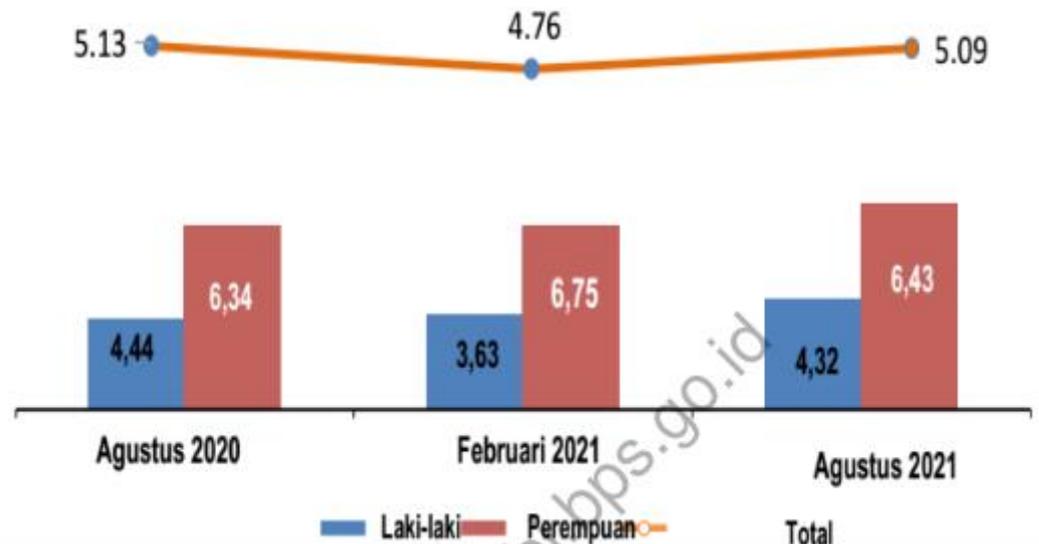
Dalam setahun terakhir persentase pekerja setengah pengangguran turun sebesar 1,5 persen poin, sedangkan pekerja paruh waktu naik 1,72 persen poin. Terdapat 177,9 ribu orang terdampak covid-19 atau 6,49 persen. Terdiri dari pengangguran karena covid-19 (10,24 ribu orang), BAK karena covid-19 (3,82 ribu orang), sementara tidak bekerja karena covid-19 (12,54 ribu orang) dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena covid-19 (151,34 ribu orang).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha di pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2021 adalah sebesar 5,09 persen. Hal ini berarti dari 1000 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 51 orang penganggur. Pada Agustus 2021 ini, nilai TPT mengalami penurunan yaitu sebesar 0,03 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020.

TPT Menurut Jenis Kelamin

TPT laki-laki umumnya lebih tinggi dibandingkan perempuan. Namun pada Agustus 2021, angka TPT laki-laki sebesar 4,32 persen, sedangkan TPT perempuan yang sebesar 6,43 persen. Dibandingkan Agustus 2020, TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,11 persen poin, sedangkan TPT perempuan mengalami kenaikan sebesar 0,09 persen poin. Jika dibandingkan dengan Februari 2021 angka TPT laki-laki naik 0,69 persen poin, sedangkan TPT perempuan turun 0,31 persen poin.

Diagram 3.29. Tren Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin (persen), Agustus 2020–Agustus 2021

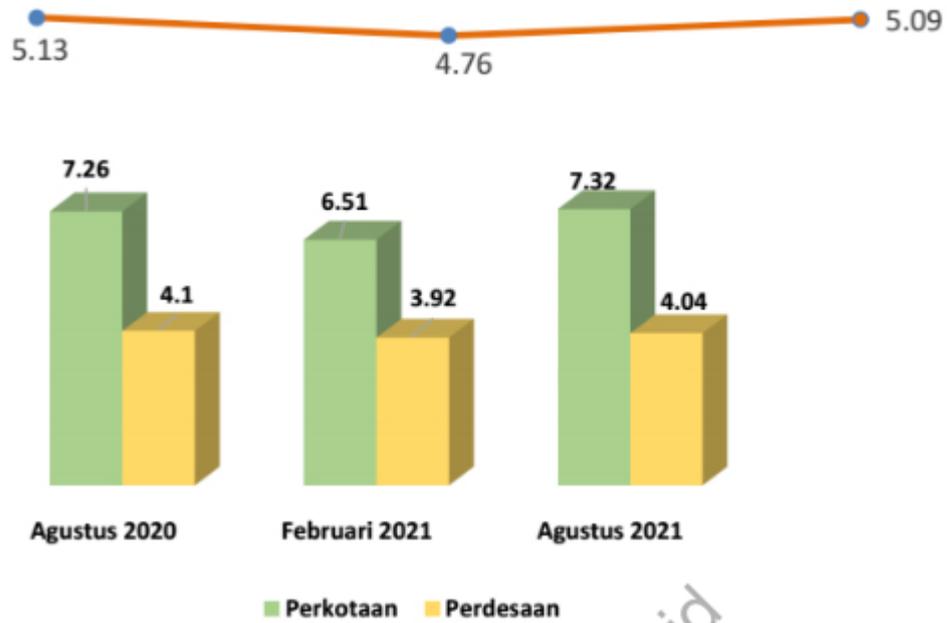


Sumber : BPS Provinsi Jambi 2021

TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal

Pada Agustus 2021 TPT Perkotaan sebesar 7,32 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan TPT di daerah Perdesaan yang mencapai angka 4,04 persen. Dibandingkan Februari 2021 TPT perkotaan dan perdesaan naik sebesar 0,8 persen poin dan 0,12 persen poin. Namun jika dibandingkan dengan Agustus 2020, TPT perkotaan naik 0,06 persen poin dan TPT perdesaan turun 0,06 persen poin.

Diagram 3.30. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Daerah Tempat Tinggal (persen), Agustus 2020–Agustus 2021

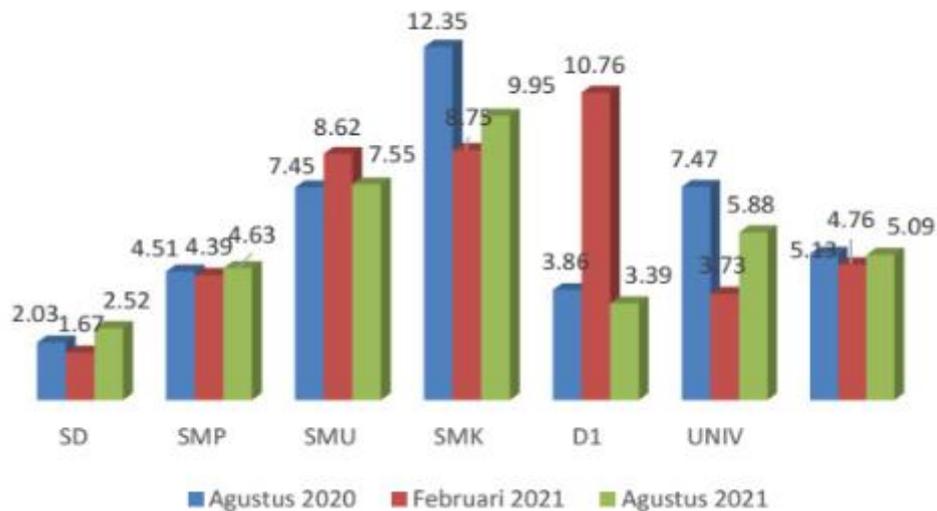


Sumber : BPS Provinsi Jambi 2021

TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Pada Agustus 2021 TPT dari tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan yang paling tinggi sebesar 9,95 persen, sedangkan TPT terendah pada pendidikan SD ke bawah sebesar 2,52. Hal ini menggambarkan kondisi pasar kerja Indonesia saat ini sebagian besar diisi oleh mereka dengan pendidikan rendah.

Diagram 3.31. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Agustus 2020–Agustus 2021



Sumber : BPS Provinsi Jambi 2021

Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu : a) Pengangguran karena Covid-19; b) Bukan Angkatan Kerja Karena COVID-19; c) Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19; dan d) Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena Covid-19. Kondisi a) dan b) merupakan dampak pandemi Covid-19 pada mereka yang berhenti bekerja, sedangkan kondisi c) dan d) merupakan dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja.

Pada Tabel dibawah ini dapat dilihat bahwa penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 pada Agustus 2021 sebanyak 177,93 ribu orang, jika dibandingkan dengan Agustus 2020 mengalami penurunan sebesar 74,95 ribu atau 29,64 persen.. Komposisi penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 terdiri dari 10,24 ribu orang pengangguran Covid-19, 3,82 ribu orang Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19, 12,54 ribu orang sementara tidak bekerja karena Covid-19 dan 151,34 ribu orang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19.

Tabel 3.38. Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja, Agustus 2020–Februari 2021

| Komponen | Agustus 2020 | Februari 2021 | Agustus 2021 | Perubahan Agt 2020-Agt 2021 | | Perubahan Februari 2021-Agt 2021 | |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | | | |
| | Ribu Orang | Ribu Orang | Ribu Orang | Ribu orang | Persen | Ribu Orang | Persen |
| Pengangguran Karena Covid-19 | 18,79 | 6,46 | 10,24 | -8,55 | -45.51 | 3,78 | 58.49 |
| Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena Covid-19 | 2,62 | 2,48 | 3,82 | 1,21 | 46.12 | 1,34 | 54.01 |
| Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19 | 13,74 | 8,19 | 12,54 | -1,20 | -8.74 | 4,35 | 53.12 |
| Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena Covid-19 | 217,74 | 129,88 | 151,34 | -66,40 | -30.50 | 21,46 | 16.52 |
| Total | 252,89 | 147,01 | 177,93 | -74,95 | -29.64 | 30,93 | 21.04 |
| Penduduk Usia Kerja (PUK) | 2,704 | 2,723 | 2,740 | 36,32 | 1.34 | 17,46 | 0.64 |
| Persentase Terhadap PUK | 9,35 | 5,39 | 6,49 | | -2.89 | | 1.09 |

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2021

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk usia kerja terdampak Covid-19 terdiri dari laki-laki sebanyak 81,4 ribu orang dan perempuan sebanyak 65,6 ribu orang. Kontribusi laki-laki terdampak Covid-19 lebih besar dibandingkan perempuan pada setiap komponen kecuali komponen BAK karena Covid-19. Besaran kontribusi BAK karena Covid-19 dari penduduk laki-laki sebesar 32,34 persen, lebih rendah dibandingkan angka BAK karena Covid-19 dari perempuan.

Apabila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, penduduk usia kerja terdampak Covid-19 terdiri dari penduduk perkotaan sebanyak 77,95 ribu orang dan penduduk perdesaan sebanyak 69,1 ribu orang. Pada semua komponen, kontribusi penduduk perkotaan yang terdampak Covid-19 lebih tinggi dari penduduk perdesaan, kecuali pada komponen Bukan Angkatan Kerja karena Covid-19 yang angkanya mencapai nol persen untuk penduduk perkotaan. Sedangkan pada komponen sementara tidak bekerja karena Covid-19 persentase mencapai lebih dari 2 kali lipat dari penduduk perdesaan.

Gambaran trend Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota (persen) di Provinsi Jambi periode Agustus 2020–Agustus 2021 dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.39. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota (persen) Agustus 2020–Agustus 2021

| KABUPATEN/KOTA | TPT | | Persen Perubahan |
|------------------------|--------------|--------------|------------------|
| | Agustus 2020 | Agustus 2021 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1501 Kerinci | 2.43 | 2.32 | -0.11 |
| 1502 Merangin | 4.68 | 4.83 | -0.03 |
| 1503 Sarolangun | 5.71 | 5.52 | -0.19 |
| 1504 Batanghari | 4.42 | 4.26 | -0.16 |
| 1505 Muaro Jambi | 5.43 | 5.59 | 0.15 |
| 1506 Tanjab Timur | 1.41 | 1.56 | 0.15 |
| 1507 Tanjab Barat | 2.16 | 2.53 | 0.37 |
| 1508 Tebo | 2.95 | 2.83 | -0.12 |
| 1509 Bungo | 5.94 | 5.86 | -0.07 |
| 1571 Kota Jambi | 10.49 | 10.66 | 0.17 |
| 1572 Kota Sungai Penuh | 5.56 | 3.00 | -2.56 |
| Total | 5.13 | 5.09 | -0.03 |

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2021

Perluasan kesempatan kerja merupakan upaya untuk mengembangkan sektorsektor yang mampu menyerap tenaga kerja. Usaha penyerapan tenaga kerja tidak lepas dari faktor yang mempengaruhinya seperti jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, tingkat produktifitas tenaga kerja dan kebijakan pemerintah dalam hal penyerapan tenaga kerja itu sendiri.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk menurunkan TPT antara lain melakukan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja tentang kewirausahaan produktif, produktivitas tenaga kerja; kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS), pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja berbasis kompetensi (PBK) dan berbasis masyarakat; pemagangan dalam dan luar negeri,

Pengembangan Kesempatan Kerja Dalam dan Luar Negeri ; Perluasan Kesempatan Kerja Sektor Informal bagi Masyarakat Melalui Pembentukan Kelompok Wirausaha Baru (WUB); Pengembangan Masyarakat Melalui Terapan Teknologi Tepat Guna; pengembangan kesempatan kerja dalam dan luar negeri; serta sertifikasi tenaga kerja konstruksi.

Gambar 3.19. Pelatihan Menjahit bagi Wirausaha Baru



Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Pada usia ini, mereka memiliki potensi untuk masuk ke angkatan kerja dan pasar kerja. Penduduk usia kerja mengalami kenaikan dari 2,7 juta orang pada Agustus 2020 menjadi 2,74 juta orang pada Agustus 2021. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Sebagian besar penduduk usia kerja yaitu 67,2 persen atau 1,84 juta orang merupakan angkatan kerja, sisanya termasuk bukan angkatan kerja.

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2021 terdiri dari 1,75 juta orang penduduk yang bekerja dan 94 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2020 terjadi kenaikan jumlah angkatan kerja naik sebanyak 7,6 ribu orang. Sementara itu jika dibandingkan dengan kondisi Februari 2021 jumlah angkatan kerja mengalami kenaikan sekitar 8,14 ribu orang. Penduduk bekerja naik sekitar 7,8 ribu orang dan pengangguran mengalami stagnasi.

Sejalan dengan jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mempunyai pola yang sama. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK pada Agustus 2021 sebesar 67,17 persen turun 0,62 persen poin dibandingkan Agustus 2020 dan jika dibandingkan dengan Februari 2021 turun 0,13 persen poin. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan pola TPAK pada Agustus 2021. Pada Agustus 2021, TPAK laki-laki sebesar 83,91 persen sementara TPAK perempuan hanya 49,89 persen.

Dibandingkan kondisi tahun lalu TPAK laki-laki mengalami penurunan 1,05 persen poin, demikian juga dengan besaran angka TPAK perempuan yang mengalami penurunan 0,15 persen poin. Sedangkan jika dibandingkan dengan semester lalu TPAK laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,43 persen poin, sedangkan TPAK mengalami kenaikan sebesar 0,19 persen poin.

Tabel 3.40. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2020–Agustus 2021

| Status Keadaan Ketenagakerjaan | Agustus 2020 | Februari 2021 | Agustus 2021 | Perubahan Agt 2020–Agt 2021 | | Perubahan Feb 2021–Agt 2021 | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| | ribu orang [2] | ribu orang [3] | ribu orang [4] | ribu orang [5] | persen [6] | ribu orang [7] | persen [8] |
| Penduduk Usia Kerja | 2,704 | 2,723 | 2,740 | 36,3 | 1.34 | 17,5 | 0.64 |
| Angkatan Kerja | 1,833 | 1,832 | 1,841 | 7,6 | 0.41 | 8,1 | 0.44 |
| - Bekerja | 1,739 | 1,745 | 1,747 | 7,8 | 0.45 | 1,7 | 0.10 |
| - Pengangguran | 94 | 87 | 94 | 0 | -0.25 | 6,5 | 7.39 |
| Bukan Angkatan Kerja | 870.9 | 890.3 | 899.6 | 28,7 | 3.30 | 9,3 | 1.05 |
| | persen | persen | persen | persen poin | | persen poin | |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 5,13 | 4,76 | 5,09 | -0.03 | | 0,33 | |
| - Perkotaan | 7,26 | 6,51 | 7,31 | 0.06 | | 0,82 | |
| - Perdesaan | 4,10 | 3,92 | 4,04 | -0.06 | | 0,12 | |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | 67,79 | 67,30 | 67,17 | -0.62 | | -0,13 | |
| - Laki-Laki | 84,96 | 84,34 | 83,91 | -1.05 | | -0,43 | |
| - Perempuan | 50,04 | 49,70 | 49,89 | -0.15 | | 0,19 | |

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2021

Langkah yang perlu diperhatikan dalam Peningkatan Jumlah tenaga kerja yang dilatih adalah peranan para pelaku jasa konstruksi dan dukungan berupa bantuan teknis dan keuangan dari pihak pemerintah/swasta. Selain faktor tersebut, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 guna mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran tidak dapat diabaikan begitu saja karena program dan kegiatan dimaksud memberikan andil yang besar.

Adapun program yang mendukung indikator ini adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas
2. Program Pemberdayaan Tenaga Kerja
3. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi.
4. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan
5. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Permasalahan :

1. TPT di Provinsi Jambi didominasi oleh tenaga kerja dengan pendidikan menengah kejuruan dan tenaga kerja yang paling banyak terserap adalah tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SD ke bawah yang berarti penduduk bekerja masih didominasi oleh penduduk bekerja dengan gaji rendah.
2. Pandemi Covid-19 dan Ketenagakerjaan di Provinsi Jambi
Dengan adanya pandemi Covid-19, tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Perekonomian mulai menunjukkan peningkatan yang tidak terlalu signifikan oleh sebab diberlakukannya pembatasan aktivitas. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi meningkat melambat sampai pada triwulan III tahun 2021.
Penurunan tersebut juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Indonesia. Tidak hanya pengangguran, penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak dengan adanya pandemi Covid-19.
Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 tersebut dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu a) Penganggur; b) Bukan angkatan kerja yang pernah berhenti bekerja pada Februari-Agustus 2021; c) Penduduk yang bekerja dengan status sementara tidak bekerja; dan d) Penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja. Kondisi c) dan d) merupakan dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja, sedangkan kondisi a) dan b) merupakan dampak pandemi Covid-19 bagi mereka yang berhenti bekerja.

Solusi :

1. Meningkatkan kapasitas pendidikan para pencari kerja, sehingga dapat bersaing dengan orang lain dan mendapatkan gaji yang lebih tinggi
2. Upaya lain yang perlu dilakukan untuk meningkatkan produktifitas dan kualitas tenaga kerja (SDM) antara lain :
 - a. Menyiapkan tenaga ahli dan trampil dengan menyiapkan pendidikan formal bagi masyarakat.
 - b. Mengadakan latihan-latihan atau job training bagi tenaga kerja agar memiliki kemampuan kerja yang baik.
 - c. Mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk memluas ilmu pengetahuan dan ketrampilan serta menimba pengalaman kerja.



Sasaran 14

Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk

Permasalahan kependudukan yang terkait dengan banyaknya jumlah penduduk menjadi sebuah masalah yang tidak dapat dihindarkan dan menjadi salah satu masalah yang sangat menarik perhatian pemerintah untuk segera diatasi. Kependudukan berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.

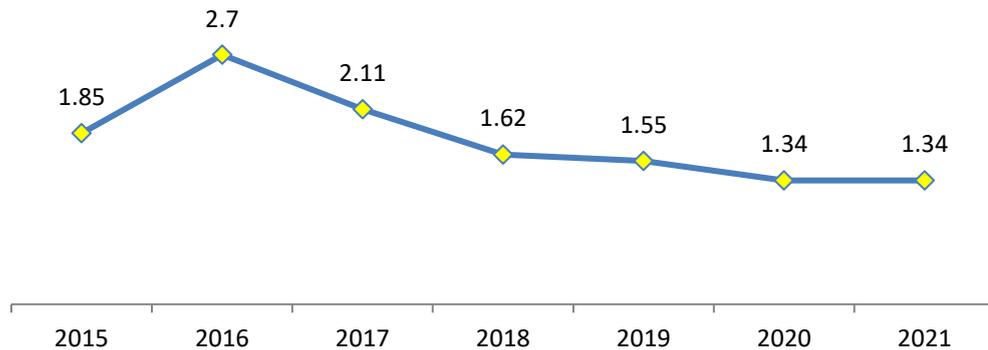
Perkembangan kependudukan adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Pencapaian sasaran terkendalinya laju pertumbuhan penduduk diukur dari indikator laju pertumbuhan penduduk dengan target dan realisasi pada tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.41. Capaian Laju Pertumbuhan Penduduk sebagai Indikator pada Sasaran Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk

| Indikator Kinerja | Kondisi Awal (2016) | 2020 | 2021 | | | Realisasi Akhir RPJMD 2021 |
|---------------------------|---------------------|------|--------|-----------|-----------|----------------------------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | |
| Laju Pertumbuhan Penduduk | 2,24 | 1,34 | 1,82 | 1,34 | 135,82 | 1,34 |

Tabel di atas memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2021 adalah sebesar 1,34. Angka ini masih menggunakan data tahun 2020 dikarenakan sensus terbaru tentang laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jambi belum resmi dikeluarkan oleh BPS Provinsi Jambi. Angka pengendalian terhadap laju pertumbuhan penduduk ini melebihi target yang telah ditetapkan pada akhir periode RPJMD Taun 2021 yakni sebesar 1,82 atau terealisasi sebesar 135,82% dengan kategori capaian termasuk dalam kategori **sangat tinggi**.

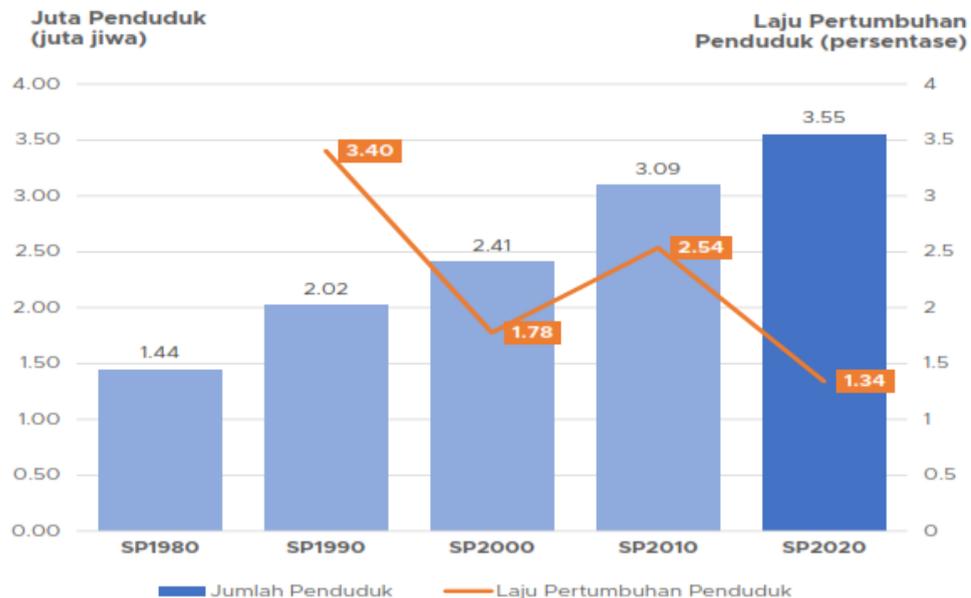
Grafik 3.26. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi Tahun 2015-2021



Sumber: DP3AP2 dan BPS, 2021

SP2020 mencatat penduduk Provinsi Jambi pada bulan September 2020 sebanyak 3,55 juta jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan. Dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak tahun 2010, jumlah penduduk Provinsi Jambi mengalami penambahan sekitar 455,96 ribu jiwa atau rata-rata sebanyak 45,60 ribu setiap tahun. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi sebesar 1,34 persen per tahun.

Diagram 3.32. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2020



Jika dilihat pada diagram diatas, terdapat pengurangan laju pertumbuhan penduduk lebih satu persen jika dibandingkan dengan periode 2000-2010 yang sebesar 2,54 persen. Pada umumnya, masalah yang dialami negara berkembang adalah masalah pertumbuhan penduduk yang berlebih. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali tentu akan menimbulkan banyak pengaruh dalam kehidupan. Problem yang akan dihadapi akibat meningkatnya pertambahan penduduk adalah pangan, energi, dan papan.

Dari sisi kebutuhan pangan, setiap kenaikan jumlah penduduk akan menaikkan pula kebutuhan pangan. Begitu pula kebutuhan energi, pertumbuhan penduduk akan menyedot energi besar, sementara ketersediaan energi makin menipis. Tak terkecuali masalah papan atau perumahan yang harus disediakan dalam jumlah besar. Masalah ini tentunya akan berujung pada naiknya tingkat pengangguran, kemiskinan, angka kriminalitas dan lain-lain.

Pelaksanaan transmigrasi, program Keluarga Berencana (KB), meningkatkan standar pendidikan bangsa, serta melakukan penyuluhan dan sosialisasi merupakan berbagai cara yang bisa dilakukan terkait masalah ini. Pertumbuhan penduduk penting, tetapi dibatasi. Kita perlu sadar bahwa daya dukung sumber daya alam terbatas, sehingga jika jumlah penduduk tidak terkendali akan menjadi problem besar di masa depan. Tercapainya target indikator ini tidak terlepas dari upaya berbagai pihak terkait dalam menggalakkan program KB. Adapun program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2021 untuk mendukung capaian indikator ini adalah Program Pengendalian Penduduk dan KB. Bila dilihat dari komposisi usia penduduk, terlihat bahwa sebagian besar masyarakat Provinsi Jambi berada di usia produktif, dan oleh karena itu bila tidak diantisipasi maka akan terjadi lonjakan penduduk yang cukup signifikan.

Permasalahan :

Jumlah penduduk terbesar di Provinsi Jambi adalah penduduk usia produktif, bila tidak dilakukan langkah-langkah antisipatif untuk menekan laju pertumbuhan penduduk alamiah maka akan terjadi lonjakan penduduk yang tidak terkendali di Provinsi Jambi yang pada akhirnya memberikan banyak dampak negatif.

Solusi :

1. Program Keluarga Berencana harus terus digalakkan, dan diimbangi dengan peningkatan pendidikan masyarakat sehingga kesadaran akan dampak buruk pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi dapat tersosialisasi dengan baik.
2. Bila laju pertumbuhan penduduk alamiah dapat ditekan melalui program KB, faktor migrasi penduduk tidak bisa dibatasi dengan mudah. Oleh karena itu, langkah antisipatif untuk mengurangi dampak buruk penambahan penduduk lewat migrasi adalah dengan menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang diiringi dengan penyediaan pendidikan yang berkualitas.

3.4. Realisasi Anggaran

Persentase realisasi anggaran belanja langsung pada tahun 2021 adalah sebesar 86,81% dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Persentase realisasi anggaran yang mendukung sasaran-sasaran strategis adalah sebesar 89,30%. Persentase realisasi terkecil berada pada sasaran strategis Terwujudnya ketertiban umum daerah dan realisasi terbesar berada pada sasaran strategis Menurunnya angka kemiskinan.

Beberapa hal yang menyebabkan realisasi yang kecil adalah petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan DAK yang terlambat sehingga penyiapan administrasi terlambat dan hal-hal lainnya, sehingga anggaran yang telah disediakan tidak terserap optimal. Rincian realisasi anggaran tiap sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.42. Realisasi belanja langsung per sasaran Tahun 2021

| No. | Sasaran | Anggaran (Rp) | Realisasi | % |
|-----|---|--------------------|--------------------|-------|
| 1. | Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas | 67.781.377.187,70 | 64.708.361.095,56 | 95,46 |
| 2. | Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan | 228.378.805.495,96 | 206.655.977.118,01 | 90,48 |
| 3. | Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan | 1.604.034.787,00 | 1.463.492.970,00 | 91,23 |
| 4. | Terwujudnya ketertiban umum daerah | 40.826.552.867,00 | 24.293.425.153,00 | 59,50 |
| 5. | Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP) | 15.894.097.286,00 | 14.670.400.282,00 | 92,30 |
| 6. | Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah | 20.435.284.773,91 | 17.689.744.925,00 | 86,56 |
| 7. | Meningkatnya ketahanan pangan | 47.377.539.341,00 | 44.145.125.723,00 | 93,17 |
| 8. | Terciptanya akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian | 124.080.075.089,00 | 118.269.538.652,00 | 95,32 |
| 9. | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik | 9.012.648.110,36 | 8.681.988.298,00 | 96,33 |
| 10. | Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi | 15.127.917.233,00 | 13.780.624.314,00 | 91,09 |
| 11. | Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan | 41.665.214.793,00 | 37.424.295.114,00 | 89,82 |
| 12. | Menurunnya angka kemiskinan | 46.684.602.901,42 | 45.425.993.756,00 | 97,30 |
| 13. | Menurunnya angka pengangguran | 36.507.731.845,00 | 34.233.135.057,00 | 93,76 |
| 14. | Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk | 1.873.491.379,00 | 1.460.420.718,00 | 77,95 |
| | Rata-rata | | | 89,30 |

Sumber : Penjabaran Laporan Realisasi Belanja Daerah, Badan Keuangan Daerah, 2021

Tabel 3.43. Realisasi Anggaran dibandingkan dengan Realisasi Kinerja

| No. | Sasaran | Realisasi Anggaran (%) | Realisasi Kinerja (%) | % |
|-------------|---|------------------------|-----------------------|--------|
| 1. | Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas | 95,46 | 100 | 104,75 |
| 2. | Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan | 90,48 | 99,76 | 110,25 |
| 3. | Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan | 91,23 | 100 | 109,61 |
| 4. | Terwujudnya ketertiban umum daerah | 59,50 | 96,83 | 162,74 |
| 5. | Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP) | 92,30 | 273,33 | 296,13 |
| 6. | Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah | 86,56 | 91,04 | 105,17 |
| 7. | Meningkatnya ketahanan pangan | 93,17 | 93,5 | 100,35 |
| 8. | Terciptanya akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian | 95,32 | 95,91 | 100,61 |
| 9. | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik | 96,33 | 104,15 | 108,11 |
| 10. | Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi | 91,09 | 92,12 | 101,13 |
| 11. | Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan | 89,82 | 103,06 | 114,74 |
| 12. | Menurunnya angka kemiskinan | 97,30 | 91,47 | 94,00 |
| 13. | Menurunnya angka pengangguran | 93,76 | 55,01 | 58,67 |
| 14. | Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk | 77,95 | 135,82 | 174,23 |
| Rata - rata | | 89,30 | 111,41 | 126,24 |

Sumber : Hasil Olah Data, 2021

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

Bila realisasi anggaran dibandingkan dengan kinerja yang dicapai tahun 2021, dimana rata-rata realisasi anggaran sebesar 89,30% dan capaian kinerja sebesar 111,41%, maka terlihat adanya efektivitas penggunaan anggaran pada tahun 2021.



BAB IV
PENUTUP

SEPUCUK JAMBI SEMBILAN LURAH



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi disusun berdasarkan kebijakan umum anggaran serta perjanjian kinerja tahun 2021 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka mewujudkan good governance. Selain itu, Laporan Kinerja tahun 2021 ini merupakan tahun terakhir sekaligus penutup laporan kinerja yang menggambarkan pencapaian tujuan/sasaran RPJMD Provinsi Jambi periode 2016-2021.

Laporan Kinerja (LKj) menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Pemerintah Provinsi Jambi juga menjadi makna strategis sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Jambi. Dalam kaitannya dengan kedudukan sebagai Pemerintah Provinsi Jambi, LKj juga menjadi bagian dari pertanggung-jawaban tugas dan fungsi baik sebagai daerah otonom maupun sekaligus sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data dukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2021, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, serta kontribusinya untuk pencapaian target akhir RPJMD. Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2021 merupakan tahun terakhir (kelima) dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Jambi tahun 2016-2021. Keberhasilan yang dicapai semata-mata adalah berkat kerjasama dan partisipasi semua komponen pemerintah daerah dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan, sehingga target Jambi TUNTAS 2021 dapat terwujud. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Secara umum, terlihat bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2021 dan akhir periode RPJMD rata-rata sangat baik, karena 13 indikator telah tercapai serta memenuhi kriteria sangat tinggi, 1 indikator menunjukkan kemajuan signifikan dengan kategori tinggi dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2022, dan terakhir terdapat 1 indikator yang menunjukkan kemajuan namun masih diperlukan kerja keras untuk mencapainya, termasuk diantaranya terdapat indikator yang masuk kriteria rendah.

Dilihat dari capaian tujuan Pemerintah Provinsi Jambi, secara keseluruhan capaian tujuan Provinsi Jambi sampai dengan periode akhir RPJMD 2016-2021 dengan visi misi Jambi TUNTAS 2021 telah tercapai dengan baik. Sasaran yang mendapatkan angka capaian paling tinggi yakni pada sasaran Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk dengan persentase sebesar 135,82% disusul sasaran Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP) dengan capaian sebesar 273,33. Sedangkan capaian paling rendah berada pada sasaran Menurunnya angka pengangguran hanya mencapai angka 55,01%. Belum maksimalnya capaian tersebut dikarenakan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Jambi pada tahun 2021 terganggu seiring dengan ekonomi global yang mengalami tekanan dikarenakan pandemi covid-19. TPT Tahun 2021 sebesar 5,09 % atau menurun 0,06% dibandingkan kondisi tahun 2020 dan terealisasi sebesar 55,01%.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran, indikator kinerja utama, dan pencapaian tujuan yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa upaya maksimal telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam rangka memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan perjanjian kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RPJMD dan RKPD 2021, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya.

Hal ini bukan hanya sekedar pelaksanaan program/ kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk. Pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi untuk sistem akuntabilitas kinerja yang dikenal sebagai e-sakip adalah bagian dari upaya penyelesaian masalah-masalah pembangunan melalui intervensi program/kegiatan yang berbasis data dan terfokus. Begitu juga pengembangan sistem pengendalian berbasis teknologi informasi melalui link laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan (lppk).

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Jambi ke depan. *Pertama*, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan masih tingginya angka rumah tangga sangat miskin, bencana kebakaran hutan dan lahan yang menjadi ancaman setiap tahunnya yang tentunya berimplikasi pada sulitnya upaya penurunan emisi karbon di Provinsi Jambi guna menciptakan kualitas lingkungan yang baik.

Peran Pemerintah Provinsi Jambi diperlukan untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap warga negara, dengan menjadi fasilitator dan katalisator atas berbagai inisiatif yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam pembangunan. Ini juga mencakup pentingnya perlindungan dan peningkatan inklusi sosial bagi kelompok-kelompok marjinal yang masih menghadapi ketimpangan akses dan manfaat pembangunan.

Kedua, hal ini juga bisa diartikan, pentingnya koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan berbagai unsur baik Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jambi, daerah yang berbatasan dengan Provinsi Jambi maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah. Beberapa sasaran seperti masih tingginya angka kemiskinan sebagai akibat dari bertambahnya jumlah penduduk tanpa diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, serta belum sinergisnya pemerintah daerah antar provinsi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Bagi instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas, kreatifitas, inovasi, dan komitmen yang kuat dalam upaya mencapai kinerja yang akuntabel sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
2022

Lampiran 1

PERNYATAAN REVIU APIP ATAS LKjIP



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Letjen. M.T. Haryono No. 02 Telp. (0741) 61606 – Fax. (0741) 62317
JAMBI – 36122

**PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jambi untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Provinsi Jambi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jambi, 14 Maret 2022

INSPEKTUR,



H. Agus Merianto S.H.
H. AGUS MERIANTO.S.H
Pembina Utama Muda
NIP.19690818 199703 1 004

Lampiran 2 PENGUKURAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

| No. | Indikator | Kondisi Awal (2016) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | Angka Realisasi Akhir RPJMD |
|-----|---|---------------------|------|-------|--------|--------|-----------|-----------------|-----------------------------|
| | | | | | | Target | Realisasi | % Capaian RPJMD | |
| 1. | Indeks Reformasi Birokrasi | CC | B | B | B | B | B | 100 | B |
| 2. | Indeks Pembangunan Manusia | 68,24 | | 71,26 | 71,29 | 71,8 | 71,63 | 99,76 | 71,63 |
| 3. | IDG | 61,93 | | 67,78 | 88,44 | 67,01 | 67,01 | 100 | 67,01 |
| 4. | Indeks Demokrasi Indonesia | 70,68 | | 68,71 | 69,76 | 78 | 75,53 | 96,83 | 75,53 |
| 5. | Total Factor Productivity (TFP) | NA | | 4,08 | 4,09 | 1,5 | 4,10 | 273,33 | 4,01 |
| 6. | Persentase share sektor Sekunder terhadap PDRB | 18,38 | | 17,77 | 18,99 | 22 | 20,03 | 91,04 | 20,03 |
| 7. | Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari) | 3.204 | | 3.047 | 3.005 | 3.217 | 3.008 | 93,5 | 3.008 |
| 8. | Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi mantap | 75,56% | | 77,93 | 76,51% | 79,54 | 76,29 | 95,91 | 76,29 |
| 9. | Rasio Elektrifikasi | 81,5 | | 99,89 | 99,90% | 96 | 99,99 | 104,15 | 99,99 |
| 10. | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan | 62,75% | | 66,66 | 70,71% | 80 | 79,70 | 99,62 | 79,70 |
| 11. | Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik | 66,35 | | 73,3 | 76,89 | 91 | 77,02 | 84,63 | 77,02 |
| 12. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 52,72 | | 71* | 68,06% | 66 | 68,02 | 103,06 | 68,02 |
| 13. | Angka Kemiskinan | 9,12% | | 7,51 | 7,58% | 7,4 | 8,09 | 91,47 | 8,09 |
| 14. | Tingkat pengangguran Terbuka | 4,20% | | 4,19 | 5,13% | 2,80 | 5,09 | 55,01 | 5,09 |
| 15. | Laju Pertumbuhan Penduduk | 2,24 | | 1,55 | 1,34% | 1,82 | 1,34 | 135,82 | 1,34 |

Lampiran 3

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Drs. H. FACHRORI UMAR, M.Hum**

Jabatan : GUBERNUR JAMBI

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jambi, Januari 2021

GUBERNUR JAMBI,

TTD

Dr. Drs. H. FACHRORI UMAR, M. Hum

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan pelayanan publik berkualitas | Indeks Reformasi Birokrasi | B |
| 2. | Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan | Indeks Pembangunan Manusia | 71,8 |
| 3. | Meningkatnya kapabilitas dan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan | Indeks Pemberdayaan Gender | 67,01 |
| 4. | Terwujudnya ketertiban umum daerah | Indeks Demokrasi Indonesia | 78 |
| 5. | Meningkatnya Total Factor Productivity (TFP) | Total Factor Productivity (TFP) | 1,5 |
| 6. | Perubahan struktur ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah | Persentase <i>share</i> sektor Sekunder terhadap PDRB | 22,00% |
| 7. | Meningkatnya ketahanan pangan | Ketersediaan Energi (kkal/kap/hari) | 3.217 |
| 8. | Terciptanya akselerasi pembangunan infrastruktur transportasi yang menyentuh terhadap akses dan sentra perekonomian | Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi mantap | 79,54% |
| 9. | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik | Rasio Elektrifikasi | 96% |
| 10. | Meningkatnya akses terhadap air bersih dan pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan | 80% |
| | | Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik | 91% |
| 11. | Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya alam yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 66 |
| 12. | Menurunnya angka kemiskinan | Angka Kemiskinan | 7,40% |
| 13. | Menurunnya angka pengangguran | Tingkat pengangguran Terbuka | 2,8% |
| 14. | Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk | Laju Pertumbuhan Penduduk | 1,82% |

| Program | Anggaran |
|---|-------------------------|
| 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Rp 1,958,999,520,058.00 |
| 2 Program Pengelolaan Pendidikan | Rp 789,342,560,726.00 |
| 3 Program Pengembangan Kurikulum | Rp 1,641,169,562.00 |
| 4 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Rp 43,621,589,449.00 |

| | Program | | Anggaran |
|----|--|----|--------------------|
| 5 | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan | Rp | 108,832,000.00 |
| 6 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Rp | 126,264,094,765.00 |
| 7 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Rp | 1,007,292,406.00 |
| 8 | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | Rp | 519,629,098.00 |
| 9 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Rp | 718,793,812.00 |
| 10 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Rp | 46,698,017,391.00 |
| 11 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Rp | 1,016,199,970.00 |
| 12 | Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | Rp | 825,206,951.00 |
| 13 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Rp | 1,113,682,423.00 |
| 14 | Program Pengembangan Permukiman | Rp | 5,679,643,000.00 |
| 15 | Program Penataan Bangunan Gedung | Rp | 41,666,354,530.00 |
| 16 | Program Penyelenggaraan Jalan | Rp | 101,953,200,187.00 |
| 17 | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Rp | 3,010,547,336.00 |
| 18 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Rp | 4,749,999,150.00 |
| 19 | Program Pengembangan Perumahan | Rp | 1,423,024,460.00 |
| 20 | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) | Rp | 18,256,846,713.00 |
| 21 | Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Rp | 4,554,261,700.00 |
| 22 | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Rp | 499,973,385.00 |
| 23 | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Rp | 2,498,491,600.00 |
| 24 | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Rp | 897,524,320.00 |
| 25 | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Rp | 582,148,720.00 |
| 26 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Rp | 1,499,999,980.00 |
| 27 | Program Penanggulangan Bencana | Rp | 4,232,125,726.00 |
| 28 | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran | Rp | 187,412,900.00 |
| 29 | Program Pemberdayaan Sosial | Rp | 1,679,468,462.00 |
| 30 | Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | Rp | 150,000,000.00 |

| | Program | | Anggaran |
|----|---|----|------------------|
| 31 | Program Rehabilitasi Sosial | Rp | 4,889,787,905.00 |
| 32 | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Rp | 523,916,111.00 |
| 33 | Program Penanganan Bencana | Rp | 233,086,143.00 |
| 34 | Program Pendaftaran Penduduk | Rp | 629,996,514.00 |
| 35 | Program Pencatatan Sipil | Rp | 659,829,986.00 |
| 36 | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Rp | 1,949,697,883.00 |
| 37 | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | Rp | 149,994,038.00 |
| 38 | Program Perencanaan Tenaga Kerja | Rp | 70,000,200.00 |
| 39 | Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | Rp | 1,195,209,079.00 |
| 40 | Program Penempatan Tenaga Kerja | Rp | 582,852,791.00 |
| 41 | Program Hubungan Industrial | Rp | 400,112,640.00 |
| 42 | Program Pengawasan Ketenagakerjaan | Rp | 631,169,564.00 |
| 43 | Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi | Rp | 139,997,966.00 |
| 44 | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Rp | 73,668,540.00 |
| 45 | Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi | Rp | 415,299,680.00 |
| 46 | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | Rp | 1,333,753,811.00 |
| 47 | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat | Rp | 1,951,476,906.00 |
| 48 | Program Pengendalian Penduduk | Rp | 100,735,030.00 |
| 49 | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan | Rp | 3,144,416,494.00 |
| 50 | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Rp | 2,220,047,215.00 |
| 51 | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Rp | 239,814,780.00 |
| 52 | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Rp | 473,168,810.00 |
| 53 | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Rp | 650,000,000.00 |
| 54 | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Rp | 1,916,258,558.00 |
| 55 | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) | Rp | 133,000,000.00 |
| 56 | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Rp | 307,282,000.00 |
| 57 | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Rp | 9,274,951,053.00 |
| 58 | Program Pengelolaan Pelayaran | Rp | 600,653,934.00 |
| 59 | Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Rp | 9,908,742,954.00 |
| 60 | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Rp | 1,755,553,053.00 |

| | Program | | Anggaran |
|----|--|----|-------------------|
| 61 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektor | Rp | 315,062,650.00 |
| 62 | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Rp | 482,050,533.00 |
| 63 | Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam | Rp | 319,621,400.00 |
| 64 | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Rp | 399,423,500.00 |
| 65 | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | Rp | 241,499,850.00 |
| 66 | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | Rp | 2,352,078,592.00 |
| 67 | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Rp | 1,130,351,901.00 |
| 68 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) | Rp | 694,999,893.00 |
| 69 | Program Pengembangan Umkm | Rp | 499,999,780.00 |
| 70 | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Rp | 3,679,285,986.00 |
| 71 | Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan | Rp | 27,708,455,570.00 |
| 72 | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | Rp | 2,737,080,000.00 |
| 73 | Program Pengembangan Kebudayaan | Rp | 2,250,506,408.00 |
| 74 | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya | Rp | 437,406,040.00 |
| 75 | Program Pembinaan Perpustakaan | Rp | 840,233,616.00 |
| 76 | Program Pengelolaan Arsip | Rp | 817,906,774.00 |
| 77 | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil | Rp | 1,239,197,616.00 |
| 78 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Rp | 3,915,120,792.00 |
| 79 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Rp | 1,671,100,832.00 |
| 80 | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan | Rp | 644,400,866.00 |
| 81 | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | Rp | 2,051,854,721.00 |
| 82 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Rp | 1,431,977,414.00 |
| 83 | Program Pemasaran Pariwisata | Rp | 1,699,699,100.00 |
| 84 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | Rp | 21,903,562,687.00 |
| 85 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Rp | 13,648,938,861.00 |
| 86 | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Rp | 514,984,482.00 |
| 87 | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Rp | 855,531,906.00 |
| 88 | Program Perizinan Usaha Pertanian | Rp | 74,999,910.00 |
| 89 | Program Penyuluhan Pertanian | Rp | 1,056,428,643.00 |
| 90 | Program Pengelolaan Hutan | Rp | 6,193,510,560.00 |
| 91 | Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya | Rp | 1,185,963,903.00 |
| 92 | Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan | Rp | 1,371,612,220.00 |

| | Program | | Anggaran |
|-----|---|----|--------------------|
| | Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan | | |
| 93 | Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) | Rp | 187,516,445.00 |
| 94 | Program Pengelolaan Aspek Kegeologian | Rp | 158,525,200.00 |
| 95 | Program Pengelolaan Mineral dan Batubara | Rp | 249,842,550.00 |
| 96 | Program Pengelolaan Energi Terbarukan | Rp | 5,128,179,057.00 |
| 97 | Program Pengelolaan Ketenagalistrikan | Rp | 940,196,560.00 |
| 98 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Rp | 31,339,000.00 |
| 99 | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | Rp | 916,872,100.00 |
| 100 | Program Pengembangan Ekspor | Rp | 390,475,580.00 |
| 101 | Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen | Rp | 1,687,009,228.00 |
| 102 | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Rp | 5,254,282,925.00 |
| 103 | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Rp | 67,749,645,120.00 |
| 104 | Program Penataan Organisasi | Rp | 1,836,583,570.00 |
| 105 | Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah | Rp | 1,897,062,452.00 |
| 106 | Program Kesejahteraan Rakyat | Rp | 63,725,474,035.00 |
| 107 | Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Rp | 1,822,033,650.00 |
| 108 | Program Perekonomian dan Pembangunan | Rp | 1,388,760,040.00 |
| 109 | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Rp | 7,631,723,465.00 |
| 110 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | Rp | 2,994,789,020.00 |
| 111 | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Rp | 4,330,448,220.00 |
| 112 | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp | 3,739,494,619.00 |
| 113 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Rp | 979,817,419,454.00 |
| 114 | Program Kepegawaian Daerah | Rp | 3,013,723,992.00 |
| 115 | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Rp | 6,405,471,435.00 |
| 116 | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | Rp | 2,207,559,670.00 |

Jambi, Januari 2021

GUBERNUR JAMBI,

TTD

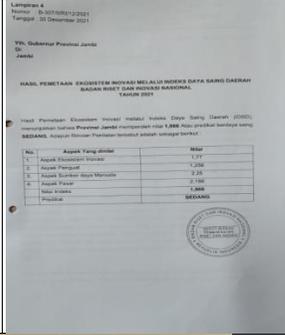
Dr. Drs. H. FACHRORI UMAR, M.Hum.

Lampiran 4 PENGHARGAAN

Penghargaan yang Diraih Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jambi Tahun 2021

| No | Nama Penghargaan | Pemberi Penghargaan | PD/Biro Penerima Penghargaan | Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan | Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Penerimaan Penghargaan) |
|----|---|--|------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2021 | Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia | Disnakertrans Prov Jambi | Jakarta, 28 April 2021 |  <p>Foto dokumentasi saat penerimaan penghargaan K3 2021. Dua orang perempuan, salah satunya dalam seragam dinas, sedang menyerahkan piala kepada penerima penghargaan di depan backdrop bertema 'PENGHARGAAN K3 2021'.</p> |
| 2. | IPK Terbaik kedua urusan Ketenagakerjaan Kecil | Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia | Disnakertrans Prov Jambi | Jakarta, 13 Desember 2021 |  <p>Piagam penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Judul: 'Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2020'. Nomor: B-7/434/RK.00.00/XI/2021. Diberikan kepada Provinsi: JAMBI. Untuk Kategori: Terbaik Kedua Urusan Ketenagakerjaan Kecil. Berdasarkan Hasil Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Tahun 2020. Jakarta, 13 Desember 2021. Ditandatangani oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Baniyong Saifur Ridwan, NIP. 19620705 198803 1 002.</p> |

| | | | | | |
|----|--|--|---------------------------|---------------------------|--|
| 3. | Penghargaan Produktivitas Paramakarya Tingkat Nasional dari Kementerian Tenaga Kerja | Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia | Disnakertrans Prov .Jambi | Jakarta, 18 Nopember 2021 |  <p>Gubernur Al Haris terima penghargaan Produktivitas Paramakarya 2021</p> <p>Terima kasih Masyarakat Jambi dalam peningkatan produktivitas usahanya, semoga berkarya untuk Jambi</p> |
|----|--|--|---------------------------|---------------------------|--|

| No | Nama Penghargaan | Pemberi Penghargaan | PD/Biro Penerima Penghargaan | Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan | Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala/Foto saat Penerimaan Penghargaan) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|------------------------------|---|--|-----|-------------------|-------|----|---------------|------|----|----------------|------|----|---------------------------|------|----|-------------|------|----|--------------|------|----|---------------|------|----|---------------|------|----|---------------|------|----|---------------|------|-----|---------------|------|-----|---------------|------|-----|---------------|------|-----|---------------|------|-----|---------------|------|-----|---------------|------|-----|---------------|------|-----|---------------|------|-----|---------------|------|-----|---------------|------|-----|---------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Lomba <i>Innovative Government Award</i> (IGA) | Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri RI. | Gubernur Jambi | Jakarta, 29 Desember 2021 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Pemetaan Indeks Daya Saing Daerah | Badan Riset dan dan Inovasi Nasional | Gubernur Jambi | Jakarta, 30 Desember 2021 |  <table border="1" data-bbox="1601 750 1848 813"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Aspek Yang diukur</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Aspek Inovasi</td> <td>1,19</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Aspek Pengaruh</td> <td>1,26</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Aspek Sumbah Daya Manusia</td> <td>1,36</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Aspek Pasar</td> <td>1,16</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Aspek Sanksi</td> <td>1,06</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Aspek Inovasi</td> <td>1,16</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Aspek Inovasi</td> <td>1,16</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Aspek Inovasi</td> <td>1,16</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Aspek Inovasi</td> <td>1,16</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Aspek Inovasi</td> <td>1,16</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Aspek Inovasi</td> <td>1,16</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>Aspek Inovasi</td> <td>1,16</td> </tr> <tr> <td>13.</td> <td>Aspek Inovasi</td> <td>1,16</td> </tr> <tr> <td>14.</td> <td>Aspek Inovasi</td> <td>1,16</td> </tr> <tr> <td>15.</td> <td>Aspek Inovasi</td> <td>1,16</td> </tr> <tr> <td>16.</td> <td>Aspek Inovasi</td> <td>1,16</td> </tr> <tr> <td>17.</td> <td>Aspek Inovasi</td> <td>1,16</td> </tr> <tr> <td>18.</td> <td>Aspek Inovasi</td> <td>1,16</td> </tr> <tr> <td>19.</td> <td>Aspek Inovasi</td> <td>1,16</td> </tr> <tr> <td>20.</td> <td>Aspek Inovasi</td> <td>1,16</td> </tr> </tbody> </table> | No. | Aspek Yang diukur | Nilai | 1. | Aspek Inovasi | 1,19 | 2. | Aspek Pengaruh | 1,26 | 3. | Aspek Sumbah Daya Manusia | 1,36 | 4. | Aspek Pasar | 1,16 | 5. | Aspek Sanksi | 1,06 | 6. | Aspek Inovasi | 1,16 | 7. | Aspek Inovasi | 1,16 | 8. | Aspek Inovasi | 1,16 | 9. | Aspek Inovasi | 1,16 | 10. | Aspek Inovasi | 1,16 | 11. | Aspek Inovasi | 1,16 | 12. | Aspek Inovasi | 1,16 | 13. | Aspek Inovasi | 1,16 | 14. | Aspek Inovasi | 1,16 | 15. | Aspek Inovasi | 1,16 | 16. | Aspek Inovasi | 1,16 | 17. | Aspek Inovasi | 1,16 | 18. | Aspek Inovasi | 1,16 | 19. | Aspek Inovasi | 1,16 | 20. | Aspek Inovasi | 1,16 |
| No. | Aspek Yang diukur | Nilai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Aspek Inovasi | 1,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Aspek Pengaruh | 1,26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Aspek Sumbah Daya Manusia | 1,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Aspek Pasar | 1,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Aspek Sanksi | 1,06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Aspek Inovasi | 1,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Aspek Inovasi | 1,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Aspek Inovasi | 1,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Aspek Inovasi | 1,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Aspek Inovasi | 1,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Aspek Inovasi | 1,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Aspek Inovasi | 1,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Aspek Inovasi | 1,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Aspek Inovasi | 1,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Aspek Inovasi | 1,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Aspek Inovasi | 1,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Aspek Inovasi | 1,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Aspek Inovasi | 1,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Aspek Inovasi | 1,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Aspek Inovasi | 1,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Lomba Inovasi Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi | Balitbangda Provinsi Jambi | Balitbangda Provinsi Jambi | Jambi, Agustus 2021 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Nama Penghargaan | Pemberi Penghargaan | PD Penerima Penghargaan | Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan | Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Penerimaan Penghargaan) |
|----|---|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Piagam Penghargaan RSUD Raden Mattaher atas Inovasi Manajemen Pengelolaan Limbah Menjadi Limbah Nilai Ekonomis (MENEMPEL MELEK) TOP Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021 | Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi | RSUD Raden Mattaher Jambi | November 2021 |  |
| 2 | Piagam Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2021 sebagai Provinsi sangat Inovatif | Menteri Dalam Negeri | Gubernur Jambi dan Plt. Direktur RSUD Raden Mattaher Jambi | 29 Desember 2021 |  |

Penghargaan yang Diraih Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2021

| No | Nama Penghargaan | Pemberi Penghargaan | PD/Biro Penerima Penghargaan | Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan | Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Penerimaan Penghargaan) |
|----|---|--|------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Peringkat III Provinsi dengan Ekspor Komoditas Pertanian Tertinggi | Kementerian Pertanian Republik Indonesia | Dinas Perkebunan Prov Jambi | Jakarta, 13 September 2021 |  |
| 2. | Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Prov. Jambi Tahun 2021, sebagai Badan Publik "Cukup Informatif" | Komisi Informasi Provinsi Jambi | Dinas Perkebunan Prov Jambi | 22 Desember 2021 |  |
| 3. | Penghargaan dan Ucapan Terima Kasih Atas Partisipasi pada Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN) | Gubernur Jambi | Dinas Perkebunan Prov Jambi | Desember 2021 |  |

Sumber : Data olahan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2021.



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

**Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 1
Telanaipura Jambi**